

***GUIDE* ARSIP
PEMILIHAN UMUM 1955 - 1999**



**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2015**

KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamankan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, kemasyarakatan dan perseorangan. Pengelolaan arsip statis bertujuan menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip statis yang dikelola oleh ANRI merupakan memori kolektif, identitas bangsa, bahan pengembangan ilmu pengetahuan, dan sumber informasi publik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pengolahan arsip statis, maka khazanah arsip statis yang tersimpan di ANRI harus diolah dengan benar berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan sehingga arsip statis dapat ditemukan dengan cepat, tepat dan lengkap.

Pada tahun anggaran 2015 ini, salah satu program kerja Sub Bidang Pengolahan Arsip I yang berada di bawah Direktorat Pengolahan adalah menyusun *Guide* Arsip Pemilihan Umum 1955-1999. *Guide* arsip ini merupakan sarana bantu penemuan kembali arsip statis bertema pemilihan umum dengan kurun waktu 1955-1999 yang arsipnya tersimpan dan dapat diakses di ANRI.

Seperti kata pepatah, “tiada gading yang tak retak”, maka *guide* arsip ini tentunya belum sempurna dan masih ada kekurangan. Namun demikian *guide* arsip ini sudah dapat digunakan sebagai sarana untuk mengakses dan menelusuri arsip statis mengenai Pemilihan Umum 1955-1999 yang tersimpan di ANRI dalam rangka pelayanan arsip statis kepada pengguna arsip (*user*).

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan ANRI, anggota tim, Komisi Pemilihan Umum dan semua pihak yang telah membantu penyusunan *guide* arsip ini hingga selesai. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa membalas amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara berikan. Amin.

Jakarta, 2015
Direktur Pengolahan

Azmi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
KETERANGAN GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Arsip Pemilihan Umum 1955-1999	3
C. Penyusunan <i>Guide</i> Arsip Pemilihan Umum 1955-1999.....	4
D. Petunjuk Penggunaan Guide Arsip Pemilihan Umum 1955-1999	5
\	
BAB II DESKRIPSI INFORMASI ARSIP	8
A. Persiapan Pemilihan Umum.....	8
1. Abstrak.....	8
2. Kebijakan	9
a. Arsip Tekstual.....	9
3. Penyelenggara	22
a. Arsip Tekstual.....	22
b. Arsip Foto	28
c. Arsip Film.....	30
4. Anggaran.....	44
a. Arsip Tekstual.....	44
5. Peserta.....	46
a. Arsip Tekstual.....	46
b. Arsip Foto	54
c. Arsip Film.....	56
B. Pelaksanaan Pemilihan Umum	58
1. Abstrak.....	58
2. Kampanye	59
a. Arsip Tekstual.....	59
b. Arsip Foto	63
c. Arsip Film.....	69

3.	Pemungutan Suara	90
a.	Arsip Tekstual	90
b.	Arsip Foto	92
c.	Arsip Film	122
4.	Penetapan Hasil	127
a.	Arsip Tekstual	127
b.	Arsip Foto	151
c.	Arsip Film	152
5.	Evaluasi	161
a.	Arsip Tekstual	161
b.	Arsip Film	167
BAB III PENUTUP.....		168
LAMPIRAN		169
1.	Indeks	169
2.	Daftar Singkatan	186

KETERANGAN GAMBAR

1. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS Joyokusuman, Kemantren Keraton, Yogyakarta, 29 September 1955. (Kempen DI Yogyakarta 1950-1965, No. 4891)
2. Para peserta kampanye dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) memenuhi lapangan, 03 April 1987. (Setneg RI 1966-1989, No. 2747)
3. Halaman pertama dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
4. Presiden dan Wakil Presiden, Perdana Menteri bersama sama rakyat memilih (*Shoot* dalam Film Gelora Indonesia: 226)
5. Ketua Umum DPP Golongan Karya (Golkar) Soedarmono dengan disaksikan 150.000 massa Golkar sedang memperagakan cara menusuk gambar pohon beringin pada rapat akbar di Gelanggang Olahraga H. Agus Salim Padang, April 1987 (Setneg 1966-1989, No. 2753)
6. Pemilihan umum di Tanjung Balai. Tampak petugas sedang membuka kartu suara untuk diperlihatkan kepada para hadirin yang siap untuk memilih. Di dalam kertas suara tersebut terlihat gambar-bambar/ lambang partai-partai yang ikut pemilu. Tanjung Balai, 29 September 1955 (Kempen Sumatera Utara 1950-1955, No. 3599)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu media demokrasi yang digunakan untuk mewujudkan partisipasi rakyat dan dianggap penting dalam proses dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian yang lebih sempit mengatakan bahwa pemilu adalah sarana demokrasi untuk memilih yang dipercaya rakyat untuk memangku tugas sebagai pimpinan negara dan memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk sebagai anggota parlemen (Ranadireksa, 2002).

Mengenai sejarah lahirnya pemilu sendiri, berangkat dari ketidak-mungkinan diselenggarakannya sistem demokrasi secara langsung. Pertumbuhan populasi masyarakat yang begitu pesat dalam suatu negara pada akhirnya melahirkan sistem demokrasi representasi (*representation democracy*), untuk itulah maka pemilu diselenggarakan, dengan tujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam mewujudkan cita-cita demokrasi (Katz, 1997). Sebagai negara yang demokratis, Indonesia telah memiliki pengalaman pemilu beberapa kali. Sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga pasca reformasi 1999 telah diselenggarakan pemilu sebanyak 8 (delapan) kali. Dalam kurun waktu tersebut, ada periode di mana Indonesia tidak menyelenggarakan pemilu secara rutin setiap lima tahun sekali. Hal tersebut dikarenakan kondisi politik yang belum stabil.

Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama pada 1955 sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu ini diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 29 September 1955 dan Konstituante pada 15 Desember 1955. Selain itu, juga diselenggarakan pemilihan DPRD pada Juni dan Juli 1957. Peserta Pemilu pada 1955 mencapai 172 tanda gambar dari berbagai partai politik, organisasi massa, dan perseorangan. Hasil Pemilu DPR dan Konstituante menempatkan Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) sebagai lima besar dalam perolehan suara.

Pemilu kedua seharusnya dilanjutkan lima tahun setelah pemilu pertama. Akan tetapi gagal dikarenakan terjadi perubahan dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin. Ketika itu, Presiden Sukarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 setelah DPR menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan pemerintah. Selanjutnya Presiden membentuk DPR Gotong-Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat oleh Presiden. Perubahan politik kembali terjadi pasca Gerakan 30 September 1965 yang kemudian memaksa Presiden Sukarno untuk menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Suharto.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Suharto diselenggarakan pemilu kedua (5 Juli 1971). Undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu ini adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelenggara pemilu adalah Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai Menteri Dalam Negeri. Pemilu 1971 diikuti 10 peserta yang terdiri 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. Empat besar pemenang pemilu 1971 adalah Golongan Karya (Golkar), NU, Partai Muslim Indonesia (Parmusi), dan PNI.

Pemilu ketiga diselenggarakan pada 1977, setelah pemerintah berusaha menyederhanakan jumlah partai politik dengan membentuk Undang Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Pemilu kemudian hanya diikuti oleh 3 peserta yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golkar. Setelah pemilu 1977, pemilu dapat dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali yaitu pemilu keempat 1982, pemilu kelima 1987, pemilu keenam 1992 dan pemilu ketujuh pada 29 Mei 1997. Selama pemilu 1977-1997, Golkar selalu meraih kemenangan, jauh melampaui PPP dan PDI.

Setelah Presiden Suharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 akibat krisis politik dan ekonomi, Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie yang kemudian menjadi Presiden RI segera melaksanakan pemilu pada 7 Juni 1999. Penyelenggara pemilu 1999 adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggotanya berasal dari wakil partai politik dan wakil dari pemerintah. Sebanyak 48 partai politik menjadi peserta pemilu 1999 dengan hasil lima besar yaitu PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PPP dan Partai Amanat Nasional (PAN).

B. Gambaran Arsip Pemilihan Umum 1955-1999

Materi *guide* arsip ini merupakan hasil penelusuran arsip terkait dengan pemilu 1955-1999 pada seluruh daftar dan inventaris arsip yang tersedia di unit layanan arsip. Hasil penelusuran telah mengidentifikasi jenis arsip yang memiliki informasi tentang pemilu 1955-1999 yaitu terdiri atas arsip tekstual/arsip kertas, arsip foto, dan arsip film.

Arsip tekstual yang memiliki informasi tentang pemilu 1955-1999 berjumlah 739 berkas yang terdapat dalam khazanah arsip Sekretariat Negara berupa arsip Sekretariat Negara RI 1945-1949, Sekretariat Negara RI Yogyakarta 1949-1950, Kabinet Presiden 1950-1959, Kabinet Perdana Menteri 1950-1959, Sekretariat Wakil Presiden Adam Malik 1978-1982, Sekretariat Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX 1973-1978, Sekretariat Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma dan Seri Pidato Presiden Suharto 1966-1998.

Informasi pemilu juga terdapat di khazanah arsip organisasi masyarakat dan organisasi politik berupa arsip Nahdlatul Ulama 1948-1979, Muhammadiyah, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, SOBSI 1950-1965 dan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Selain itu, informasi pemilu secara utuh terdapat di khazanah arsip Komisi Pemilihan Umum 1971-1999.

Informasi pemilu 1955-1999 berupa arsip foto berjumlah 406 nomor arsip terdapat di khazanah arsip Kementerian Penerangan (Kempen) berupa arsip Kempen wilayah Aceh 1947-1965, Sumatera Utara 1950-1955, Sumatera Selatan 1950-1967, Jawa Tengah 1950-1965, DI Yogyakarta 1950-1965. Terdapat pula di khazanah arsip Sekretariat Negara 1966-1989. Sedangkan untuk arsip film berjumlah 113 nomor arsip terdapat di khazanah arsip Pusat Produksi Film Negara (PPFN) Seri Gelora Indonesia, Gelora Pembangunan, Video TVRI 1982, dan (VCD) KPU 1999. Isi informasi dalam arsip tersebut tentang tahapan penyelenggaraan pemilu mulai dari persiapan yang terkait peraturan perundang-undangan, lembaga penyelenggara, peserta, anggaran pemilu hingga pelaksanaan yang terkait kampanye, pemungutan suara, penetapan hasil dan evaluasi pemilu.

C. Penyusunan *Guide* Arsip Pemilihan Umum 1955-1999

Penyusunan *Guide* Arsip Pemilihan Umum 1955-1999 merupakan kegiatan unit Sub Direktorat Pengolahan Arsip I, Direktorat Pengolahan pada tahun anggaran 2015, dengan keanggotaan sebagai berikut: Azmi (Penanggung Jawab Kegiatan), Retno Wulandari (Penanggung Jawab Pelaksana Teknis), Widhi Setyo Putro (Koordinator), Yudhi Risti Purnomo (Sekretaris), Nurarta Situmorang (anggota), Supriyono (anggota), Bakat Untoro (anggota), Dwi Hening Cipto (anggota), Sukmawati Mochtar (anggota), Khoerun Nisa Fadilah (anggota), Sari Diana (anggota), Eka Deasy W. (anggota), Wasir Sugiyanto (anggota), Satimin (anggota).

Penyusunan *guide* arsip ini dilakukan berdasarkan pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis. Ada enam tahap dalam melakukan penyusunan *guide* arsip, yaitu:

- 1) Melakukan identifikasi informasi arsip pada daftar arsip dan inventaris arsip yang memiliki kaitan dengan pemilu. Identifikasi meliputi pencipta arsip (*provenance*), periode arsip, dan jenis media arsip.
- 2) Menyusun rencana teknis yang berisi rincian waktu, tahapan kerja, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan biaya.
- 3) Melakukan penelusuran sumber arsip melalui daftar dan inventaris arsip yang tersedia di ruang layanan arsip sebagai bahan penyusunan *guide* arsip. Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan sumber sekunder di KPU, Perpustakaan Nasional dan publikasi lainnya melalui jaringan internet. Maksud dan tujuan melakukan penelusuran referensi ini adalah untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang sejarah pemilu berdasarkan sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan keabsahannya.
- 4) Melakukan penulisan *guide* arsip, yang dilakukan setelah semua data dan informasi terkumpul dengan skema penulisan sebagai berikut:
 - a. Judul;
 - b. Kata pengantar;
 - c. Daftar isi;

- d. Pendahuluan, meliputi latar belakang, gambaran arsip pemilu dan penyusunan *guide* arsip;
- e. Deskripsi informasi arsip, meliputi deskripsi arsip dalam daftar dan inventaris arsip yang terkait dengan pemilu. Informasi dalam *guide* arsip ini dikelompokkan ke dalam dua tahap penyelenggaraan pemilu secara garis besar yaitu persiapan dan pelaksanaan pemilu. Selanjutnya dikelompokkan berdasarkan jenis arsip, yaitu arsip tekstual, foto, dan arsip film;
- f. Indeks, penyusunan indeks terdiri indeks nama, tempat, dan istilah yang terdapat di dalam deskripsi informasi arsip;
- g. Daftar singkatan, penulisan daftar singkatan dikutip dari deskripsi informasi arsip pada *guide* arsip ini.

Pada tahap ini juga dilakukan verifikasi fisik dan informasi arsip statis di depot.

- 5) Melakukan penilaian dan penelaahan terhadap isi materi dan redaksi *guide* arsip untuk mendapatkan masukan dan koreksi dari Direktur Pengolahan selaku penanggung jawab kegiatan. Draf *guide* arsip yang telah disempurnakan kemudian ditandatangani oleh Direktur Pengolahan sebagai tanda pengesahan.
- 6) Melakukan publikasi dan distribusi. *Guide* Arsip Pemilihan Umum 1955-1999 kemudian dicetak dan diperbanyak untuk selanjutnya didistribusikan ke Subdit Layanan Arsip dan Subdit Penyimpanan Arsip.

D. Petunjuk Penggunaan *Guide* Arsip Pemilihan Umum 1955-1999

Untuk dapat mengakses arsip dengan menggunakan *guide* arsip ini, pengguna cukup mencatat nama daftar atau inventaris arsip beserta nomor arsipnya di formulir peminjaman arsip yang tersedia di ruang baca. Untuk arsip tekstual dan foto, nomor arsip terdapat pada akhir setiap uraian informasi.

Contoh untuk arsip tekstual:

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 Jilid II

- 22) Berkas keterangan pemerintah tentang Program Kabinet Burhanuddin Harahap mengenai hubungan luar negeri dan pelaksanaan pemilu. 21 September - 3 Oktober 1955, pertinggal, 1 sampul. (No. 831)

Pengguna hanya menuliskan **Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 Jilid II, No. 831.**

Contoh untuk arsip foto:

Kempen Sumatera Utara 1950-1955

494) Suasana pemilu di Kabupaten Deli Serdang. 29 September 1955 (No. 3618, No. Negatif 12)

Pengguna hanya menuliskan **Kempen Sumatera Utara, (No. 3618, No. Negatif 12)**

Khusus untuk arsip film, selain menulis judul daftar atau inventaris arsip, pengguna juga perlu mencantumkan nomor film, nomor kaset dan/ nomor reproduksi.

Contoh untuk arsip film:

PPFN Seri Gelora Indonesia

Film GI	: 241
File	: Pendidikan
Type	: Released
Produksi	: 1956
Nomor Reproduksi	: DVD RK 74
Isi	: Hasil Pemilihan Umum.

Pengguna hanya menuliskan **PPFN: Seri Gelora Indonesia, GI 241, No Reproduksi DVD RK 74**

Untuk memudahkan penemuan informasi dalam *guide* arsip ini, pengguna juga dapat melihat indeks yang terdiri dari indeks nama (orang dan organisasi), wilayah dan istilah. Indeks mengacu pada nomor *guide arsip* dalam uraian informasi arsip di Bab II dan III.

DAFTAR PUSTAKA

- Azed, Abdul Bari. "Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," dalam *Sistem-Sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2000.
- Katz, Richard S. *Democracy and Elections*. New York: Oxford University Press, 1997.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Ranadireksa, Hendarmin. *Amandemen UUD 1945, Menuju Konstitusi Yang Berkedaulatan Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2002
- Tricahyo, Ibnu. *Reformasi Pemilu*. Malang: In-Trans Publishing, 2009

BAB II DESKRIPSI INFORMASI ARSIP

A. PERSIAPAN PEMILIHAN UMUM

1. Abstrak



Gambar 1

Pemandangan dalam sidang kongres anggota PPI Sdr. Rustam St. Palinding,
tengah memberi sambutan di Kupang, 11 Oktober 1954.
Sumber: Kempen Nusa Tenggara Timur (No. 1879)

Pemilu merupakan hal fundamental bagi setiap negara yang sistem politiknya mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Untuk menyelenggarakan sebuah ‘pesta demokrasi’, pemerintah perlu mempersiapkan beberapa hal penting antara lain terkait dengan penyusunan dasar hukum, penentuan sistem pemilu, pembentukan lembaga penyelenggara, penyediaan anggaran, dan pendaftaran peserta pemilu. Tahapan persiapan pemilu tersebut, terekam dalam setiap deskripsi arsip yang ditampilkan dalam bab ini. Terdapat 273 nomor arsip dari 24 daftar dan inventaris arsip tekstual, 34 nomor arsip dari 6 daftar dan inventaris arsip foto, 48 nomor arsip dari 4 daftar dan inventaris arsip film yang memiliki informasi mengenai tahapan persiapan Pemilu 1955-1999.

Pengelompokan informasi arsip pada persiapan pemilu meliputi kebijakan, penyelenggara, anggaran dan peserta pemilu. Kebijakan antara lain memuat informasi mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum pemilu. Informasi ini terdapat dalam 106 nomor arsip tekstual dengan periode arsip tahun 1950-1999. Penyelenggara antara lain memuat informasi mengenai pembentukan dan pelantikan anggota Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) pada Pemilu 1955, Lembaga Pemilihan Umum (LPU) pada Pemilu 1971-1997, dan Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu 1999. Informasi ini terdapat dalam 65 nomor arsip tekstual, 16 nomor arsip foto dan 45 nomor arsip film dengan periode arsip tahun 1948-1999.

Anggaran antara lain memuat informasi mengenai biaya seperti gaji panitia dan pembelian peralatan pemilu. Informasi ini terdapat dalam 18 nomor arsip tekstual dengan periode arsip tahun 1954-1998. Peserta pemilu antara lain memuat informasi mengenai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik dan organisasi masyarakat yang menjadi peserta dalam pemilu. Informasi ini terdapat dalam 84 nomor arsip tekstual, 18 nomor arsip foto dan 3 nomor arsip film dengan periode arsip tahun 1950-1999.

Informasi tersebut banyak terdapat di dalam Inventaris Arsip Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 Jilid I, Kabinet Presiden RI 1950-1959, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1971-1999 untuk arsip tekstual, Kempen DI Yogyakarta 1950-1965, Kempen Sumatera Utara 1950-1955, Kempen Nusa Tenggara Timur 1950-1963, Sekretariat Negara RI 1966-1989 untuk arsip foto, PPFN Seri Gelora Indonesia, TVRI, Komisi Pemilihan Umum 1999 untuk arsip film. Berikut ini adalah deskripsi arsip dalam beberapa khazanah arsip statis di ANRI yang memuat informasi arsip terkait dengan tahapan persiapan pemilu 1955-1999:

2. Kebijakan

a. Arsip Tekstual

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959

- 1) Surat dari Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan kepada Perdana Menteri mengenai Rencana Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan Anggota DPRDS. 2 November 1953, tembusan, 4 lembar. (No. 1765)

- 2) Surat Edaran Perdana Menteri tentang Turut Sertanya Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik dan Partai Politik. 21 Februari 1955, fotokopi, 3 lembar. (No. 1896)
- 3) Surat Keputusan DPRS No. 28/K/1950 tentang Penetapan Peraturan Cara Pencalonan dan Pemilihan untuk Dianjurkan sebagai Wakil Presiden yang Pertama. 26 September 1950, asli, 2 lembar. (No. 1904)
- 4) Surat dari Sekretaris Menteri Kehakiman kepada Ketua Dewan Menteri RI mengenai penyampaian sebuah nota mengenai Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Konstituante beserta lampiran. 6 Januari 1951, asli, 6 lembar. (No. 1905)
- 5) Surat dari Menteri Pertahanan kepada Perdana Menteri mengenai hak pilih anggota Angkatan Perang. 6 Desember 1952, asli, 4 lembar. (No. 1906)
- 6) Berkas mengenai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Daftar Daerah Pemilihan Propinsi Sumatera Utara, Sunda Kecil dan Sumatera Selatan. Nb.: Sumatera Utara tidak disertai lampiran. 29 Juni - 14 Juli 1953, asli, 1 sampul. (No. 1909)
- 7) Surat-surat mengenai perubahan waktu pemilu dan reaksi dari sejumlah organisasi. 3 Juni- 9 September 1954, asli, 1 sampul. (No. 1914)
- 8) Berkas mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Cara Pencalonan Keanggotaan DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan Non - Aktif dan Pemberhentian Terhadap Anggota Angkatan Perang dan sebagainya. 26 Juli - 27 Agustus 1954, asli, 1 sampul. (No. 1915)
- 9) Berkas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pencalonan Keanggotaan DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang. 21 Juli - 20 Agustus 1954, asli, 1 sampul. (No. 1917)
- 10) Ketetapan Panitia Pemilihan Umum tanggal 31 Juli 1955 tentang Daftar-Calon-Tetap Pemilihan Anggota DPR tahun 1954 Untuk Tiap-Tiap Daerah Pemilihan. 26 Mei 1955, asli, 1 sampul. (No. 1923)

- 11) Pengumuman PPI No. 19 dan No. 20 tentang proses pemilihan. 27 September - 25 Oktober 1955, fotokopi, 1 sampul. (No. 1926)
- 12) Keputusan hasil sidang Dewan Nasional ke XI tentang Penyederhanaan Kepartaian dan Perubahan Undang-Undang Pemilu. 22 Oktober - 3 November 1958, asli, 1 sampul. (No. 1935)
- 13) Berkas mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Daftar Pemilih. 22 Juli 1952 - 10 Oktober 1953, tembusan, 1 sampul. (No. 3520)
- 14) Berkas mengenai Rancangan Undang-Undang tentang pemilihan anggota DPR dan Konstituante. 22 November 1952 - 13 Mei 1954, tembusan, 1 sampul. (No. 3527)
- 15) Berkas mengenai penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang pemilihan anggota-anggota DPRDS. 13 Januari - 26 Agustus 1954, tembusan, 1 sampul. (No. 3556)
- 16) Berkas mengenai Rancangan Undang-Undang Darurat tentang Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU No.7 tahun 1953). 31 Januari 1955 - 7 Februari 1956, tembusan, 1 sampul. (No. 3576)
- 17) Berkas mengenai Rancangan Undang-Undang tentang pemilihan anggota DPRD. 9 Februari - 28 November 1956, tembusan, 1 sampul. (No. 3592)
- 18) Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Dewan Menteri mengenai jawaban pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR. 23 Januari 1953, fotokopi, 1 sampul. (No. 3665)
- 19) Risalah rapat pleno terbuka mengenai pengumuman sekretariat dan pemandangan umum babak I tentang Rancangan Undang-Undang pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. 14 Januari 1953, fotokopi, 1 sampul. (No. 3745)

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 Jilid II

- 20) Berkas keterangan pemerintah tentang Program Kabinet Burhanuddin Harahap mengenai hubungan luar negeri dan pelaksanaan pemilu. 21 September - 3 Oktober 1955, pertinggal, 1 sampul. (No. 831)

- 21) *Working-paper* dari Kementerian Kehakiman mengenai pemilu pada sidang kabinet. 4 Oktober 1958, fotokopi, 1 sampul. (No. 1137)
- 22) Surat mengenai Rancang Peraturan Pemerintah tentang perubahan pasal 67 Peraturan Pemerintah No. 9/1954 dalam rangka melancarkan pekerjaan panitia pemilihan. 10 Desember 1955, pertinggal, 3 lembar. (No. 2213)

Kabinet Presiden RI 1950-1959

- 23) Surat-surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang daerah-daerah pemilihan dalam menjalankan Undang-Undang Pemilu dianggap sebagai desa, kecamatan dan Kabupaten, dengan lampiran. 29 Juni 1953 - 30 Oktober 1957, salinan, 1 sampul. (No. 863)
- 24) Mosi-mosi dari DPRDS Jawa Barat, Jawa Timur dan perorangan tentang tuntutan dilaksanakannya pemilu. 2 Juli 1951 - 17 Juni 1958, asli, salinan, 1 sampul. (No. 941)
- 25) Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepada Presiden tentang jawaban pemerintah atas pandangan umum babak II DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Pemilihan Anggota DPR dan Konstituante yang diucapkan di depan sidang parlemen, dengan lampiran. 23 Februari 1953, asli, 1 sampul. (No. 956)
- 26) Surat edaran Kabinet Presiden tentang Pemilihan Umum dan surat mengenai hak pilih TNI dalam pemilu. 3 Maret 1953 dan 22 September 1955, stensilan, konsep, 3 lembar. (No. 957)
- 27) Surat pernyataan NU Cabang Surabaya tentang desakan kepada KDH Jawa Timur supaya memberi keleluasaan kepada rakyat untuk membicarakan soal-soal politik dan pemilu, disertai pengantar. 27 Oktober 1954 tembusan, 2 lembar. (No. 985)
- 28) Surat-surat pernyataan DPRDS Jawa Barat dan Jawa Tengah tentang larangan bagi para pejabat dan pegawai negeri untuk menggunakan kekuasaannya dalam pemilu. 28 April 1954-13 Desember 1955. tembusan, 1 sampul. (No. 986)

- 29) Resolusi DPC Masyumi Cab Bojonegoro tentang isi dan makna pengumuman dari PPI yaitu WNI yang diluar negeri tidak turut serta menggunakan hak pilih dalam pemilu. 29 Mei 1955, asli, 1 lembar. (No. 987)
- 30) Resolusi Rapat Akbar Umat Islam Daerah Kec. Tg Tebat Palembang tentang desakan kepada ketua PPI supaya mengadakan peraturan-peraturan baru dan instruksi kepada petugas pemilu agar pendaftaran susulan/tambahan diperpanjang. 29 Oktober, asli, 3 lembar. (No. 997)
- 31) Peraturan Menteri Penerangan tentang sikap pegawai kementerian dalam waktu kampanye pemilihan dan menjelang pemungutan suara anggota konstituante. 1 November 1955, salinan, 1 lembar. (No. 999)
- 32) Surat Badan Konferensi Bangsa Indonesia Turunan Arab kepada Perdana Menteri tentang pelaksanaan pasal 58 UUDS RI mengenai ketentuan bagi warga keturunan asing dalam pemilu. 23 Maret 1956 tembusan, 1 lembar. (No. 1004)
- 33) Resolusi ormas tentang desakan agar meninjau kembali putusan mendagri No BPUI/7/6 mengenai penguduran pemilu di luar Pulau Jawa dan Madura karena keadaan darurat perang. 20 Mei 1957, asli, 1 lembar. (1030)

Pidato Presiden RI 1958-1967

- 34) Pidato Presiden pada pelantikan Panitia Negara mengenai peninjauan kembali Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum MPR, DPR dan DPRD, di Istana Bogor. 2 Juli 1962, stensilan, konsep, 1 lembar. (No. 402)

Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri 1967-1973 Jilid I

- 35) Surat-surat mengenai larangan mengikuti partai politik bagi pejabat negara dan karyawan perusahaan negara. 31 Oktober-20 Desember 1966, tembusan, 1 sampul. (No. 689)

Nahdlatul Ulama 1948-1979

- 36) Kliping Harian Kompas mengenai opini "NU - PPP - Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Pemilu" oleh Saifuddin Zuhri. 5 Maret 1980, fotokopi, 2 lembar. (No. 672)
- 37) Surat dari Lapunu Banyumas kepada Lapunu Pusat mengenai permohonan untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang No. 7/1953 tentang Pemilu. 25 November 1954, tembusan, 1 lembar. (No. 2303)
- 38) Draf *press release* PBNU pada pertemuan partai-partai politik dan Golkar bersama Presiden Suharto membahas persiapan Pemilu 1971. 1971, asli, 1 lembar. (No. 2325)
- 39) Surat-surat mengenai Rancangan Undang-Undang Pemilihan Daerah. 2 Desember 1953-11 Desember 1956, salinan, 1 sampul. (No. 2490)
- 40) Pemandangan Umum DPP PPP atas Undang-Undang Nomor 15/ 1969 dan Undang-Undang Nomor 4/1975 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan. 14 Juni 1961 - 7 November 1979, fotokopi, tembusan, 1 sampul. (No. 2553)
- 41) Surat-surat mengenai masukan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. 14 - 20 September 1962, asli, salinan, 1 sampul. (No. 2559)

Sekretariat Menko Perhubungan dengan Rakyat 1963-1966

- 42) Surat dari Menteri/Sesjend Front Nasional kepada Menteri Dalam Negeri mengenai Peraturan Presiden tentang organisasi dan tata kerja Badan Pembantu Presiden Urusan Pelaksanaan Pengawasan Partai-Partai. 20 Desember 1965, asli, tembusan, 7 lembar. (No. 500)

Setwapres Sri Sultan Hamengku Buwono IX 1973-1978

- 43) Surat dari Pimpinan DPR RI kepada Presiden tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, disertai lampiran. 10 November 1975, tembusan, 1 Sampul. (No.481)

Setwapres Umar Wirahadikusuma

- 44) Surat Keputusan Presiden No.27 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilu, disertai surat pengantar. 18 Juni 1986, salinan, 2 lembar. (No.646)
- 45) Surat Keputusan Mendagri/Ketua LPU No. 63 tahun 1986 tentang Penetapan Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD TK.I dan TK.2 tahun 1987, dengan lampiran. 11 Oktober 1986, salinan, 2 lembar. (No. 650)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1971-1999

- 46) Kumpulan peraturan pemilihan umum yang terdiri dari: Undang-Undang No. 16 tahun 1969, No. 15 tahun 1969, No 5 tahun 1975, Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1976, dan Keputusan Presiden No. 3-5. 1969-1976, fotokopi, 2 jilid. (No.1249)
- 47) Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1971. Agustus, Oktober, Desember 1970, Fotokopi, 1 jilid. (No.1250 - 1252)
- 48) Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan keamanan Pemilihan Umum 1971. 1971, fotokopi, 1 jilid. (No.1253)
- 49) Peraturan perundangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1971. Januari-Mei 1971, fotokopi, 1 jilid. (No.1254)
- 50) Daftar Inventarisasi Peraturan Perundangan-undangan Pemilihan Umum. 1987, fotokopi, 1 jilid. (No.1255)
- 51) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor: 106/LPU/tahun 1976 tentang Pengangkatan Staf Pelaksana pada Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia. 9 Agustus 1976, fotokopi, 1 lembar. (No. 1256)
- 52) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor: 112/LPU/tahun 1976 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Sekretariat Rapat Kerja Panitia Peneliti Daerah Seluruh Indonesia. 20 Agustus 1976, fotokopi, 1 lembar. (No.1257)
- 53) Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengenai Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD, dan

- DPRD II tahun 1987 jilid I. 27 Desember 1980-13 Juni 1981, stensilan, 1 jilid. (No. 1259)
- 54) Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengenai teknis penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPRD II tahun 1987 jilid II. Juli-November 1981, stensilan, 1 jilid. (No. 1259)
- 55) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor: 30/LPU/tahun 1982 tentang Pos Komando dalam rangka penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum tahun 1982 pada Lembaga Pemilihan Umum. 14 April 1982, asli, 1 jilid. (No.1260)
- 56) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor: 35/LPU/tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Panitia Kerja untuk pelaksanaan penyelesaian administrasi pengangkatan anggota DPRD I dan II dari Golkar ABRI dan Golkar bukan ABRI yang diangkat. 12 Mei 1982, asli, 1 lembar. (No. 1261)
- 57) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor: 64/LPU/tahun 1982 tentang Pembentukan Sekretariat Team Penyusun Pemilihan Umum 1982. 25 November 1982, stensilan, 1 lembar. (No.1262)
- 58) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU No. 39/LPU/tahun 1985 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Rapat Kerja Calon Bendaharawan dan Calon Atasan Langsung Bendaharawan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia. 12 November 1985, fotokopi, 1 lembar. (No. 1263)
- 59) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor: 14/LPU/tahun 1986 tentang perubahan atas lampiran Mendagri/Pelaksana Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Tk. I dan II, serta jumlah perkiraan pemilih/penduduk Warga Negara RI tiap daerah tingkat I dalam Pemilu tahun 1987. 8 April 1986, fotokopi, 1 lembar. (No.1264)
- 60) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor : 36/LPU/tahun 1986 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Sekretariat Panitia Peneliti Pusat untuk Membantu Meneliti Syarat Pengajuan Calon

- dalam Pemilu Anggota DPR. 12 Agustus 1986, fotokopi, 1 lembar. (No.1265)
- 61) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor: 37/LPU/tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Sekretariat Panitia Peneliti Pusat. 15 Mei 1987, fotokopi, 1 lembar. (No.1266)
 - 62) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor: 42/LPU/tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Sekretariat Panitia Pemeriksaan Keanggotaan MPR/DPR untuk Membantu Memeriksa Pemenuhan Ketentuan Anggota MPR/DPR. 1 Juli 1987, tembusan, 1 lembar. (No.1267)
 - 63) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor : 24/LPU/nomor 1988 tentang pembentukan Sekretariat Tim Pembuatan Museum Pemilihan Umum. 1 September 1988, fotokopi, 1 lembar. (No.1269)
 - 64) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor: 026/LPU/tahun 1989 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-undang Pemilu. 26 September 89, tembusan, 1 lembar. (No.1271)
 - 65) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor : 51/LPU/tahun 1991 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengolahan Data Secara Elektronik Hasil Pendaftaran Pemilih dan Jumlah Warga Negara RI yang Terdaftar dalam Pemilihan Umum tahun 1992. 5 Juli 1991, fotokopi, 1 lembar. (No. 1275)
 - 66) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor : 58/LPU/tahun 1991 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Peneliti Pusat untuk membantu meneliti pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat dalam Pemilu Anggota DPR. 27 Agustus 1991, fotokopi, 1 lembar. (No. 1276)
 - 67) Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan penyelenggara/pelaksana pemilihan umum. 1990, fotokopi, 1 jilid. (No. 1277)

- 68) Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengenai pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk Warga Negara RI. 1990, fotokopi, 1 jilid. (No. 1278)
- 69) Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengenai pendaftaran pemilih/jumlah penduduk Warga Negara RI dalam Pemilihan Umum anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 1990, fotokopi, 1 jilid. (No.1279)
- 70) Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengenai pencalonan dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD I dan DPRD II. 1991, fotokopi, 1 jilid. (No. 1280)
- 71) Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengenai penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan surat di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPR, DPRD I dan DPRD II. 1991, fotokopi, 1 jilid. (No. 1281)
- 72) Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengenai perhitungan suara di PPS, PPD II dan PPD I serta penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPRD I, II. 1991, fotokopi, 1 jilid. (No. 1282)
- 73) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor: 21/LPU/tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Peragaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara. 19 Maret 1992, fotokopi, 1 lembar. (No. 1284)
- 74) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor : 27/LPU/tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tugas Sekretariat Panitia Peneliti Naskah Kampanye Pemilihan Umum melalui RRI dan TVRI dalam Pemilu 1992. 20 April 1992, fotokopi, 1 lembar. (No. 1285)
- 75) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor: 30/LPU/tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Pemilihan Umum 1992. 27 April 1992, fotokopi, 1 lembar. (No. 1286)
- 76) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor: 79/LPU/1992 tentang pembentukan Sekretariat Tim Penyusunan Pemilihan Umum 1992. 16 Juli 1992, fotokopi, 1 lembar. (No. 1287)

- 77) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor : 86/LPU/tahun 1992 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penyelenggara Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia. 10 Agustus 1992, tembusan, 1 lembar. (No.1288)
- 78) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor: 88/LPU/ tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan dan Tugas Sekretariat Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan MPR dan DPR. 20 April 1992, fotokopi, 1 lembar. (No.1289)
- 79) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor :17/LPU/tahun 1993 tentang Pemberhentian Sekretariat dan Pembantu Sekretariat Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat serta Pejabat-pejabat pada Sekretariat PPI. 14 Mei 1993, tembusan, 1 lembar. (No.1290)
- 80) Petunjuk Pelaksanaan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Jutlak 03.IX/1986 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemrosesan Personil ABRI menjadi anggota DPR/MPR-RI, anggota tambahan MPR-RI, anggota DPRD Tk. I dan tingkat II Golongan Karya ABRI. 27 Desember 1986, fotokopi, 1 jilid. (No.1291)
- 81) Lampiran 1 (jilid 2) tentang Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum. 1999, fotokopi, 1 jilid. (No.1324. 2)
- 82) Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 1999, fotokopi, 1 jilid. (No. 1325)
- 83) Peraturan KPU No.76A tahun 1999 tentang Tata Cara Pengesahan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II. 10 Mei 1999, fotokopi, 1 lembar. (No. 1326. 2)
- 84) Peraturan KPU No. 110 tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 88 tahun 1999 tentang Penggabungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II tahun 1999 sebagaimana disempurnakan dengan Keputusan KPU No 106 tahun 1999. 16 Juni 1999, fotokopi, 1 lembar. (No. 1326. 3)

- 85) Peraturan KPU No 219/1999 tentang Jadwal Waktu Tahapan Kegiatan Penyelenggara Pemilihan Umum Lokal. 8 November 1999, fotokopi, 1 lembar. (No.1326. 4)
- 86) Himpunan Keputusan KPU Mengenai Penyelenggara Umum tahun 1999. 21 Juni 1999, fotokopi, 1 jilid. (No.1327.1)
- 87) Keputusan KPU No 40/1999 tentang Jumlah Kursi Anggota DPR yang Dipilih untuk Tiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 1999. 21 April 1999, fotokopi, 1 lembar. (No.1327. 2)
- 88) Perubahan Keputusan KPU No. 41 tahun 1999 tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Tk. I yang Dipilih dan Diangkat untuk tiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 1999 dan keputusan-keputusan perubahannya. 1999, tembusan, 1 sampul. (No.1327. 3)
- 89) Keputusan KPU No. 42 tahun 1999 tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Tk. II untuk tiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 1999 dan keputusan-keputusan perubahannya. 1 April-22 Juli 1999, fotokopi, 1 lembar. (No. 1327.4)
- 90) Keputusan KPU No. 50 tahun 1999 tentang Formulir yang Digunakan untuk Keperluan Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota DPR. 28 April 1999, fotokopi, 1 lembar. (No.1327.5)
- 91) Keputusan KPU No. 60 tahun 1999 tentang perubahan atas KPU No. 13 tahun 1999 tentang Tata Cara dan Jadwal Waktu Kampanye Pemilihan Umum. 3 Mei 1999, fotokopi, 1 lembar. (No.1327. 6)
- 92) Keputusan KPU No. 63 tahun 1999 tentang Jumlah TPS dan Perkiraan Jumlah Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu 1999. 4 Mei 1999, fotokopi, 1 lembar. (No.1327.7)
- 93) Keputusan KPU No. 70 tahun 1999 tentang Formulir yang Digunakan dalam Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II tahun 1999. 7 Mei 1999, fotokopi, 1 lembar. (No. 1327. 8)

- 94) Keputusan KPU No. 84 tahun 1999 tentang Pengaturan Anggota-anggota KPU dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum 1999. 18 Mei 1999, fotokopi, 1 lembar. (No. 1327. 9)
- 95) Keputusan KPU No. 88 tahun 1999 tentang Penggabungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II tahun 1999 dan keputusan perubahannya. 19 Mei-6 Juli 1999, fotokopi, 1 sampul. (No. 1327.10)
- 96) Keputusan KPU No. 91 tahun 1999 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Komunikasi Pemilihan Umum. 19 Mei 1999, fotokopi, 1 lembar. (No. 1327. 11)
- 97) Keputusan KPU No. 126 tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Evaluasi Pelanggaran/Kecurangan dalam Pemilihan Umum 1999. 1 Juni 1999, fotokopi, 1 lembar. (No.1327. 12)
- 98) Keputusan KPU No. 108 tahun 1999 tentang Tata Cara dan Penetapan Jumlah Anggota MPR Utusan Golongan. 16 Juni 1999, fotokopi, 1 lembar. (No.1327. 13)
- 99) Keputusan KPU No 114/1999 tentang petunjuk pelaksanaan calon terpilih anggota DPR, DPRD Tk. I, DPRD Tk. II pemilihan Umum tahun 1999, 22 Juni 1999, Fotokopi, 1 lembar. (No.1327. 14)
- 100) Keputusan KPU No 127/1999 tentang Awal Proses Penghitungan Suara secara Nasional Pemilihan Umum 1999 oleh PPI. 5 Juli 1999, fotokopi, 1 lembar. (No.1327. 15)
- 101) Keputusan KPU No 130/1999 tentang Perubahan Keputusan KPU No. 2 tahun 1999 tentang Tata Kerja KPU. 8 Juli 1999, fotokopi, 1 lembar. (No.1327. 16)
- 102) Keputusan KPU No 131/1999 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Tata Cara Pencalonan Anggota MPR Utusan Golongan. 9 Juli 1999, fotokopi, 1 lembar (No.1327. 17)
- 103) Keputusan KPU No 136/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II Pemilu 1999. 20 Juli 1999, fotokopi, 1 lembar. (No.1327.18)

- 104) Keputusan KPU No. 173/1999 tentang Penentuan Pembagian Kursi Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Utara dan Pidie serta Pembagian Kursi di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 20 Agustus 1999, fotokopi, 1 lembar. (No.1327. 19)
- 105) Keputusan KPU No 183/1999 tentang Penentuan Tata Cara Pembagian Kursi Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Utara dan Pidie di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 3 September 1999, fotokopi, 1 lembar. (No.1327. 20)
- 106) Keputusan KPU No 190/1999 tentang Penentuan Anggota MPR RI Utusan Golongan Periode 1999-2004. 22 September 1999, fotokopi, 1 lembar. (No.1327. 21)

3. Penyelenggara

a. Arsip Tekstual

Sekretariat Negara RI 1945-1949

- 107) Penetapan Pemerintah RI Jogjakarta No. 27 tentang pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Wakil Anggota Kantor Pemilihan Pusat. 9 Oktober 1948, konsep, salinan, 2 lembar. (No. 245)

Sekretariat Negara RI Yogyakarta 1949-1950

- 108) Surat Keputusan Pjs. Presiden Nomor 20/P/50 tentang pemberhentian dengan hormat Maria Ulfah Santoso sebagai anggota Kantor Pemilihan Pusat, dengan lampiran. 3 April 1950, asli, pertinggal, 5 lembar. (No. 109)

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959

- 109) Berkas mengenai cara mengangkat sumpah (menatakan keterangan) anggota-anggota badan-badan penyelenggara pemilihan umum. 16 - 20 November 1953, asli, 1 sampul. (No. 1911)
- 110) Surat Keputusan Walikota Jakarta Raya No. 23664/BPU dan 23665/BPU tentang penunjukan wedana-wedana untuk menjadi

- panitia penyelenggara Pemilihan Umum. 10 Desember 1953, salinan, 2 lembar. (No. 1912)
- 111) Berkas mengenai persiapan-persiapan pemilu. 30 Juli 1954 - 10 November 1955, asli, 1 sampul. (No. 1916)
- 112) Berkas mengenai Ikhtisar Pemilihan Umum No. 2 tahun 1954. 29 September 1954, asli, 1 sampul. (No. 1919)
- 113) Berkas mengenai Pemilihan Umum tahun 1955. 5 Mei - 12 Oktober 1955, asli, 1 sampul. (No. 1922)
- 114) Berkas mengenai permohonan penambahan anggota PPI. 30 Agustus 1955 - 2 Januari 1956, asli, 1 sampul. (No. 1924)
- 115) Berkas mengenai pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota PPI. 21 November 1955 - 3 Februari 1958, asli, 1 sampul. (No. 1929)
- 116) Berkas mengenai berlakunya Keputusan Perdana Menteri No.100/PM/1954 bagi sekretaris pada panitia pemilihan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum. 12 Desember 1958 - 14 Maret 1959, asli, 1 sampul. (No. 1932)
- 117) Berkas mengenai penyampaian "progress report" II dari Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum. 10 September 1958, asli, 1 sampul. (No. 1933)
- 118) Berkas mengenai rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan penambahan anggota PPI. 18 September 1958 - 31 Januari 1959, asli, 4 lembar. (No. 1934).
- 119) Surat dari Kepala Polisi Surakarta mengenai reaksi WNI turunan Arab terhadap pemberian kartu tanda warganegara dan pemilihan anggota parlemen. 26 Januari 1953, salinan, 1 lembar. (No. 2422)
- 120) Surat dari Ketua DPR kepada Menteri Kehakiman mengenai pertanyaan tentang penyempahan anggota-anggota PPI. 5 Desember 1953, tembusan, 1 sampul. (No. 3679)

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 Jilid II

- 121) Hasil pembicaraan antara Perdana Menteri dengan Ketua Kantor Pemilihan Pusat (KPP) mengenai tugas-tugas KPP. 6 November 1950, pertinggal, 3 lembar. (No. 1106)

- 122) Seri Surat Keputusan mengenai pengangkatan dan pembebastugasan anggota Panitia Pendaftaran Pemilih, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara. 1 Maret - 23 Oktober 1954, salinan, 1 sampul. (No. 1109)
- 123) Resolusi Kesatuan Aksi Penuntutan Pembubaran PPK Madiun No. 064/Sekr/54 tentang penuntutan pembubaran Panitia Pemilihan Kabupaten Madiun. 25 Juli 1954, tembusan, 2 lembar. (No. 1120)
- 124) Berkas mengenai pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1952 bagi pejabat-pejabat Badan Penyelenggara Pemilu yang bukan PNS. 23 Juli - 25 Agustus 1955, asli, 1 sampul. (No. 1128)
- 125) Berkas mengenai keamanan dalam rangka pemungutan suara untuk Konstituante. 17 November 1955 dan 30 Januari 1956, asli, pertinggal, 1 sampul. (No. 1130)
- 126) Daftar anggota Badan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tewas, diculik dan cacat dalam melakukan tugas. 1 Maret - 5 Mei 1956, asli, 1 sampul. (No. 1133)
- 127) Berkas mengenai rencana PPI dalam penyelenggaraan pemilihan anggota DPR ke II. 4 - 20 September 1958, asli, 1 sampul. (No. 1136)
- 128) Surat-surat mengenai pertanyaan dan jawaban tentang keanggotaan DPR, DPRD, dan kepanitiaan pemilihan anggota DPRD. 24 Desember 1953 - 7 Januari 1959, asli, tembusan, 1 sampul. (No. 2294)
- 129) Surat dari Perdana Menteri kepada Kepolisian Negara RI mengenai penjagaan dan pengawalan surat-surat penting dalam rangka pemilihan anggota Konstituante, nb. beserta lampiran. 10 November 1955, pertinggal, 1 sampul. (No. 2434)

Kabinet Presiden RI 1950-1959

- 130) Surat-surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Panitia Pendaftaran Pemilih di daerah. 8 Desember 1954 - 17 Oktober 1955, salinan, 1 sampul. (No. 879)

- 131) Resolusi-resolusi dari organisasi massa dan organisasi politik mengenai protes terhadap pembentukan PPI yang tidak demokratis. 15 November 1953-18 September 1955, 1 sampul, asli. (No. 963)
- 132) Surat-surat Kabinet Presiden RI tentang penambahan anggota panitia pemilihan. 21 September 1955 - 2 November 1957, tembusan, 1 sampul. (No. 990)
- 133) Surat-surat Kabinet Presiden tentang protes terhadap tindakan PPI pusat yang merugikan Partai Politik Tharikat Islam (PPTI). 16 Oktober, 2 Desember 1955, asli, tembusan, 3 lembar. (No. 994).
- 134) Resolusi-resolusi organisasi massa tentang wakil-wakil buruh dalam panitia pemilihan. 22 Oktober - 4 Desember 1955, asli, tembusan, 3 lembar. (No. 995)
- 135) Surat Keputusan Camat/KDH Kec Bunut Hilir No 28/PU-57 tentang keanggotaan panitia pendaftaran pemilih, dengan lampiran dan pengantar. 30 April 1957, asli, 3 lembar. (No. 1029)
- 136) Surat dari Ketua PPI kepada Menteri Kehakiman tentang penyempahan Abdoel'sis Djojoadhiningrat sebagai anggota panitia dengan lampiran. 2 Juli 1957, tembusan, 2 lembar. (No. 1036)
- 137) Surat-surat pernyataan tentang jaminan keamanan dalam menghadapi pemilu. 20 Juli 1954 - 11 September 1955, asli, 1 sampul. (No. 1914)

Sekretariat Negara: Seri Pidato Presiden Suharto 1966-1998

- 138) Naskah-naskah pidato pelantikan Anggota Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum, Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum dan Pemilihan Indonesia. 1976, 1981, 1985, 1991 dan 1995, asli, 5 sampul. (No. 470.1-470.5)

Nahdlatul Ulama 1948-1979

- 139) Surat-surat mengenai keanggotaan Panitia Pemilihan dari NU di tingkat kecamatan, Kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. 8 Oktober 1953 - 7 November 1955, asli, tembusan, 1 sampul. (No. 2296)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1971-1999

- 140) Jumlah badan penyelenggara/pelaksanaa pemilihan umum di daerah dalam pemilihan umum tahun 1997 untuk tiap Dati seluruh Indonesia, 2 Mei 1995, fotokopi, 1 jilid. (No.1232)
- 141) Jawaban *checklist* pengumpulan bahan riset hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum 1971 untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, 1971, fotokopi, 1 jilid. (No.1233)
- 142) Penjelasan Menteri Dalam Negeri tentang persiapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1982 pada rapat kerja Gubernur dan Bupati/Walikota KDH seluruh Indonesia. 10 - 14 Maret 1980, fotokopi, 1 jilid. (No.1235)
- 143) Himpunan radiogram Mendagri/Ketua LPU kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia tahun 1980-1981, 7 Februari 1981, fotokopi, 1 jilid. (No.1236)
- 144) Jawaban Menteri Dalam Negeri atas pernyataan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua DPD I seluruh Indonesia, 23-28 Februari 1981, fotokopi, 1 jilid (No.1237)
- 145) Himpunan radiogram Mendagri/Ketua LPU dalam bidang teknis penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1982. 1982, fotokopi, 1 jilid. (No.1238)
- 146) Himpunan radiogram Mendagri/Ketua LPU dalam bidang teknis penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1987, 1987, fotokopi, 1 jilid. (No.1240)
- 147) Penjelasan Menteri Dalam Negeri Ketua LPU tentang Pemilihan Umum tahun 1982 pada rapat dengan Komisi II DPR RI. 25 Mei 1981, fotokopi, 1 jilid. (No.1293)
- 148) LPU: Penjelasan Umum mengenai Penyusunan Pemilihan Umum tahun 1982, 1982, fotokopi, 1 jilid. (No.1294)
- 149) Dasar dan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1982. 1982, fotokopi, 1 jilid. (No.1296)

- 150) Penjelasan Bidang Keuangan pada Raker PPD I Se-Indonesia. 1982, fotokopi, 1 jilid. (No.1297)
- 151) Pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk tahun 1982 tentang materi presentasi, 1982, fotokopi, 1 jilid. (No.1298)
- 152) Tanggapan masyarakat tentang Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR dalam Pemilihan Umum tahun 1987 dari PDI sampai dengan 24 Januari 1987. 1987, fotokopi, 1 jilid. (No.1299)
- 153) Tanggapan masyarakat tentang DCS anggota DPR dalam Pemilihan Umum tahun 1987 dari PPP sampai dengan 24 Januari 1987. 1987, fotokopi, 1 jilid. (No. 1300)
- 154) Tanggapan masyarakat tentang DCS anggota DPR dalam Pemilihan Umum tahun 1987 dari Golkar sampai dengan 24 Januari 1987. 1987, fotokopi, 1 jilid. (No. 1301)
- 155) Penjelasan Umum mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1987 oleh Sekretaris Utama. 1987, fotokopi, 1 jilid. (No. 1302)
- 156) Jilid pelengkap X Pemilihan Umum tahun 1987 yang berhubungan dengan kehumasan. 1987, fotokopi, 1 jilid. (No. 1303)
- 157) Penjelasan tentang pelaksanaan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD Tk. I DKI Jakarta bagi pemilih jamaah haji dari Indonesia. 17 Juni 1992, fotokopi, 1 jilid. (No.1304)
- 158) Petunjuk pengadaan dan penggunaan buku, formulir, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara serta sarana pendukung dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1997. 1997, fotokopi, 1 jilid. (No. 1305)
- 159) Daftar pertanyaan dalam rangka menghadapi persiapan penyelenggaraan Pemilu 1992. 1992, fotokopi, 1 jilid. (No. 1306)
- 160) Tata cara pencalonan dan pemilihan anggota tambahan MPR Utusan Daerah, tt, fotokopi, 1 Jilid. (No. 1307)
- 161) Inventarisasi hasil penelitian terhadap tanggapan/keberatan masyarakat atas isi DCS Pemilihan Umum anggota DPR mengenai organisai PDI, tt, Fotokopi, 1 Jilid (No. 1308)

- 162) Tata cara pengajuan calon dan pengangkatan anggota DPRD II dari Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat (materi presentasi), tt, fotokopi, 1 jilid. (No. 1309)
- 163) Himpunan surat-surat KPU. 1999, fotokopi, 1 jilid. (No.1322)
- 164) Pemilihan Umum Tahun 1999 (jilid 1), fotokopi, 1 jilid. (No. 1324. 1)
- 165) Lampiran II Pemilihan Umum (jilid 3) tentang Organisasi Badan Penyelenggara Pelaksana Pemilu. 1999, fotokopi, 1 jilid. (No.1324. 3)
- 166) Lampiran VI Pemilihan Umum 1999 (jilid 7) tentang Administrasi Pemilihan Umum. 1999, fotokopi, 1 jilid (No.1324. 7)
- 167) Lampiran VIII Pemilihan Umum 1999 (jilid 9) tentang perlengkapan dan perhubungan Pemilu. 1999, fotokopi, 1 jilid. (No.1324. 9)
- 168) Lampiran IX Pemilihan Umum 1999 (jilid 10) tentang himpunan pidato Presiden dan Ketua KPU mengenai penyelenggaraan pemilihan umum. 1999, fotokopi, 1 jilid. (No.1324. 10)
- 169) Lampiran X Pemilihan Umum 1999 (jilid 11) tentang sosialisasi kegiatan Pemilihan Umum. 1999, fotokopi, 1 jilid. (No. 1324. 11)
- 170) Lampiran XI Pemilihan Umum 1999 jilid 12 tentang Pemilu bagi WNRI di luar negeri. 1999, fotokopi, 1 jilid. (No.1324. 12)
- 171) Lampiran XII Pemilihan Umum 1999 (jilid 13) tentang ringkasan riwayat hidup dan perjuangan anggota DPR/MPR hasil Pemilihan Umum. 1999, fotokopi, 1 jilid. (No.1324. 13)

b. Arsip Foto

Kempen Propinsi Jawa Tengah 1950-1965

- 172) Gubernur Jawa Tengah, Budiono memimpin rapat panitia pemilihan daerah di Kantor Gubernur Semarang, 1956 November, No. Negatif JTG 5603 / 1197 - 1198)

Kempen Sumatera Utara 1950-1955

- 173) Sastradikara dari Kementerian Dalam Negeri memberikan uraian pemilihan umum kepada rakyat. Medan, 4 Mei 1953 (No. 3531, No. Negatif 530504 AA 1)

- 174) Sutedjo memberikan uraian pemilihan umum kepada rakyat. Medan, 4 Mei 1953 (No. 3532, No. Negatif 530504 AA 2)

Kempen Nusa Tenggara Timur 1950-1963

- 175) Masyarakat yang hadir dalam kampanye penerangan pemilu di Sape. 10 September 1953 (No. 1870 - 1871, No. Neg.530910 NN 1- 2)
- 176) Masyarakat sedang mendengarkan kampanye penerangan pemilu di Sape. 10 September 1953 (No. 1872-1873, No.Neg. 530910 NN 3- 4)
- 177) Masyarakat berfoto bersama dengan para juru kampanye penerangan pemilu di Sape. 10 September 1953 (No.1874, No.Neg. 530910 NN 5)
- 178) Para juru kampanye penerangan pemilihan umum berfoto bersama di Sape. 10 September 1953 (No. 1875, No. Negatif 530910 NN 6)
- 179) Masyarakat bergerombolan di depan kampanye penerangan pemilu di Sape. 10 September 1953 (No. 1876, No.Neg. 530910 NN 7)
- 180) Rapat pemilu dengan masyarakat Walkabubak di Kepulauan Sunda Kecil. Januari 1953 (No. 1877 - 1878, No. Neg. 321 – 1 dan 321 - 2)
- 181) Pemandangan dalam sidang kongres anggota PPI Sdr. Rustam St. Palinding tengah memberi sambutan di Kupang. 11 Oktober 1954 (No. 1879, No. Neg. 541011 UU 1)
- 182) Pemandangan dalam sidang kongres di Kupang. 11 Oktober 1954 (No. 1880, No. Neg. 541011 UU 2)
- 183) Para anggota peserta kongres dimuka Kantor Kepala Daerah Timor di Kupang. 11 Oktober 1954 (No. 1881, No. Negatif 541011 UU 3)

Kempen DI Yogyakarta 1950-1965

- 184) Masyarakat Yogyakarta melakukan latihan cara pemungutan suara atau pemilihan umum di Bioskop "Indera" yang diselenggarakan oleh Kotapraja Yogyakarta. 19 Mei 1951 (No. 675, No. Negatif: 513884)
- 185) Walikota Yogyakarta, Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo sedang memberikan pengarahan para petugas pemilu saat melakukan latihan cara pemungutan suara di Bioskop "Indera" yang diselenggarakan oleh Kotapraja Yogyakarta. (No. 676, No. Negatif: 513885)

- 186) Walikota, Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo sedang memberikan penerangan tentang pelaksanaan pemilihan umum di depan masyarakat Yogyakarta di Gedung Soboharsono. (No. 778-779, No. Negatif: 4.1-4.2)
- 187) Wakil Kepala DIY, Sri Paku Alam VIII tiba di Balai Desa Pagerarjo, Samigaluh, Kulon Progo untuk memberikan penerangan/sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota parlemen. 11 Juli 1951 (No. 872, No. Negatif: e. 6)

c. Arsip Film

PPFN Seri Gelora Indonesia (FL 4)

- 188) Film GI : 225
 File : Aneka Warta
 Type : Released
 Produksi : 1955
 Isi : Pelantikan anggota P.P.I. baru
- 189) Film GI : 615
 No. Reproduksi : DVD RK 236
 File : Mari Memilih
 Type : Released
 Produksi : 1968
 Isi :
 Pelantikan Ketua Lembaga Pemilu, Amir Machmud dan anggota anggotanya yaitu Menteri Perhubungan, Drs. Frans Seda dan Menhankam, Jenderal M. Panggabean. Pelantikan dilakukan oleh Presiden Suharto di Istana Negara Jakarta, 17 Januari 1968.
- 190) Film GI : 616
 File : Mari Memilih
 Type : Released
 Produksi : 1970
 Isi :

Pelantikan para gubernur sebagai Ketua Pemilu di Aula Ekuin, Jl. Merdeka Selatan Jakarta, 3 Januari 1970. Pelantikan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud.

- 191) Film GI : 623
File : Layar Pelita
Type : Released
Produksi : 1970
Isi :
Penutupan Badan Santiaji Koordinasi Pemilu dilakukan oleh Komisaris Besar Sutojo di Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 13 April 1970. Penjelasan tentang pelaksanaan pemilu diberikan oleh Bigjen. Harsono dan diteruskan oleh Brigjen. Sutopo Rustamadji.
- 192) Film GI : 624
No Reproduksi : DVD RK 438
File : Mari Memilih
Type : Released
Produksi : 1970
Isi :
Pelantikan Gubernur Ali Sadikin sebagai Ketua Pemilu untuk daerah Jakarta Raya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud di Aula Departemen Dalam Negeri Jakarta, 2 Mei 1970. Pelantikan dihadiri oleh Menteri Penerangan, Budiardjo dan pejabat setempat.
- 193) Film GI : 629, 630, 636, 648-650
No Reproduksi : DVD RK 440, RK 57, RK 445
File : Mari Memilih
Type : Released
Produksi : 1970
Isi :
Film kartoon tentang Pemilu, mencakup tiga ketentuan pokok yang melanggar Pemilu.
- 194) Film GI : 631
No Reproduksi : DVD RK 440

- File : Mari Memilih
 Type : Released
 Produksi : 1970
 Isi :
- Petugas Patarlih dari LPU melaksanakan pendaftaran penduduk sekaligus sensus penduduk.
- 195) Film GI : 633
 File : Mari Memilih
 Type : Released
 Produksi : 1970
 Isi :
- Bagaimana struktur Lembaga Pemilu?
 Ketua : Menteri Dalam Negeri
 Wakil Ketua : Menteri Kehakiman
 Wakil Ketua I : Menteri Penerangan
 Ketua Dewan Pimpinan : Menteri Dalam Negeri
 Wakil ketua I : Menteri Kehakiman
 Wakil ketua II : Menteri Penerangan
 Anggota :
 Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menhankam,
 Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan
 - Dewan Anggota-anggota Pertimbangan terdiri dari Dewan Politik dan Golkar
 - Apakah perbedaan organisasi sekarang dengan pemilu tahun 1955 terletak pada Undang-Undang Pemilu No. 15/1969 dengan Undang-Undang Pemilu No. 7/1973. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Ketuanya Gubernur merangkap anggota.
- 196) Film GI : 638
 No Reproduksi : Betacam RK 131
 File : Mari Memilih
 Type : Released
 Produksi : 1970

Isi :

- Jakarta, 23 September 1970, pertemuan mendagri, Amir Machmud selaku Ketua Pemilu dengan Ketua Partai Politik, di Aula Departemen Dalam Negeri Jakarta. Pertemuan dilakukan sehubungan akan diadakan pengundian tanda gambar Pemilu. Turut memberikan penjelasan Sekretaris Umum Pemilu, Soenandar Prijosudarmo.

- Film cartoon tentang syarat-syarat pemilihan.

197) Film GI : 639

No Reproduksi : DVD RK 440

File : Mari Memilih

Type : Released

Produksi : 1970

Isi :

Pertemuan antara Ketua Lembaga Pemilu dengan Partai Politik dan Golkar, yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud di Aula Departemen dalam Negeri Jakarta.

198) Film GI : 640

File : Mari Memilih

Type : Released

Produksi : 1970

Isi :

Gambar yang menunjukkan penerangan tentang Pemilu, yang diangkat menjadi anggota MPR/DPR adalah dari perwakilan ABRI dan non ABRI.

199) Film GI : 641

No Reproduksi : Betacam RK 131

File : Mari Memilih

Type : Released

Produksi : 1970

Isi :

Rapat kerja Lembaga Pemilu se-Indonesia untuk daerah Tk. I dibuka Oleh Wakil Ketua, Prof. Oemar Senoadji SH. di Gedung Ekuin Jakarta, 26 Oktober 1970.

- 200) Film GI : 643
No Reproduksi : DVD RK 18
File : Mari Memilih
Type : Released
Produksi : 1970
Isi :
Tanya jawab masalah pemilu dan susunan panitia pemilu.
- 201) Film GI : 644
No Reproduksi : DVD RK 58
File : Mari Memilih
Type : Released
Produksi : 1970
Isi :
Film *cartoon* tentang pemilu yang menjelaskan tugas panitia tingkat I.
- 202) Film GI : 645
No. Reproduksi : Betacam RK 131
File : Aneka Peristiwa/Mari Memilih
Type : Released
Produksi : 1970
Isi :
- Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Soedomo membacakan amanat Panglima Angkatan Bersenjata pada rapat para Panglima Kowilhan se-Indonesia di Aula Hankam Jakarta, 8 Oktober 1970, untuk mensukseskan pemilu.
- Tanya jawab tentang pemilu.
- 203) Film GI : 646
No Reproduksi : DVD RK 445
File : Mari Memilih
Type : Released

- Produksi : 1970
 Isi : Tanya jawab tentang pemilu.
- 204) Film GI : 647
 No Reproduksi : Betacam RK 54
 File : Mari Memilih
 Type : Released
 Produksi : 1970
 Isi :
- Alat-alat telekomunikasi dan kertas sudah tersedia cukup
 - WNI yang berada di luar negeri ada perwakilan dan diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Menteri Luar Negeri.
- 205) Film GI : 651
 No Reproduksi : RK 531
 File : Mari Memilih
 Produksi : 1971
 Isi :
- Pembukaan kursus Kader Pimpinan Hansip Wanra seluruh Indonesia, dilakukan oleh Laksamana Muda Laut R. Soebonon di Markas Besar Pertahanan Sipil, Jl. Salemba Jakarta. Kursus tersebut untuk pengamanan pemilu.
- 206) Film GI : 652
 No Reproduksi : DVD RK 167
 File : Mari Memilih
 Produksi : 1971
 Isi :
- Rapat penyampaian daftar calon oleh wakil-wakil organisasi Partai Politik dan Golkar yang diserahkan oleh Dirjen Pemerintah Otonomi Umum dan Daerah Dalam Negeri, Soenandar Prijosudarmo selaku Sekretaris Pemilu yang diterima oleh Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud.
- 207) Film GI : 653
 No Reproduksi : DVD RK 445

- File : Mari Memilih
 Produksi : 1971
 Isi :
- Pembukaan Santiaji ke-2 Badan Koordinasi Penerangan Pemilu dilakukan oleh Menteri Penerangan Pemilu dilakukan oleh Menteri Penerangan, Budiardjo di Gedung Departemen Penerangan Jakarta, 15 Februari 1971.
- 208) Film GI : 654
 No Reproduksi : DVD RK 167
 File : Mari Memilih
 Produksi : 1971
 Isi :
- Pertemuan antara Ketua Pemilu, Amir Machmud dengan wakil-wakil dari anggota Partai Politik dan Golkar di Aula Departemen Dalam Negeri Jakarta, 5 Maret 1971. Pertemuan dihadiri oleh Ketua Peneliti Kopkamtib, Mayjen. Yoga Sugama, Ketua Peneliti Pusat dan Panitia Pemilu Indonesia, Wang Suwandi SH, dan Sekretaris, Soenandar Prijosudarmo.
- 209) Film GI : 655
 No Reproduksi : DVD RK 445
 File : Mari Memilih
 Produksi : 1971
 Isi :
- Peragaan pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 3 Juli 1971 di Kompleks PTIK Jakarta, 17 Februari 1971.
- 210) Film GI : 656
 No Reproduksi : DVD RK 446
 File : Mari Memilih
 Produksi : 1971
 Isi :
- Briefing* pemilu yang diadakan oleh Ibu-ibu Ria Pembangunan pimpinan Ibu Tien Suharto di Gedung Lembaga Pemilu Jakarta, 10

Maret 1971. *Briefing* dibuka oleh Ibu Oemar Senoadji selaku Ketua Lembaga Pemilu.

- 211) Film GI : 656
No Reproduksi: DVD RK 446
File : Mari Memilih
Produksi : 1971
Isi :
Penandatanganan daftar nama-nama calon anggota DPR dari Parpol dan Golkar dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud di Gedung Lembaga Pemilu. Hadir para Menteri kabinet dan ikut memberikan penjelasan Sekretaris Umum Pemilu, Soenandar Prijosudarmo.
- 212) Film GI : 659
No. Reproduksi : DVD RK 447
File : Mari Memilih
Produksi : 1971
Isi :
Penyerahan 10 mobil dari Presiden Suharto saat mengadakan pertemuan dengan para wakil Golongan Politik dan Golkar di Bina Graha Jakarta, 7 April 1971.
- 213) Film GI : 665
No. Reproduksi : DVD RK 45
File : Aneka Peristiwa
Produksi : 1971
Isi :
Briefing karyawati Departemen Penerangan dengan Menteri Penerangan, Budiardjo di Gedung Pola Jakarta 11 Mei 1971. *Briefing* membahas pelaksanaan pemilu dan diakhiri dengan peragaan pemilu oleh Badan Koordinasi Lembaga Pemilu Jakarta.
- 214) Film GI : 672
No Reproduksi : DVD RK 453
File : Aneka Peristiwa

- Produksi : 1971
 Isi :
- Sekretaris Pemilu, Soenandar Prijosudarmo memberikan penjelasan pada Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia di Gedung Ekuin Jl. Merdeka Selatan, Jakarta, 10 Juni 1971.
- 215) Film GI : 674
 No Reproduksi : DVD RK 179
 File : Aneka Peristiwa
 Produksi : 1971
 Isi :
- Direktur Penerangan Luar Negeri, Kapto Sunoto, memberikan penerangan pemilu kepada atase pers asing dan wartawan yang berada di Indonesia. Penerangan tersebut berlangsung di kantor Departemen Penerangan Jakarta, 29 Juni 1971.
- 216) Film GI : 677
 No. Reproduksi : DVD RK 18
 File : Aneka Peristiwa
 Produksi : 1971
 Isi :
- Pertemuan Direktur Penerangan Luar Negeri, Kapto Sunoto dan Direktur Penerangan Daerah, Subagyo dengan para pejabat Departemen Penerangan dan wartawan luar negeri untuk menjelaskan masalah pemilu di Gedung Pola Jakarta, 13 Juli 1971.
- 217) Film GI : 688
 No Reproduksi : Betacam RK 168
 File : Aneka Peristiwa
 Produksi : 1971
 Isi :
- Presiden Suharto memberikan *briefing* kepada para anggota DPR dari Golkar di Bina Graha dengan dihadiri Menteri Hankam, Jenderal Panggabean dan Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud.

- 218) Film GI : 719
File : Aneka Peristiwa
Produksi : 1971
Isi :
Pembubaran para petugas Pemilu tahun 1971 dilakukan Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud di Operatium Room Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1 Mei 1972. Upacara Pembubaran diawali sambutan dari Sekretaris Umum Lembaga Pemilu, Soenandar Prijosudarmo.

PPFN (Daftar Film Dokumenter, Pembuatan 1992)

- 219) Judul : Pelaksanaan Pemilu di Irian Barat
Nomor Reproduksi : DVD RK 239
Produksi : 1971
Isi :
Pidato Menteri Dalam Negeri mengenai Pemilu. Panitia Pemilu Daerah Irian Barat bertemu dengan Tokoh Masyarakat, Parpol, dan Golkar. Ketua Staf Pelaksanaan Pemilu Irian Barat, Brigjen Marwoto, Ketua Pemilu Daerah Tingkat I Irian Barat, Frans Kasiepo. Sumpah Anggota Panitia Pendaftaran Pemilu.
- 220) Judul : Pemilu di Irian Barat
Produksi : 1971
Nomor Reproduksi : DVD RK 133
Isi :
Petugas pendaftar pemilih memberikan penerangan kepada penduduk, setiap pemilih diberi tanda peserta pemilih berupa logam dikalungkan dan diikatkan dipinggang. Penetapan perwakilan sesuai dengan geografis Irian Barat. Peta daerah pemilu peragaan dan pemilu.
- 221) Judul : Pemilu Kesana Beramai
Produksi : 1971
Nomor Reproduksi : 526
Isi : Penerangan Pemilu 1971

- 222) Judul : Persiapan Pemilu
Produksi : 1955
Nomor Reproduksi : DVD RK 17
Isi :
- Rapat pemilihan anggota Konstituante dan DPR pada masa Kabinet Wilopo (Kabinet ke-13).
- Rombongan menteri meninjau percetakan kartu pemilih di Percetakan Negara.
- Rapat instruksi yang berhubungan dengan pemilu di Kementerian Dalam Negeri.
- Sidang Parlemen terbuka usulan anggota DPR. Keterangan dari Kehakiman, Pidato Menteri Dalam Negeri.
- Persiapan Penerangan kepada rakyat dan pengiriman 41 juta kartu pemilih ke seluruh Indonesia.

PPFN (Kelompok Film Cerita Animasi, FL.9)

- 223) Judul : Animasi Pemilu
Type : Released
Produksi : PPFN 1977
Isi :
Melaksanakan hak memilih dalam Pemilu 1977.
- 224) Judul : Pemilu
Type : Released
Produksi : PPFN 1977
Isi :
Penerangan tentang pemilu 1977 yang akan diadakan pendaftaran pemilu mulai 1 Mei disampaikan ketentuan yang berhak memilih.
- 225) Judul : Pemilu dan Pembangunan
Type : Released
Produksi : PPFN 1977
Isi :
Proses pemungutan suara pada Pemilu 1977.

- 226) Judul : Penerangan Pemilu Tahun 1982
 Type : Released
 Produksi : PPFN 1977
 Isi : Tujuan Pemilu 1982
- 227) Judul : Penerangan Pemilu Tahun 1982
 Type : Released
 Produksi : PPFN 1977
 Isi :
- Peserta pemilu yang akan pindah tempat harus melapor kepada Panitia Pendaftaran Pemilu baik tempat yang lama maupun tempat yang baru sebagai pemilih pada Pemilu 1982.

Video TVRI Tahun 1982 Format Umatic (Pembuatan 2011)

- 228) Nomor : 69
 File : Berita Nusantara
 Nomor Kaset : C.XV.C.37.20.231182VC.654
Time Code : 04:55 - 05:47
 Isi :
- Dewan Pembina Pusat Golkar Sujono Humardani memberikan sambutan pada peringatan HUT Golkar ke 18 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini juga dilakukan pembubaran Bapilu Kabupaten Sukoharjo dan penghargaan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo Suwohadi terhadap dua orang petugas yang telah mensukseskan pemilu lalu.
- 229) Nomor : 81
 File : Siaran Berita Nusantara
 Nomor Kaset : C.XV.C.49.VC.448.20.010582
Time Code : 05:10 - 05:45
 Isi :
- Pangkowilhan I Letjend TNI Soesilo Soedarman di Markas Komando Daerah Angkatan Laut I Belawan Medan, meresmikan gelar pasukan

satuan setingkat kompi (SSK) cadangan dan satuan tak langsung pengaman pemilu.

- 230) Nomor : 81
File : Siaran Berita
Nomor Kaset : C.XV.C.49.VC.448.20.010582
Time Code : 28:48 - 30:51
Isi :
Menhankam Pangab. Jenderal TNI M. Jusuf setibanya di tanah air dari lawatannya ke Arab Saudi, Mesir, dan Perancis langsung mengadakan inspeksinya ke berbagai daerah di Indonesia untuk meninjau pengamanan pemilu secara menyeluruh.

- 231) Nomor : 81
File : Siaran Berita
Nomor Kaset : C.XV.C.49.VC.448.20.010582
Time Code : 58:30 - 62:00
Isi :
Menteri Muda Urusan Pembangunan, Cosmas Batubara yang mengungkapkan 5 faktor keberhasilan pembangunan seperti adanya pemimpin yang memikirkan kepentingan rakyat, stabilitas politik dari pemilu tahun 1970/1971, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

VCD Komisi Pemilihan Umum

- 232) Nomor : Tahap I , Persiapan Pemilu
Sub Judul : Kampanye Monologis dan Jurnal Kampanye
Tahap : I (Pertama, 2 Februari – 1 Juni 1999)
Masa Putar : 00.46.00
Hitam Putih / Warna : Berwarna
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : Komisi Pemilihan Umum
Tahun Produksi : 1999
Sinopsis : **Tahap I Persipan Pemilu**

- Hari pertama pendaftaran partai politik untuk disahkan di Departemen Kehakiman (Menit: 00.00.05 s/d 00.02.50).
- Tercatat 98 parpol yang telah mengembalikan formulir untuk mengikuti verifikasi guna di teliti oleh tim 11 (Menit: 00.02.50 s/d 00.04.41).
- Tim 11 Panitia Persiapan pembentukan KPU besok lusa secara serentak melaksanakan pengecekan guna verifikasi gelombang II (Menit : 00.04.41 s/d 00.06.32).
- Sekitar 70 parpol diperkirakan akan lolos dari verifikasi tim 11 (Menit: 00.06.32 s/d 00.08.09).
- Anggota KPU yang dilantik terdiri dari Ketua Rudini, Wakil Ketua Adnan Buyung Nasution dan Harun Al Rasyid dan 50 orang anggota (Menit: 00.08.09 s/d 00.10.23).
- Pengambilan nomor urut tanda gambar (Menit: 00.10.23. s/d 00.23.27).
- Urutan parpol peserta pemilu 1999 No. 1 - 48 (Menit: 00.23.27 s/d 00.27.48).
- Pada rapat pleno KPU disepakati kotak suara yang akan digunakan. (Menit: 00.27.48 s/d 00.29.30).
- KPU telah menyetujui konsep pembuatan kertas suara dengan menggunakan materai khusus (Menit: 00.29.30 s/d 00.30.44).
- Proses cetak kertas suara pemilu (Menit: 00.30.44 s/d 00.32.17).
- Saran Presiden BJ Habibie (Menit: 00.32.17 s/d 00.34.32).
- Hingga hari terakhir pendaftaran pemilih dengan stelsel aktif yaitu warga mendatangi PPS belum menunjukkan hasil yang menggembirakan (Menit: 00.34.32 s/d 00.37.27).
- 13.500 ribu nama calon legislatif dari 48 partai politik diumumkan oleh KPU (Menit: 00.39.03 s/d 00.40.51).
- Sejumlah parpol mendukung langkah KPU untuk memperpanjang proses penyerahan daftar caleg hingga tanggal 9 Mei (Menit: 00.40.51 s/d 00.43.00).

- 15 nama yang akan dicalonkan sebagai presiden pada periode 1999/2004. (Menit: 00.40.51 s/d 00. 45.31).
- Dari 48 partai politik peserta pemilu tahun 1999, tiga diantaranya adalah partai lama yaitu: Golkar, PDIP, PPP (Menit: 00.45.31 s/d 00.46.00).

4. Anggaran

a. Arsip Tekstual

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959

- 233) Surat-surat mengenai pemberian uang duka untuk keluarga petugas pemilu. 23 April - 5 November 1956, tembusan, 1 sampul. (No. 234)
- 234) Berkas mengenai anggaran pendaftaran pemilihan pada Pemilihan Umum DPR Daerah, Konstituante dan DPR. 12 Februari 1952 - 6 Februari 1953, asli, 1 sampul. (No. 348)
- 235) Surat dari Panitia Pemilihan Umum mengenai permintaan penambahan anggaran belanja dan pembukaan kreditnya. 14 Oktober 1955, asli, 3 lembar. (No. 392)
- 236) Surat dari Sekretaris KPM kepada Ketua PPI di Jakarta usul pembangunan garasi untuk pick up milik Kantor Panitia Pemilihan NTB, beserta lampiran. 27 Juni 1955, asli, 7 lembar. (No. 736)
- 237) Surat dari Sekjen Menteri Dalam Negeri kepada para Gubernur Walikota Jakarta Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang persediaan uang untuk ongkos kantor dan badan-badan penyelenggara pemilihan. 23 April - 1 Desember 1953, asli, 1 sampul. (No. 1910)
- 238) Kumpulan berkas mengenai pembelian alat-alat, pembuatan kotak suara untuk pemilu. 12 - 28 Agustus 1954, asli, 1 sampul (No. 1913)

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 Jilid II

- 239) Surat Keputusan Kepala Daerah Maluku Tengah No. 8/PUT/PP tentang penunjukan bendaharawan yang bertanggung jawab atas pemakaian dana untuk penyelenggaraan pemilu. 3 Juli 1954, salinan, 3 lembar. (No. 1117)

- 240) Surat dari Mendagri kepada Ketua PPI mengenai pengeluaran untuk pemilu melalui BI. 30 Juli 1954, tembusan, 1 sampul. (No. 1121)
- 241) Surat dari Waperdam I kepada Mendagri mengenai pesanan pembuatan kapal kayu untuk keperluan pelaksanaan pemilu. 3 - 8 September 1954, asli, 4 lembar. (No. 1124)
- 242) Berkas mengenai uang sidang, permintaan membeli mobil anggota PPI. 14 April - 27 November 1956, asli, 1 sampul. (No. 1134)

Kabinet Perdana Menteri RI 1950-1968

- 243) Surat-surat tentang permohonan penerbitan surat keputusan otorisasi atas kekurangan biaya penjagaan keamanan pemungutan suara anggota DPR di berbagai daerah, dengan lampiran. November 1955, tembusan, 1 sampul. (No. 253)
- 244) Surat Keputusan Perdana Menteri tentang pemberian kredit kepada koordinasi keamanan daerah Jawa Timur untuk biaya urusan keamanan penyelenggaraan pemilu anggota DPR dan Konstituante, dengan lampiran. 11 Mei 1957, salinan, 1 sampul. (No. 323)
- 245) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah kepada bagian keuangan seksi perbendaharaan umum tentang pemberian kuasa pada Panitia Pemilihan Sulawesi Utara, Tengah untuk mengeluarkan uang sebagai biaya pengeluaran pemilu kedua anggota DPR RI. 23 Juli-14 Oktober 1959, salinan, 1 sampul. (No. 391)

Kabinet Presiden RI 1950-1959

- 246) Resolusi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kec. Dampit kepada PPI tentang desakan dikeluarkannya pengeluaran uang jerih payah para anggota PPS. 18 September 1954, asli, 2 lembar. (No. 347)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1971-1999

- 247) Pembiayaan Pemilihan Umum tahun 1970/1971 dan pengadaan barang keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1971. 1970-1971, fotokopi, 1 Jilid. (No. 1310)

- 248) Himpunan surat teguran mengenai pertanggung jawaban keuangan Pemilihan Umum 1997. fotokopi, 1 jilid. (No. 1311)
- 249) Pedoman Keuangan Pemilihan Umum. 1987, fotokopi, 1 jilid. (No. 1312)
- 250) Lampiran VII Pemilihan Umum 1999 (jilid 8) tentang Keuangan pemilihan Umum. 1999, fotokopi, 1 jilid. (No.1324. 8)

5. Peserta

a. Arsip Tekstual

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959

- 251) Peraturan dasar Partai Rakyat Nasional "Program Politik". 30 Oktober 1950, fotokopi, 1 sampul. (No. 1809)
- 252) Ikhtisar mingguan mengenai kepartaian yang berdasarkan Ketuhanan. 13 - 19 Juli 1952, salinan, 1 sampul. (No. 1836)
- 253) Resolusi-resolusi GPII tentang permasalahan haji, pemilu, dan petani. 3 Februari 1953 - 16 Januari 1954, asli, 1 sampul. (No. 1849)
- 254) Laporan mingguan mengenai aktivitas Partai NU, PKI, PSI, Masyumi, Parindra, PRN, Organisasi Pemuda Rakyat, Pemuda (Local), Mystik. 13 Juli 1953, asli, 1 sampul. (No. 1855)
- 255) Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai "Program Perjuangan Masyumi" dan seruan M. Natsir kepada anggota Masyumi mengenai kedudukannya sebagai partai oposisi. 11 September - 26 Desember 1953, asli, 6 lembar. (No. 1857)
- 256) Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai Program Partai Politik Islam Masyumi cabang Dompur. 11 November 1953 - 10 Juli 1954, asli, 4 lembar. (No. 1862)
- 257) Surat pernyataan dari Parindo mengenai kondisi politik dalam negeri. 23 Februari 1954, asli, 1 lembar. (No. 1869)
- 258) Berkas mengenai Keputusan Sidang Dewan Partai Rakjat Nasional (PRN). 10 September 1954, asli, 8 lembar. (No. 1883)

- 259) Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai usaha-usaha Partai PIR dalam persoalan kabinet. 22 Oktober - 18 November 1954, asli, 5 lembar. (No. 1884)
- 260) Berkas mengenai sikap politik PSII terhadap Kabinet Ali Sastroamidjojo I. 9 - 11 November 1954, asli, 1 sampul. (No. 1886)
- 261) Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai laporan tentang "persatuan partai-partai politik PKI-PRN-Permai dan SOBSI yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Wilopo, agar dapat memperpanjang waktu pemilihan umum". 11 Maret 1953, asli, 2 lembar. (No. 1907)
- 262) Daftar calon anggota Konstituante dan DPR dalam Pemilihan Umum di seluruh daerah pemilihan. 1955, pertinggal, 1 sampul. (No. 1920)
- 263) Daftar calon sementara pemilihan anggota DPR dan Konstituante daerah pemilihan Kalimantan Timur. 1955, asli, 1 sampul. (No. 1921)

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 Jilid II

- 264) Surat pengumuman Partai Republik mengenai program dan anggaran dasar partai. 16 Februari 1954, asli, 1 sampul. (No. 1060)
- 265) Pengumuman Partai Islam Indonesia dan laporan rapat PSII mengenai pemilu. 2 Juli 1954, asli, salinan, 8 lembar. (No. 1115)
- 266) Berkas mengenai penggunaan nama Sarbupri dalam daftar calon DPR dan Konstituante. 1 Juli, 6 September 1954, asli, 1 sampul. (No. 1116)
- 267) Surat-surat mengenai seruan dan pernyataan Sekretariat CC PKI dalam menghadapi saat berakhirnya pendaftaran pemilih. 22 Juli dan 28 Juli 1954, tembusan, 2 lembar. (No. 1119)
- 268) Surat-surat mengenai peraturan pencalonan anggota Konstituante oleh Masyumi. 19 Agustus 1954, asli, 7 lembar. (No. 1123)
- 269) Berkas mengenai pencalonan anggota DPR/Konstituante keturunan Tionghoa dan Eropa. 28 Januari - 25 Juni 1956, asli, 1 sampul. (No. 1132)

Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta 1949-1959

- 270) Laporan dari Jawatan Kepolisian Negara Bagian PAM Jogja mengenai Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). April-Agustus 1950, asli, turunan, 1 sampul. (No. 170).
- 271) Berkas mengenai Partai Rakyat Indonesia beserta cabang-cabangnya. Mei-Agustus 1950, asli, salinan, turunan, 1 sampul. (No. 171)
- 272) Surat dari Partai Persatuan Indonesia Raya mengenai "Aide Memoire" PIR beserta lampiran. Juni 1950, asli, 4 lembar. (No. 174)
- 273) Berkas mengenai azas, tujuan partai-partai di Indonesia. Juli 1950, asli, 1 sampul. (No. 176)

Kabinet Presiden RI 1950-1959

- 274) Surat-surat tentang Partai Murba dan sikap politiknya. 23 November 1950-26 September 1957, asli, 1 sampul. (No. 768)
- 275) Surat dari Partai Politik Rakyat Marhaen Indonesia kepada Kabinet Presiden tentang satu daftar susunan lengkap anggota Dewan Partai Permai, dengan lampiran. 23 Mei 1952, asli, 3 lembar. (No. 779)
- 276) Surat dari Partai Rakyat Indonesia tentang anggaran rumah tangga PRI. 20 Maret 1953, asli, 5 lembar. (No. 783)
- 277) Surat-surat tentang berdirinya Partai Indonesia Raya dan pengurusnya. 23 April-5 November 1954, asli, salinan, 1 sampul. (No. 790)
- 278) Surat-surat Kabinet Presiden RI tentang PKI, dengan lampiran. 25 April 1952 - 9 Desember 1955, asli, tembusan, 1 sampul. (No. 796)
- 279) Surat DPP Partai Buruh tentang kedudukan kantor sekretariat Dewan Partai Buruh di Jalan Cikini Raya 99, dengan lampiran. 28 Desember 1954, asli, 1 lembar. (No. 798)
- 280) Surat dari Partai Pancasila tentang pengiriman piagam fusi Gerakan Pembela Pancasila kedalam Partai Pancasila, dengan lampiran. 14 Juli 1957-2 Agustus 1958, asli, 3 lembar. (No. 819)
- 281) Surat-surat Kabinet Presiden tentang calon-calon anggota DPR dan Konstituante. 4 Agustus - 22 Oktober 1956, asli, 1 sampul. (No. 933)

- 282) Resolusi Dewan Pimpinan Tjabang Masyumi cabang Sukoharjo tentang protes atas tindakan Hadisaputra yang menerangkan bahwa kelambatan pemilu disebabkan karena perbuatan-perbuatan dari partai-partai oposisi. 20 Januari 1954, asli, 1 lembar, (No. 970)
- 283) Resolusi organisasi massa daerah Tuban dan Bondowoso tentang pernyataan turut aktif dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang. 28 Februari - 17 Oktober 1954, tembusan, 3 lembar (No. 975)

Konstituante 1956-1960

- 284) Guntingan koran mengenai partai-partai di Indonesia, 1957-1958, 1 sampul. (No.106)

Sekretariat Negara: Seri Pidato Presiden Suharto 1966-1998

- 285) Naskah-naskah sambutan pembukaan Musyawarah Nasional Golkar. 1973, 1978 dan 1983, asli, 3 sampul. (No. 466.1-466.3)
- 286) Naskah-naskah sambutan Ketua Dewan Pembina Golkar pada peringatan hari ulang tahun Golkar. 1984-1996, asli, 12 sampul. (No. 486.1-486.12)
- 287) Naskah-naskah sambutan Ketua Dewan Pimpinan Golkar pada pembukaan rapat Pimpinan Paripurna (Rapim) Golkar. 1990, 1991 dan 1992, asli, 3 lembar. (No. 504.1-504.3)

Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri 1967-1973

Jilid I

- 288) Surat dari Anggota DPR-GR No. 2016, golongan Karya Buruh Jakarta Raya kepada Presidium Kabinet Dwikora mengenai rehabilitasi bekas anggota-anggota Partai Murba dalam DPR-GR. 06 April 1966, asli, tembusan, 1 sampul. (No. 1298)

Departemen Angkatan Laut

- 289) Surat Keputusan Pengurus Besar Front Nasional No. 008/Kpts/PBFN/I/1965 tentang pemberhentian untuk sementara waktu

parpol Murba dan ormas-ormasnya dari keanggotaan Front Nasional.
7 Januari 1965, salinan, 1 lembar. (No. 71)

- 290) Keppres/Pangti ABRI No. 1/3/1966 tentang pembubaran PKI dan seluruh ormasnya. 12 Maret 1966, salinan, 1 lembar. (No. 135)

Nahdlatul Ulama 1948-1979

- 291) Surat dari PBNU kepada PP GP Anshar mengenai pernyataan PW GP Anshar Wilayah Kalimantan Timur tentang sikap dan pembekuan organisasi menjelang Pemilu DPRD. 9 Februari 1958, pertinggal, 2 lembar. (No. 1090)
- 292) Prasaran pada Konferensi Lapunu Seluruh Indonesia di Jakarta tentang perundang-undangan, pencalonan anggota parlemen, kampanye, keuangan, dan daftar hadir rapat-rapat Lapunu. '1953 dan 1959, fotokopi, 1 sampul. (No. 2294)
- 293) Surat-surat mengenai kursus kader pemilihan umum. 10 Desember 1953 - 23 Februari 1954, konsep, pertinggal, 1 sampul. (No. 2298)
- 294) Surat-surat mengenai pencalonan, pemilihan, dan pelantikan anggota DPR, Konstituante, dan MPR dari NU dan PPP. 29 April 1954 - 25 Juli 1977, asli, salinan, tembusan, 1 sampul. (No. 2300)
- 295) Surat-surat mengenai larangan pemungutan dan penggunaan zakat untuk pemilu. Nb. Sebagian arsip rapuh. 18 Mei, 23 Juni 1954, pertinggal, 2 lembar. (No. 2301)
- 296) Surat-surat mengenai pencalonan, pemilihan, dan pelantikan anggota DPRD dan DPRD-GR dari NU antara lain di Maros, Bekasi, Lampung Tengah, Palembang, Tangerang, Banjarmasin, dan Aceh Tengah. 14 Maret 1955 - 16 Mei 1977, asli, tembusan, 1 sampul. (No. 2305)
- 297) Surat dari PP Lapunu kepada PW Lapunu mengenai kelengkapan statistik empat partai besar. 26 Juli 1958, tembusan, 1 lembar. (No. 2313)
- 298) Surat-surat kepada PP Lapunu mengenai bahan riset sehubungan kemenangan PKI di beberapa tempat, beserta lampiran. 21 November 1958 - 18 Januari 1959, tembusan, asli, 6 lembar. (No. 2314)

- 299) Surat dari PP Lapunu kepada PC Lapunu Ponorogo mengenai harapan agar posisi NU bertambah kuat dalam pemilu. 17 Desember 1958, tembusan, 1 lembar. (No. 2315)
- 300) Telegram dari PWNU Sumatera Utara kepada PCNU di Sumatera Utara mengenai hak pemilihan bagi anggota ABRI. 8 Juli 1970, tembusan, 2 lembar (No. 2322)
- 301) Surat dari PP Pepermi kepada PC dan PW Pepermi se-Indonesia mengenai hak suara dalam pemilu dari ex anggota Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) yang dianggap sebagai organisasi terlarang. 6 Agustus 1970, tembusan, 1 lembar. (No. 2323)
- 302) Daftar Calon Sementara Pemilihan Anggota DPR 1971 untuk setiap daerah pemilihan dari Panitia Pemilihan Indonesia. 14 Maret 1971, salinan, 1 lembar. (No. 2327)
- 303) Surat dari PBNU kepada PWNU seluruh Indonesia mengenai pencoretan nama Ketua Umum PBNU dari daftar calon anggota DPR. 15 Maret 1971, pertinggal, 4 lembar. (No. 2328)
- 304) Surat dari DPP PPP mengenai pembentukan Lajnah Pemilu Umat Islam (LPUI) di daerah. 26 Maret 1976, tembusan, 1 sampul. (No. 2331)
- 305) Surat dari PCNU Madiun kepada PW Lapunu Jawa Timur mengenai pembebasan dari *screening* sebagai calon anggota DPR (nb tidak lengkap). tt, tembusan, 1 lembar (No. 2335)

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta

- 306) Surat tentang calon Anggota DPR. 30 April-8 Mei 1957, salinan, 2 lembar. (No. 320)
- 307) Surat mengenai pengangkatan H.M. Junus Anies menjadi anggota DPR-GR. 25 Agustus 1960, salinan, 1 sampul. (No. 322)
- 308) Surat mengenai kandidat calon untuk DPR Pusat, 5 September 1970, salinan, 1 sampul. (No. 332)

- 309) Surat larangan anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota PNS Golongan F untuk menjadi anggota Partai Politik, 1 Maret – 26 April 1967, salinan, 1 sampul. (No. 2870)
- 310) Surat mengenai pendukung Bulan Bintang, 12 November 1970, salinan, 3 lembar (No. 2910)
- 311) Daftar nama-nama anggota Muhammadiyah yang duduk dalam Anggota Konstituante, 1957, 1 sampul (No. 3421)

Dewan Pertimbangan Agung RI (DPA RI) 1977-1999

- 312) Catatan/Kesimpulan/keputusan Rapat Panitia Adhoc No. 01/RP/Adhoc/DPA/1996 tanggal 12 Juli 1996 tentang curah pendapat mengenai PDI. 1 jilid (No. 38-5)
- 313) Catatan Rapat Komisi Hankam DPA RI No.38/KH/DPA/1996, 3 Juli 1996 tentang penunjukan wakil Komisi HANKAM untuk menjadi anggota delegasi kunjungan ke luar negeri dan anggota panitia Ad Hoc masalah Partai Demokrasi Indonesia. 1 jilid (No. 38-51)

Sekretariat Menko Perhubungan dengan Rakyat 1963-1966

- 314) Laporan dari usaha LPKB taraf I mengenai *hearing* dengan partai-partai politik. 9 Maret 1964, asli, 7 lembar. (No.588)
- 315) Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia kepada Dr. Ruslan Abdulgani mengenai laporan aktivitas PII (eks Masyumi). 2 November 1963, asli (No. 1779).

Setwapres Adam Malik 1978-1982

- 316) Surat-surat Setwapres tentang Partai Golongan Karya. 6 April 1979- 2 April 1982, 1 sampul. (No.223)

Setwapres Umar Wirahadikusumah

- 317) Surat dari Salim Abdu tentang pengajuan Hj.Siti Asyiah Wahyu sebagai calon anggota DPR/MPR pada Pemilu 1987 dari Golkar. 25 Agustus 1984, asli, 3 lembar. (No.645)

SOBSI 1950-1965

- 318) DN SOBSI : Pidato tanpa tahun tentang hubungan serikat buruh SOBSI dengan partai PKI. tindasan, 1 sampul (No. 347)
- 319) DN SOBSI : Berkas tanpa tanggal tentang konsolidasi pengintegrasian PKI dengan kaum tani, stensilan, tembusan, 1 sampul, (No. 349)
- 320) DN SOBSI : Artikel tanpa tanggal tentang pembangunan partai I, stensilan, 1 sampul (No. 350)
- 321) DN SOBSI : Berkas tanggal 11 Februari 1953 – 14 September 1959 tentang kegiatan organisasi PKI, asli, tembusan, 1 sampul (No. 358)
- 322) DN SOBSI : Artikel bulan Maret 1953 tentang tuntutan Sekretaris Seksi Komite PKI mengenai hak dan kewajiban anggota PKI, tembusan, 2 lembar, (No. 359)
- 323) DN SOBSI : Resolusi tanggal 28 September 1959 tentang laporan umum Komite Central PKI, stensilan, 1 sampul, (No. 372)
- 324) DN SOBSI : Resolusi tanggal 6 Desember 1964 tentang penyingkiran partai terlarang, tindasan, 2 lembar, (No. 400)

Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia 1945-1971

- 325) Berkas mengenai pencatutan nama IPPI oleh Eddy Abdurrahman sebagai calon PKI untuk Pemilu, 14 Juni s/d 15 Oktober 1955, 1 sampul, (No. 157)
- 326) Instruksi PB IPPI mengenai pemilihan umum, 22 April 1954, Stensil, 3 lembar (No. 270)

Partai Kristen Nasional Indonesia

- 327) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kristen Nasional Indonesia. 1998, Salinan, 1 jilid. (No. 1)
- 328) Surat Keputusan DPP Partai Kristen Nasional Indonesia No. 507/SK-DPP/I/1998 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Kristen Nasional Indonesia. 11 Desember 1998, Salinan, 3 lembar. (No. 2)

- 329) Program Partai Kristen Nasional Indonesia. 14 Desember 1998, Salinan. 1 jilid. (No. 3)
- 330) Surat Pengumuman Menteri Kehakiman RI tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Kristen Nasional Indonesia, beserta lampiran. 9 Februari 1999, salinan, 5 lembar. (No. 4)
- 331) Berita Negara RI No. 17, Jumat 26 Februari 1999 mengenai pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang pendaftaran dan pengesahan badan hukum Partai Kristen Nasional Indonesia, 26 Februari 1999, salinan, 2 lembar. (No. 5)
- 332) Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kristen Nasional Indonesia kepada Ketua DPD dan DPC Partai Kristen Nasional Indonesia di seluruh Indonesia mengenai tema perayaan HUT Partai Kristen Nasional Indonesia untuk menyerukan menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 2 Mei 2002, asli, 1 lembar. (No.6)
- 333) Pidato Ketua Umum Partai Kristen Nasional Indonesia pada upacara ulang tahun Partai Kristen Nasional Indonesia. 20 Mei 2002, asli, 2 lembar. (No. 7)

Partai Syarikat Islam Indonesia 1905

- 334) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga PSII 1905. 26 Juli 1972, salinan, 1 jilid, (No. 1)

b. Arsip Foto

Sekretariat Negara RI 1966 – 1989

- 335) Ketua Umum DPP Golkar didampingi Menteri Dalam Negeri (Supardjo Rustam), Ketua KNPI (Ir. Akbar Tanjung), dan Kepala BAKN (AE Manihuruk) sedang melakukan pengarahan dalam pelaksanaan pemilu tahun 1987. (No. 2817-2818)
- 336) Presiden Suharto beserta rombongan sedang menghadiri pembukaan Kongres Partai Demokrasi Indonesia ke-3 di TMII, Jakarta Timur, 15 April 1986.(No. 2820-2824)

- 337) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, SH didampingi Ny. E.N. Sudharmono, AE Manihuruk, dan Sarwono Kusumaatmadja disambut dengan kesenian tarian Betawi saat akan membuka Munas Golkar di Jakarta, 11 Maret 1985. (No. 2825-2827)
- 338) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH menyerahkan tanda penghargaan/sertifikat kepada peserta Munas Golkar/Kader Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 11 Maret 1985. (No. 2828-2829)
- 339) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH sedang memberikan sambutan di depan peserta penataran fungsional Kader Golkar Wilayah DKI di Jakarta, 30 Oktober 1985. (No. 2833-2835)
- 340) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono didampingi isteri, Ny. E.N. Sudharmono, meninjau pelaksanaan Diklat Kader Fungsional Tk. II, di gedung DPD Tk.II Pemalang. Tampak hadir Bapak Akbar Tandjung. (No. 2836)
- 341) Maraden Panggabean sedang memberikan materi pada penataran juru kampanye Golkar Tingkat Pusat untuk pemilu tahun 1987. (No. 2837)
- 342) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH membuka Rakernas DPP Golkar Bidang Pemenangan Pemilu di Jakarta yang dihadiri oleh para Kader DPP Golkar. Tampak: Sarwono Kusumaatmadja. (No. 2834)
- 343) Kapolri, Awaluddin Djamin dan Menteri Fuad Hasan serta Ketua HIPMI, Sukamdani Sahid Gito Sardjono turut menghadiri acara kegiatan rapat Partai Golkar di Jakarta. (No. 2845-2847)

Departemen Penerangan RI 1966-1967

- 344) Peringatan Harlah NU ke-40 di Jakarta: Rapat Akbar NU di Stadion Utama Senayan 30-31 Januari 1966. (No. 204-221, No. Negatif: 66-535 s.d. 66-553)
- 345) Peringatan Harlah NU ke-40 di Jakarta: Pawai NU di Lapangan Banteng, Senen, dan Kramat Raya 30 Januari 1966. (No. 222-237, No. Negatif: 66-554 s.d. 66-570)

- 346) Peringatan Harlah NU ke-40 di Jakarta: Rapat Akbar NU di Stadion Utama Senayan, 30 Januari 1966. (No. 238- 248, No. Negatif: 66-730 s.d. 66-741)
- 347) Peringatan Harlah NU ke-40 di Jakarta: (1). Rapat Akbar NU di Stadion Utama Senayan; (2). Pembukaan Rumah Sakit Bersalin NU di Jl. Hangtuah; (3). Berziarah ke TMP Kalibata, 30 Januari 1966. (No. 249- 300, No. Negatif: 66-602 s.d. 66-693)
- 348) Peringatan Harlah NU ke-40 di Jakarta: Resepsi di Ballroom HI, 31 Januari 1966. (No. 301-330, 66-700 s.d. 66-729)
- 349) Beberapa poster aktivitas ABRI yang dilukis di papan pinggir jalan antara lain bertuliskan Sandang Pangan, Pemilihan Umum, Tani/Nelayan, karyawan, usahawan, ABRI, Intelegensia, Pemuda, dan Pembangunan. (No. 9658, No. Negatif: 67-12335)
- 350) Presiden Suharto di Presidium Medan Merdeka Barat no. 15 menerima pimpinan Parpol PNI dan PSII, 6 Juni 1967. (No. 7583-7590, No. Negatif: 67-5272 s.d. 67-5283)
- 351) Presiden Suharto di Presidium Merdeka Barat no. 15 menerima Parpol (Partai Politik), 8 Juni 1967. (No. 7686-7694, No. Negatif: 67-5371 s.d. 67-5381)
- 352) Pada Presiden Suharto di Presidium Merdeka Barat no. 15 menerima Pimpinan Parpol, 9 Juni 1967. (No. 7753-7766, No. Negatif: 67-5544 s.d. 67-5561)

c. Arsip Film

PPFN Seri Gelora Indonesia (FL. 4)

- 353) Film GI : 623
 No Reproduksi: Betacam RK 59
 File : Layar Pelita
 Type : Released
 Produksi : 1970
 Isi :

- a. *Briefing* Presiden Suharto dengan pemuka-pemuka dari 10 Partai di Istana Negara, 17 April 1970, sehubungan akan digabungkannya partai tersebut menjadi 3 yaitu PPP, PDI, dan Golkar.
- b. Jakarta 19 April 1970 Presiden Suharto menerima Ketua DPP PNI yang baru dari hasil kongres PNI ke-12 di Semarang antara lain Soenawar Soekowati, Subeno Sastro Wardoyo, dan Sekjen Abdul Madjid.

354) Film GI : 632

No Reproduksi: DVD RK 190

File : Layar Pelita

Type : Released

Produksi : 1970

Isi :

- a. Jakarta, 19 April 1970 Presiden Suharto *briefing* kepada anggota partai politik dan Golkar di Istana Negara sehubungan dengan akan digabungkannya partai menjadi tiga yaitu PDI, PPP, dan Golkar.
- b. Presiden Suharto mengadakan kunjungan ke DPP dan PNI yang dipimpin oleh Hardjosumpeno.

Video TVRI Tahun 1982 Format Umatic (Pembuatan 2011)

355) Nomor : 93

File : Berita Nasional

Nomor Kaset : C. XV.C.61.20.040682. VC.482

Time Code : 12:15 - 13:11

Isi :

Generasi Muda Golkar mengadakan silaturahmi di Jakarta.

B. PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

1. Abstrak



Gambar 2.

Seorang wanita tua berkebayu sedang dibimbing oleh petugas pemilu. Deli Serdang, 29 September 1955

Sumber: Kempen Sumatera Utara 1950-1955 (No. 3604)

Tahapan penyelenggaraan pemilu setelah persiapan adalah pelaksanaan yang meliputi kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan pemenang hingga penyelesaian sengketa. Tahapan pelaksanaan pemilu 1955-1999 tersebut terekam dalam setiap deskripsi arsip yang ditampilkan dalam bab ini. Terdapat 466 nomor arsip dari 11 daftar dan inventaris arsip tekstual, 372 nomor arsip dari 8 daftar dan inventaris arsip foto, 65 nomor arsip dari 4 daftar dan inventaris arsip film yang memiliki informasi mengenai tahapan pelaksanaan pemilu 1955-1999.

Pengelompokan informasi arsip pada pelaksanaan pemilu meliputi pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penetapan hasil pemilu, serta evaluasi. Pelaksanaan kampanye antara lain memuat informasi mengenai pemasangan tanda gambar, rapat akbar, rapat umum dan beberapa kegiatan peserta pemilu dalam usaha pemenangan pemilu. Informasi ini terdapat dalam 26 nomor arsip tekstual dan 57 nomor arsip foto, dan 26 nomor arsip film dengan periode arsip tahun 1954-1999. Pemungutan suara antara lain memuat informasi mengenai proses pencoblosan,

suasana di tempat pemilihan suara (TPS) dan kegiatan petugas TPS mulai dari persiapan hingga penghitungan suara. Informasi ini terdapat dalam 18 nomor arsip tekstual, 308 arsip foto, dan 10 nomor arsip film dengan periode arsip tahun 1955-1999.

Penetapan hasil pemilu antara lain memuat informasi mengenai hasil penghitungan dan rekapitulasi pemilu, pembagian kursi di DPR hingga pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPR. Informasi ini terdapat dalam 365 nomor arsip tekstual, 7 arsip foto dan 28 nomor arsip film dengan periode arsip tahun 1955-1999. Evaluasi memuat informasi mengenai sengketa, protes, saran, dan kajian terhadap penyelenggaraan pemilu. Informasi ini terdapat dalam 57 nomor arsip tekstual, dan 1 nomor arsip film dengan periode arsip tahun 1955-1997.

Informasi tersebut banyak terdapat di Inventaris Arsip Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 Jilid I dan II, Kabinet Presiden RI 1950-1959, Inventaris arsip Setwapres Adam Malik, Sri Sultan Hamengku Buwono, Umar Wirahadikusuma dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1971-1999 untuk arsip tekstual, Kempen Sumatera Utara 1950-1955, Kempen Sumatera Barat 1955-1965, Kempen Jawa Tengah 1950-1965, Kempen DI Yogyakarta 1950-1965, Sekretariat Negara RI 1966-1989 untuk arsip foto dan PPFN Seri Gelora Indonesia, TVRI, dan Komisi Pemilihan Umum 1999 untuk arsip film. Berikut ini adalah deskripsi arsip dalam beberapa khazanah arsip statis di ANRI yang memuat informasi arsip terkait dengan tahapan pelaksanaan Pemilu 1955-1999:

2. Kampanye

a. Arsip Tekstual

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959

- 356) Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai rapat akbar Masyumi di Sukabumi. 29 November 1954 - 18 Februari 1955, asli, 4 lembar. (No. 1890)
- 357) Berkas mengenai penentangan tanda gambar "PKI dan orang yang tidak berpartai". 21 September 1954 - 22 Januari 1955, asli, 1 sampul. (No. 1918)

- 358) Berkas mengenai mosi dari Amelz dkk tentang tanda gambar PKI dan orang tak berpartai. 24 - 31 Januari 1955, tembusan, 1 sampul. (No. 3682)

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 Jilid II

- 359) Surat-surat mengenai rapat umum PKI di berbagai daerah. 6 April - 12 Agustus 1954, asli, turunan, 1 sampul. (No. 505)
- 360) Kumpulan Resolusi dari Pemuda Rakyat, Kesatuan Aksi Penuntutan Pembubaran PPK Madiun, Serikat Buruh Kempen Bojonegoro mengenai protes terhadap adanya penurunan plakat dan spanduk di Madiun dan pelarangan demonstrasi dan rapat-rapat umum. 15 - 29 Agustus 1954, asli, 1 sampul. (No. 819)
- 361) Surat-surat mengenai tanda gambar PKI dan orang yang tidak berpartai. 12 April - 24 Desember 1954, asli, 1 sampul. (No. 1110)
- 362) Surat-surat mengenai pernyataan protes tentang pembatasan/larangan/penurunan spanduk dan plakat pemilu dari subsecom PKI Surabaya Tengah dan Sidoarjo. 29 Mei - 10 Juli 1954, asli, tembusan, 1 sampul. (No. 1111)
- 363) Surat-surat mengenai daftar nama dan tanda gambar dalam Pemilu Anggota Konstituante dan DPR. 31 Mei 1954, asli, pertinggal, 1 sampul. (No. 1112)
- 364) Surat dari Ketua Koordinasi Keamanan Daerah propinsi Sulawesi kepada Perdana Menteri mengenai pernyataan protes dari Dewan Pimpinan Cabang Masyumi Sulawesi Utara terkait pelarangan kampanye. 27 Juni 1956, asli, 6 lembar. (No. 1135)

Kabinet Presiden RI 1950-1959

- 365) Surat dari Onder Seksi Komite PKI kepada Kabinet Presiden RI tentang protes terhadap Kepolisian yang melarang pemasangan gambar pemimpin PKI, Muso dan Alimin. 26 Mei - 2 Juni 1953, asli, 3 lembar. (No. 784)

- 366) Resolusi-resolusi organisasi massa tentang desakan kepada pemerintah untuk meninjau kembali nama tanda gambar PKI dan orang tak berpartai. 13 Juni – 24 Desember 1954, asli, tembusan, 1 sampul. (No. 792)
- 367) Surat dari Pengurus Persatuan Islam Cab. Bima kepada KDH Swapraja Bima tentang pemberitahuan mengenai rapat umum, dengan lampiran. 7 Maret 1955, tembusan, 2 lembar. (No.801)
- 368) Surat pernyataan Dewan Pimpinan Ranting Sarbupri cinta raja dan serikat buruh pelabuhan pelayaran tentang penerangan Pemilu. 27 Februari 1954, 26 Agustus 1955, tindasan, 2 lembar. No. 974)
- 369) Surat pernyataan Partai NU Cab. Banyuwangi kepada PM: tentang desakan kepada PPI untuk bertindak terhadap adanya pemasangan tanda gambar yang dibumbui perkataan-perkataan lain dari ketetapan PPI. 8 Juni 1955, asli, 1 lembar (No. 988).
- 370) Surat pernyataan Persatuan Pejuang Islam Bekas Bersenjata Seluruh Indonsia daerah Jawa Barat tentang pelanggaran larangan untuk mengadakan rapat raksasa dalam menghadapi pemilu. 25 September 1955, asli, 1 lembar. (No. 991)
- 371) Surat pernyataan guru-guru Gereja Protestan Maluku dan pegawai yang berasal dari Ambon tentang salinan surat dari John Bakker dalam pemilu untuk memilih partainya, dengan lampiran. 27 Oktober 1955, asli, 7 lembar. (No. 996)

Nahdlatul Ulama 1948-1979

- 372) Surat-surat PBNU mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan partai NU di dalam pemilu. 26 Agustus 1970 dan 25 Maret 1971, pertinggal, 3 lembar. (No. 581)
- 373) Surat-surat mengenai pelaksanaan kampanye, usaha pemenangan dan persiapan pemilu dari Partai NU dan PPP. 9 Februari 1953 - 27 Oktober 1977, asli, salinan, tembusan, 1 sampul. (No. 2295)

- 374) Surat-surat mengenai penggunaan, pengiriman, dan usaha penurunan tanda gambar Partai NU dalam pemilihan umum. 14 Oktober 1953 - 30 Desember 1976, asli, tembusan, 1 sampul. (No. 2297)
- 375) Sambutan bersama para pemimpin partai Islam (PSII, PNU, Masyumi, dan Persatuan Tarbiyah Islam Indonesia) untuk menciptakan pemilu yang damai. 27 September 1955, salinan, 2 lembar. (No. 2308)
- 376) Surat dari PW Lapunu Kalimantan Timur kepada PP Lapunu mengenai pernyataan terima kasih karena telah memilih PNU. 6 Maret 1958, salinan, 1 sampul. (No. 2311)
- 377) Pernyataan PBNU tentang ajakan untuk berjalan di atas landasan demokrasi dan UUD 1945 demi suksesnya Pelita dan Pemilu, 3 April 1970, pertinggal, 1 lembar. (No. 2321)

Setwapres Adam Malik 1978-1982

- 378) Surat-surat Setwapres tentang pelaksanaan pemilu tahun 1982, dengan lampiran. Februari 1981-Juni 1982, 1 sampul. (No.210)

Setwapres Umar Wirahadikusumah 1973-1978

- 379) Surat Keputusan Usaha Pejuang RI Karisidenen Surakarta Jawa Tengah tentang dukungan kepada Golkar dalam Pemilu 1987 dan pencalonan kembali presiden. 2 Juli 1986, tembusan, 1 lembar. (No.647)
- 380) Surat dari Mendagri/Ketua Lembaga Pemilu Soepardjo kepada Presiden tentang kegiatan pencalonan anggota DPR dan Pemilu Tahun 1987. 7 Oktober 1986, tembusan, 1 lembar. (No.648)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1971-1999

- 381) Ketentuan-ketentuan mengenai Kampanye Pemilihan Umum 1982, fotokopi, 1 jilid. (No. 1295)

b. Arsip Foto

Kempen Sulawesi Utara 1951-1965

- 382) Tanda Gambar Partai masyumi yang dipasang di tepi jalan, Sulawesi Utara. Manado, 3 Desember 1955 (No. 2360 - 2361, No. Negatif K 551203 TT 1 - 2)
- 383) Tanda gambar Partai PKI yang dipasang di tepi jalan, Sulawesi Utara. Manado, 3 Desember 1955 (No. 2362, No. Negatif K 551203 TT 3)

Kempen Sumatera Selatan 1950-1967

- 384) Ditiap-tiap persimpangan jalan di Kota Bengkulu terlihat tanda-tanda gambar dari bermacam-macam partai berjajar memenuhi kota dalam suasana pemilihan umum pertama di Indonesia, Bengkulu Utara, 15 Desember 1955. (No. 3698, No. Positif: 2)
- 385) Inilah semboyan bersatu menuju ke kotak suara untuk memilih PKI dan PDI, Kab. Ogan/Komering Ilir, 15 Desember 1955. (No. 3701, No. Positif: 00521a)
- 386) Lambang-lambang partai pemilu pemungutan suara untuk anggota DPRD Kab. Ogan/Komering, Palembang, 1 Desember 1957. (No. 3702, No. Positif: 571201)

Sekretariat Negara RI 1966-1989

- 387) Mensesneg, Sudharmono sedang berjabatan tangan pada apel Kader Golkar Tk. II Gianyar dalam rangka mensukseskan Tri Sukses Golkar di Bali. 25 Februari 1986. (No. 2675-2679)
- 388) Menteri Sekretaris Negara, Sudharmono, SH selaku Ketua Umum DPP Golkar sedang memberikan sambutan dalam acara pemberian piagam di depan para anggota Golkar. Tampak: Menteri Sekretaris Kabinet, Drs. Moerdiono. 13 Januari 1985. (No. 2680-2682)
- 389) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, SH sedang melakukan kampanye di depan para pendukung Partai Golkar di daerah. 11 Februari 1985. (No. 2684)

- 390) Ketua Umum DPP Golkar, Soedarmono, SH sedang menyerahkan bantuan kepada salah seorang pejabat disaksikan oleh Abdul Gafur, AE. Manihuruk, Sarwono Kusumaatmaja, dan para Kader Golkar. 19 Agustus 1985. (No. 2867)
- 391) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, SH sedang berjabat tangan dengan Kader Golkar setempat selesai menandatangani prasasti peresmian listrik masuk desa untuk 4 Kabupaten Gowa, Maros, Bone, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan. 1985. (No. 2693)
- 392) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, SH didampingi Utoyo Usman sedang memukul gong saat membuka kegiatan Golkar di Jakarta, 1985. (No. 2694)
- 393) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, SH sedang melakukan tatap muka dengan para Kader Golkar di daerah, 1985. (No. 2695)
- 394) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hasan sedang memberikan sambutan pada acara pertemuan dengan Kader Golkar di rumah kediamannya di Jakarta, 1985. (No. 2701)
- 395) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, SH meresmikan masjid yang dibangun dari Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila dan menyerahkan bantuan yang diterima oleh Kader DPD Golkar daerah setempat, 1985. (No. 2703)
- 396) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, SH membuka kegiatan Kader DPD Golkar di daerah yang ditandai dengan pemukulan gong dengan disaksikan oleh pejabat setempat, 1985. (No. 2704)
- 397) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, SH didampingi Menteri Sekretaris Kabinet, Moerdiono melakukan temu wicara dengan para guru dan alim ulama di Pondok Pesantren Karya Pembangunan "Ribhatul Khail" di Timbau Tenggarong, Kalimantan Timur, 1985. (No. 2705)
- 398) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, SH sedang memberikan pengarahan di depan karakterdes Golkar di Gedung Karya Bhakti Jakarta, 27 Januari 1986. (No. 2706-2707)

- 399) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, SH sedang memberi pengarahan kepada warga untuk menusuk gambar No. 2 (Golkar) saat melakukan kampanye untuk pemenangan Golkar di daerah, 01 Februari 1986. (No. 2708)
- 400) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, SH melakukan tatap muka dengan Ketua DPD Golkar di Karawang, Subang, Jawa Barat dalam rangka pemenangan pemilu 1987, 15 Februari 1986. (No. 2709-2715)
- 401) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH sedang kampanye Partai Golkar di depan masyarakat di dalam GOR Senayan, Jakarta, 1 Oktober 1986. (No. 2716-2717)
- 402) Ketua DPP Golkar, Sudahrmono, SH sedang disambut oleh para Kader Golkar di daerah, 22 Oktober 1986. (No. 2719-2720)
- 403) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, SH sedang melakukan kunjungan kerja dalam rangka pemenangan pemilu 1987, 22 Oktober 1986. (No. 2722)
- 404) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, SH sedang berkampanye dengan Kader DPD Golkar di Sumatra Barat, 30 November 1986. (No. 2723-2725)
- 405) Masyarakat mengikuti pelaksanaan kampanye Golkar, tampak peralatan sound system yang digunakan untuk turut menyemarakkan kampanye tsb di Jakarta, 1986. (No. 2726)
- 406) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, SH meresmikan listrik masuk desa di Sumatera Utara dalam rangka kampanye pemilu 1987, 1986. (No. 2727-2728)
- 407) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, S.H melakukan kunjungan ke daerah Kalimantan untuk karakterdes dan bertatap muka dengan DPD Golkar setempat, 1986. (No. 2732-2733)
- 408) Ketua DPP Golkar, Sudharmono, mengisi buku tamu saat melakukan kampanye di Kalimantan Selatan, 12 Januari 1987. (No. 2734)
- 409) Ketua DPP Golkar, Sudharmono, S.H sedang melakukan doa bersama saat sholat di masjid daerah Sampang, Madura dalam rangka

- kampanye untuk menghadapi pemilihan umum, 16 Februari 1987. (No. 2735-2736)
- 410) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH melakukan kampanye pemilihan umum di dalam stadion di daerah, Maret 1987. (No. 2741)
- 411) Para anggota DPD Golkar melakukan kampanye pemilihan umum di lapangan, 03 April 1987. (No. 2745)
- 412) Para peserta kampanye dari Partai Golkar memenuhi lapangan, 03 April 1987. (No. 2746)
- 413) Para peserta kampanye dari Partai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) memenuhi lapangan, 03 April 1987. (No. 2747)
- 414) Seorang anggota DPD dari Partai Golkar sedang memberikan janji-janjinya kepada peserta kampanye di tengah lapangan, 05 April 1987. (No. 2748)
- 415) Para juru kampanye dari Partai Golkar sedang menyampaikan orasinya di depan para kadernya, 10 April 1987. (No. 2749)
- 416) Pelaksanaan kampanye dari Partai Golkar di Jakarta untuk menghadapi pemilu tahun 1987, 10 April 1987. (No. 2750)
- 417) Para peserta kampanye dari Partai Golkar memenuhi lapangan di daerah Sumatera Barat, 12 April 1987. (No. 2751)
- 418) Pelaksanaan kampanye dari Partai Golkar di Jakarta untuk menghadapi pemilu tahun 1987, 15 April 1987. (No. 2752)
- 419) Ketua Umum DPP Golkar Soedarmono, SH dengan disaksikan 150.000 massa Golkar sedang memperagakan cara menusuk gambar pohon beringin (Golkar) pada rapat akbar di Gelanggang Olahraga H. Agus Salim Padang, April 1987. (No. 2753-2755)
- 420) Ketua DPP Golkar, Sudharmono, SH menyerahkan bantuan mobil pemadam kebakaran kepada DPD Tk I Propinsi Jawa Tengah, 28 Agustus 1987. (No. 2757-2759)
- 421) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH sedang memberikan sambutan pada acara penyerahan tanda penghargaan kepada para Kader Golkar atas kemenangan pemilu tahun 1987, November 1987. (No. 2760-2763)

- 422) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH didampingi Ny. E.N. Sudharmono mengenakan pakaian adat Sulawesi Selatan saat melakukan tatap muka dengan Kader Golkar di Daerah Tk. II di Sulawesi Selatan, 1987. (No. 2764)
- 423) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH sedang melakukan kampanye di depan massa Golkar di daerah. (No. 2767)
- 424) Para PNS dan anggota Dharma Wanita menghadiri pengarahan dari para Kader DPD Golkar daerah setempat untuk pemenangan pemilu tahun 1987. (No. 2777, 2783-2784)
- 425) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH didampingi Panglima ABRI Jend. L.B. Moerdani dan Sarwono Kusumaatmadja sedang memberikan pengarahan kepada keluarga ABRI di Jakarta dalam rangka pemenangan pemilu tahun 1987 di Jakarta. (No. 2798-2799)

Kempen DI Yogyakarta 1950-1965

- 426) Rapat Umum PKI di Alun-alun Utara, Yogyakarta. Tokoh PKI DN Aidit sedang berpidato di hadapan massa di Alun-alun Utara, Yogyakarta, 11 September 1955 (No. 4860, No. Negatif: 1)
- 427) Seorang pengurus partai PKI sedang berpidato pada rapat umum PKI di hadapan massa di Alun-alun Utara, Yogyakarta, 11 September 1955 (No. 4862, No. Negatif: 3)
- 428) Seorang pengurus partai PKI sedang berpidato pada rapat umum PKI di hadapan massa di Alun-alun Utara, Yogyakarta. Tampak boneka besar dan lambang palu arit besar dan tulisan besar "HIDUP FRONT PERSATUAN NASIONAL" di panggung tempat para tokoh PKI berpidato, 11 September 1955 (No. 4863, No. Negatif: 4)
- 429) Panggung tempat para tokoh PKI berpidato tampak dari kejauhan yang sekelilingnya dipadati massa di Alun-alun Utara, Yogyakarta, 11 September 1955 (No.4864 - 4865, No. Negatif: 5 - 6)
- 430) Poster besar yang bertuliskan "BAGI KAUM AGAMA MEMILIH PKI BERARTI JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA". Poster ini

- bergambar para tokoh agama yang mendukung PKI dengan lambang palu arit, 11 September 1955 (No. 4866, No. Negatif: 7)
- 431) Rapat Umum Partai Majelis Syuro Indonesia (Masyumi) di Alun-alun Utara, Yogyakarta Seorang tokoh wanita sedang berpidato pada Rapat Umum Partai Majelis Syuro Indonesia (Masyumi) di Alun-alun Utara, Yogyakarta, 29 September 1955 (No. 4867, No. Negatif: 1)
- 432) Seorang tokoh pria sedang berpidato pada Rapat Umum Partai Masyumi di alun-alun Utara, Yogyakarta, 29 September 1955 (No. 4868-4871, No. Negatif: 2-5)
- 433) Panggung tempat para tokoh berpidato pada Rapat Umum Partai Masyumi yang dipadati massa di alun-alun Utara, Yogyakarta, 29 September 1955 (No. 4872, No. Negatif: 6)
- 434) Papan lambang PNI yang dibawahnya bertuliskan Ny Soeryohadi, PKI yang bertuliskan Ny. SD Susanto dan Gerakan Pembela Pancasila yang bertuliskan Ny. Syahrir. Pembela Nasib Kaum Wanita, 29 September 1955 (No. 5032, No. Negatif: 12)
- 435) Papan yang bergambarkan lambang PKI, bertuliskan daftar nama anggota-anggota PKI yang akan dipilih dan ajakan untuk memilih PKI, 29 September 1955 (No. 5033, No. Negatif: 13)
- 436) Papan yang bergambarkan lambang Partai Masyumi dan bertuliskan ramalan Ronggowarsito dan informasi lainnya dalam bahasa Jawa, 29 September 1955 (No. 5034, No. Negatif: 14)
- 437) Poster pemilu yang bertuliskan: "Dunia Meneropong Kita Melaksanakan Pemilihan Umum Pertama. Marilah Kita Memberikan Suara pada Pemilihan Umum dengan Bangga, Tertib dan Bersemangat Selaku Rakyat yang Cinta Damai", 29 September 1955 (No. 5035, No. Negatif: 11)
- 438) Poster pemilu yang bertuliskan: "Mata Dunia Meneropong Kita Melaksanakan Pemilihan Umum Pertama. Marilah Kita Memberikan Suara pada Pemilihan Umum dengan Bangga, Tertib dan Bersemangat Selaku Rakyat yang Cinta Damai", 29 September 1955 (No. 5036, No. Negatif: 12)

c. Arsip Film

VCD Komisi Pemilihan Umum

- 439) Nomor : 1A
- Sub Judul : Kampanye Monologis dan Jurnal Kampanye
- Tahap : II (Tanggal 19 Mei – 4 Juni 1999)
- Masa Putar : 00.45.50
- Hitam Putih / Warna : Berwarna
- Narasi : Bahasa Indonesia
- Produksi : Komisi Pemilihan Umum
- Tahun Produksi : 1999
- Sinopsis :
- Partai Buruh Nasional (Tanda gambar No. 37), Ketua DPP Dr. Mochtar Pak Pahan. Cita-cita Partai Buruh Nasional (Menit: 00.01.00 s/d 00.11.31)
 - Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) (Tanda gambar No. 10), KH. Mulyana. S. Muslim, SH. PSII menyimpulkan bahwa masa orde baru pemerintahan terpusat pada presiden, para penyelenggara negara melaksanakan system ekonomi kapitalisme yang mengakibatkan rakyat menderita (Menit: 00.11.31 s/d 00.20.19)
 - Partai Abul Yatama (Tanda gambar No. 12), oleh: Dr. H. Rusli Bintang. Partai ini berlandaskan pada Al'Quran dan hadist dan mengajak kepada semua Ummat untuk memilih partai ini dalam pemilu mendatang (Menit: 00.20.19 s/d 00.28.56)
 - Jurnal Kampanye: Ketua DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menyatakan protes kepada panitia pemilu dan pengawas pemilu sehubungan dengan massa yang merusak mobil hias partai Golkar yang sedang pawai di Jakarta (Menit: 00.28.56 s/d 00.30.47).
 - Menhankam Panglima TNI Wiranto mengatakan bahwa banyaknya pelanggaran kontestan pemilu pada hari pertama kampanye masih dalam batas kewajaran. Menteri Kehakiman Muladi mengatakan jangan sampai pemilu di jadikan sebagai pembenar kejahatan,

Mendagri Syarwan Hamid menyarankan partai peserta pemilu bersaing secara sehat (Menit: 00.30.47 s/d 00.33.01).

- Mulai 19 Mei - 3 Juni 1999, masyarakat bisa menyaksikan kampanye multi partai sebagai bagian dari tahapan pemilu (Menit: 00.33.01 s/d 00.34.33).
- Menteri Agama Malik Fajar menegaskan partai peserta pemilu jangan membawa agama pada saat kampanye yang dapat mengarah pada perpecahan agama (Menit: 00.34.33 s/d 00.37.34).
- Warga dan simpatisan partai khususnya pengendara sepeda motor dan penumpangnya dihimbau untuk mematuhi Undang-Undang lalu lintas (Menit: 00.37.34 s/d 00.38.33).
- Pelaksanaan kampanye hari pertama di wilayah Jabotabek (Menit: 00.38.33 s/d 00.39.58).
- Liputan tentang jalannya kampanye simpatik 1999, Ketua IPKI Soeprapto menegaskan caleg yang tidak jelas identitasnya harus dicoret (Menit: 00.39.58. s/d 00.42.12).
- Komunike bersama antara 3 tokoh partai yaitu Megawati, Amin Rais, Gus Dur tidak ada kaitannya dengan koalisi (Menit: 00.42.12 s/d 00.44.12).
- Ketua PNU Sukron Ma'mun mengatakan bahwa kapasitas dan kedudukan anggota KPU harus jelas apakah untuk mendahulukan kepentingan partai atau lebih mengutamakan kerja di KPU. (Menit: 00.44.12 s/d 00.45.50).

- 440) Nomor : 1 B
Sub Judul : Kampanye Monologis, Jurnal Kampanye
Tahap : II Kampanye Pemilu (19 Mei – 4 Juni 1999)
Masa Putar : 00.49.00
Hitam Putih / Warna : Berwarna
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : Komisi Pemilihan Umum
Tahun Produksi : 1999
Sinopsis :

- Partai Kebangsaan Merdeka (Tanda gambar No. 13), Ketua DPP K.H Zaini Ahmad Noeh. Program partai (Menit: 00.01.16 s/d 00.10.46).
- Partai Republik (Tanda gambar No. 28), Ketua DPP Syarifudin Harahap. Mengajak untuk memulihkan perekonomian nasional dan martabat bangsa. (Menit: 00.10.46 s/d 00.19.37)
- Partai Bulan Bintang (PBB) (Tanda gambar No. 22), Wakil Sekjen Drs Sahar L. Hasan. Program partai PBB (Menit: 00.19.50 s/d 00.29.27).
- Jurnal Kampanye: Kampanye di Propinsi Ambon, seperti Partai Daulat Rakyat. Kampanye PPP, Partai Golkar, Partai Krisna, PDIP (Menit: 00.29.35 s/d 00.33.40).
- Kampanye di Samarinda diikuti oleh PAN, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia melaksanakan bakti sosial berupa kitanan masal, PSII memperjuangkan persamaan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, PDIP kampanye dengan pawai kendaraan (Menit: 00.33.40 s/d 00.37.04).
- Kampanye di Medan oleh Partai Uni Demokrasi Indonesia, PNI Massa Marhaen dan PNBI memberikan sembako kepada rakyat, PBN membagikan brosur kepada masyarakat (Menit: 00.37.04 s/d 00.40.03).
- Kampanye di Jawa Tengah partai PIB yang melaksanakan aksi peduli sosial, Partai Cinta Damai, Partai Krisna dan PSP yang berkampanye di Semarang. (Menit: 00.40.03 s/d 00.49.00)

441) Nomor : 1 C
 Sub Judul : Kampanye Monologis dan Jurnal Kampanye
 Tahap : II Kampanye Pemilu (19 Mei – 4 Juni 1999)
 Masa Putar : 00.45.00
 Hitam Putih / Warna : Berwarna
 Narasi : Bahasa Indonesia
 Produksi : Komisi Pemilihan Umum
 Tahun Produksi : 1999

Sinopsis :

- Partai Aliansi Demokrasi Indonesia (PADI) (Tanda gambar No. 4), Ketua Umum H. Moh. Bambang Sulistomo, SIP. Program-program PADI (Menit 00.00.00 s/d 00.08.00)
- Partai Solidaritas Pekerja (PSP) (Tanda gambar No. 23), Ketua Dr. H. Dedi Hamid, SH. Program-program PSP (Menit 00.09.00 s/d 00.16.00)
- Partai Katholik Demokrat (PKD) (Tanda gambar No. 18), Jurkam: Marcus Mali. Program-program PKD (Menit 00.16.00. s/d 00.24.00)
- Jurnal Kampanye: Kampanye PPP di seluruh DKI, putaran ke-3 merupakan kampanye terakhir dengan cara konvoi. Kampanye Partai PADI, Jurkam Kyai H. Khoirul Ikhsan ingin meraih suara 2 % suara. Kampanye Partai MKGR, Ketua Umum Mien Sugandhi. Kampanye Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, dengan cara konvoi di Jakarta dan bergabung dengan PPP. Kampanye Partai Golkar, lebih menitikkan beratkan pada pendidikan dan lapangan kerja. Kampanye Partai Pekerja Indonesia Jurkam Soleh Sahid di Tangerang. Kampanye PPP di Bogor, oleh ketua Umum Hamzah Haz. Kampanye PDI (Budi Harjono) (Menit 00.25.00 s/d 00.39.00).
- Derap Kampanye: Di Kalimantan Tengah: (Partai Kebangkitan Ummat, Partai Golkar, PNU, PPP, PDIP), Di Palembang: (PIB, PPP, PNU, Partai Republik, Di Aceh: (Partai Golkar, PPP) (Menit: 00.39.00 – 00.45.00)

442) Nomor : 3 A
Sub Judul : Kampanye Monologis, Jurnal Kampanye
Tahap : Tahap II Kampanye (19 Mei - 4 Juni 1999)
Masa Putar : 00.45.46
Hitam Putih / Warna : Berwarna
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : Komisi Pemilihan Umum
Tahun Produksi : 1999

Sinopsis :

- Partai Nasional Demokrat (Tanda gambar No. 46), oleh: Eddy Syafuan. Tujuan dari mendirikan partai nasional (Menit: 00.00.33 s/d 00.10.28)
- Partai Amanat Nasional (PAN) (Tanda gambar No. 15), Ketua DPP Prof. Dr Amin Rais. PAN ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Menit: 00.10.28 s/d 00.20.22)
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Tanda gambar No. 9), Ketua DPP K.H Hamzah Haz. Misi PPP (Menit: 00.20.22 s/d 00.29.03)
- Jurnal Kampanye: Secara umum kampanye pemilihan umum di berbagai daerah berjalan tertib dan lancar (Menit: 00.29.11 s/d 00.30.04).
- Kapolri menegaskan situasi keamanan Aceh dapat dikendalikan (Menit: 00.30.04 s/d 00.31.57).
- 9 Partai peserta pemilu telah menyelesaikan masa kampanye di DKI Jakarta yang terdiri dari PKP, PKB, PNBI, Partai Bhineka Tunggal Ika, Partai Pekerja Indonesia, Partai Ummat Muslimin Indonesia (Menit : 00.31.57 s/d 00.36.57).
- Agenda reformasi internal ABRI/TNI adalah tidak akan terlibat lagi dalam kegiatan politik praktis dan akan mengurangi jumlah fraksi di DPR, DPRD TK I, DPRD TK II (Menit: 00.36.57 s/d 00.39.50).
- 3 Ketua Partai Politik, yaitu Megawati dari PDIP, Yusril Ihza Mahendra dari PBB, Budi Harjono dari PDI menggelar kampanye di luar pulau Jawa (Menit : 00.39.50 s/d 00.43.02).
- Ketua PBB Yusril Ihza Mahendra tentang kasus mantan Presiden Suharto dan keluarganya (Menit : 00.43.02 s/d 00.45.46).
- Ketua DPP PDI Budi Harjono menyatakan partainya belum menetapkan calon presiden (Menit: 00.43.02 s/d 00.45.46).

443) Nomor : 3 B
Sub Judul : Monologis dan Kampanye Seluruh Indonesia
Tahap : II Kampanye 1999 (19 Mei - 4 Juni 1999)
Masa Putar : 00.47.07

Hitam Putih / Warna : Berwarna

Narasi : Bahasa Indonesia

Produksi : Komisi Pemilihan Umum

Tahun Produksi : 1999

Sinopsis :

- Partai Syarikat Islam Indonesia 1905. (Tanda gambar No. 17), Sekjen: H. Muhammad Mufti, BA. Program dari PSII 1905, riwayat berdirinya PSII (Menit: 00.00.32 s/d 00.01.09).
- Partai Politik Islam Masyumi Indonesia. (Tanda gambar No. 21), Ketua umum: Abdullah Hehamahua. Riwayat berdirinya Partai Masyumi (Menit: 00.11.09 s/d 00.12.22), program-program (s/d 00.20.09).
- Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) (Tanda gambar No. 27), Ketua DPP: Ir. Adil Mediala. Riwayat berdirinya Partai IPKI. Panca program IPKI (Menit: 00.20.06 s/d 00.22.25).
- Jurnal Kampanye: Pimpinan PPP, PAN, PK bertekad ingin mewujudkan pemilu secara lancar dan tidak akan memilih BJ Habibie sebagai Presiden Indonesia (Menit: 00.28.20 s/d 00.31.45)
- Ketua umum PPP Hamzah Haz berkunjung di Serang, Bogor, Jabar melakukan kampanye monologis (Menit: 00.31.45 s/d 00.33.23),
- Suasana Kampanye monologis dari partai politik di Jakarta Selatan (Menit: 00.34.31 s/d 00.36.12).
- Laporan jalannya kampanye partai politik di berbagai daerah (Menit: 00.36.12 s/d 00.38.39).
- Laporan jalannya kampanye Partai Keadilan di Ambon dan Padang (Menit: 00.38.39 s/d 00.40.38).
- Kegiatan kampanye perdana putaran kedua PDIP di Palembang dan di Kredawati Maluku (Menit: 00.40.38 s/d 00.42.17).
- Kampanye Partai Golkar di Pasaman Barat Sumbawa di Kabupaten Langkat, Ambon, Banda Aceh (Menit: 00.42.17 s/d 00.47.07).

444) Nomor : 4 A

Sub Masalah : Monologis dan Kampanye Seluruh Indonesia

Tahap : II Kampanye 1999 (19 Mei – 4 juni 1999)
Masa Putar : 00.40.42
Warna : Berwarna
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : Komisi Pemilihan Umum
Tahun Produksi : 1999
Sinopsis :

- Partai Persatuan (PP) (Tanda gambar No. 34), Ketua Umum Partai Persatuan Dr. H. Jailani Naro, SH. Riwayat pendirian PP. Program-program PP (Menit: 00.01.45 s/d 00.05.28).
- Partai Nahdlatul Ummat (PNU) (Tanda gambar No. 25), Ketua Umum: KH. Syukron Ma'mun. Tujuan dan program PNU. (Menit: 00.08.08 s/d 00.08.53)
- Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) (Tanda gambar No. 14), Sekjen: Gregorius Seto Harianto. Riwayat dan program PDKB (Menit : 00.21.11 s/d 00.28.52).
- Kampanye Seluruh Indonesia di Yogyakarta. Kampanye Partai Cinta Damai, untuk menampung aspirasi anggota dan simpatisan (Menit: 00.28.52 s/d 00.31.27).
- Kampanye PK menggelar kampanye dengan menjual sembako murah di Sleman (Menit: 00.31.27 s/d 00.32.10).
- Pilar menggelar aksi donor darah yang dipusatkan di Kota Gede (Menit: 00.32.10 s/d 00.34.21).
- Kampanye dialogis PPP di Semarang (Menit: 00.34.21 s/d 00.38.03).
- Kampanye dialogis PKP di Bandar Lampung disampaikan oleh Hayono Isman (Menit: 00.38.03 s/d 00.40.42).

445) Nomor : 4 B
Sub Masalah : Monologis dan Kampanye Seluruh Indonesia
Tahap : II Kampanye 1999 (19 Mei - 4 Juni 1999)
Masa Putar : 00.36.48
Warna : Berwarna

Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : Komisi Pemilihan Umum
Tahun Produksi : 1999
Sinopsis :

- Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia (PBI) (Tanda gambar No. 44), oleh: Drs. Maruto. Asas PBI, kegiatan PBI di bidang politik, ekonomi dan lain-lain. (Menit: 00.01.23 s/d 00.02.10)
- Partai Cinta Damai (PCD) (Tanda gambar No. 40), oleh: H. Akhmad Syukron Bestari. Sejarah PCD (Menit: 00.00.01 s/d 00.09.42).
- Partai Demokrasi Indonesia (PDI) (Tanda gambar No. 32), oleh: Buttu R Hutapea. Perjuangan PDI dalam bidang ekonomi, hukum dan pendidikan (Menit: 00.21.30 s/d 00.25.01)
- Jurnal Kampanye: Derap dan dinamika kampanye dari berbagai Tanah Air (Menit: 00.28.39 s/d 00.28.43).
- Jakarta dipenuhi oleh lautan Merah, Megawati yakin akan memperoleh suara terbanyak (Menit: 00.28.43 s/d 00.29.22).
- Kampanye terakhir PDIP dipusatkan di bekas lapangan bandara Kemayoran Jakarta Pusat (Menit: 00.29.22 s/d 00.33.05).
- Kampanye terakhir PDIP di Lido Bogor (Menit: 00.33.05 s/d 00.36.48).

446) Nomor : 5 A
Sub Masalah : Monologis dan Kampanye Seluruh Indonesia
Tahap : II Kampanye 1999 (19 Mei - 4 Juni 1999)
Masa Putar : 00.52.21
Warna : Berwarna
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : Komisi Pemilihan Umum
Tahun Produksi : 1999
Sinopsis :

- Partai Daulat Rakyat (PDR) (Tanda gambar No. 39), oleh: Ali Thoyib. Riwayat berdirinya PDR (Menit: 00.01.09 s/d 00.02.36). Program PDR (Menit: 00.02.36 s/d 00.10.27)
- Partai MKGR (Tanda gambar No. 38), Ny. Hj. Mien Sugandhi. Riwayat dan Program dari Partai MKGR (Menit: 00.10.59 s/d 00.19.09)
- Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI) (Tanda gambar No. 45), oleh: Drs. H. Nursyirwan Noer Datuk. Riwayat dan program dari Partai SUNI (Menit: 00.20.09 s/d 00.29.07)
- Jurnal Kampanye Pemilu: Jurkam PDIP menceritakan bentrokan antara Partai Golkar dan PDIP (Menit: 00.30.14 s/d 00.33.10). PAN, MURBA, PDIP, PK, PNU berantusias melakukan kampanye monologis di jalan protokol Jakarta Pusat pada hari keempat belas (Menit: 00.33.10 s/d 00.38.29).
- Kampanye monologis di Jakarta Selatan antara lain PID, PNI Front Marhaenis (Menit: 00.38.29 s/d 00.41.22).
- PBB melakukan kampanye monologis di Bogor Jawa Barat (Menit: 00.41.22 s/d 00.42.17).
- Ketua umum PPP Hamzah Haz melakukan kampanye di Kendal Jawa Tengah (Menit: 00.42.17 s/d 00.43.53).
- Ketua umum PDIP Megawati melakukan kampanye monologis di Ambon (Menit: 00.43.53 s/d 00.45.57).
- Ketua umum Partai Golkar Akbar Tanjung melakukan kampanye di lapangan Sentani Irian Jaya (Menit: 00.45.57 s/d 00.47.15).
- Ketua umum PDR Latief Burhan melakukan kampanye monologis di Kediri (Menit 00.47.15 s/d 00.48.41).
- PNU KH Abdul Suafon Makmum melakukan kampanye monologis di Sumbawa (Menit 00.48.41 s/d 00.50.25).
- PDI melakukan kampanye monologis di Tenggarong Kutai (Menit: 00.50.25 s/d 00.52.21).

- 447) Nomor : 5 B
 Sub Judul : Monologis dan Kampanye Seluruh Indonesia
 Tahap : II Kampanye 1999 (19 Mei - 4 Juni 1999)
 Masa Putar : 00.43.00
 Hitam Putih / Warna : Berwarna
 Narasi : Bahasa Indonesia
 Produksi : Komisi Pemilihan Umum
 Tahun Produksi : 1999
 Sinopsis :
- Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) (Tanda gambar No. 36), Ketua Umum Dr. Sri Bintang Pamungkas. Program-program PUDI (Menit: 00.00.01 s/d 00.10.00).
 - Partai Kebangkitan Ummat (PKU) (Tanda gambar No. 7). Ketua Umum HM Yusuf Hasyim. Program-Program PKU (Menit: 00.10.00 s/d 00.20.00)
 - Partai Ummat Muslimin Indonesia (PUMI) (Tanda gambar No 47), oleh H. Anwar Yusuf. Program-Program PUMI (Menit: 00.20.00 s/d 00.29.00)
 - Kampanye Dialogis: Pawai PDIP di Jakarta, jurkam Kwik Kian Gie (Menit: 00.29.00 s/d 00.34.00).
 - Kampanye PAN dan PBB, kesan Kapolda: Kampanye tertib khawatir adanya pihak ketiga (Menit: 00.35.00 s/d 00.39.00).
 - Kampanye PPP di Bangil, Pasuruan (Menit: 00.39.00 s/d 00.40.00)
 - Jurnal kampanye: Kejadian Partai Golkar di Surakarta ricuh, kampanye damai bersama, perusakan pada rumah penduduk orang berpakaian hitam-hitam. (Menit: 00.41.00 s/d 00.43.00)
- 448) Nomor : 6
 Sub Masalah : Monologis dan Kampanye Seluruh Indonesia
 Tahap : II Kampanye Pemilu (19 Mei – 4 Juni 1999)
 Masa Putar : 00.43.22
 Warna : Berwarna
 Narasi : Bahasa Indonesia

Produksi : Komisi Pemilihan Umum

Tahun Produksi : 1999

Sinopsis :

- Partai Golkar (Tanda gambar No. 33), oleh: Aisyah Hamid Baidlowi, program Partai Golkar (Menit: 00.00.32 s/d 00.10.02)
- Partai SPSI (Tanda gambar No. 42), oleh: Dr. H. Rasyidi, Program Partai SPSI (Menit: 00.11.10 s/d 00.17.55)
- PNI (Tanda gambar No.3), oleh: Sukmawati Sukarnoputri, Program PNI (Menit: 00.18.05 s/d 00.27.09)
- Jurnal Kampanye Pemilu: Kampanye Golkar di DKI Jakarta, Bekasi dan Kampanye PDR di DKI Jakarta. (Menit: 00.27.17 s/d 00.31.52).
- Wakil Ketua KPU Adnan Buyung Nasution melakukan kampanye monologis dengan topik Masalah Dana Kampanye (Menit: 00.31.52 s/d 00.33.24).
- Program kampanye dari PDI di Sumatera Barat (Menit: 00.33.24 s/d 00.35.19).
- Ketua PDIP Megawati Sukarnoputri melakukan kampanye di Bandung dan Cirebon (Menit 00.35.56 s/d 00.37.47).
- Ingin memwujudkan keadilan di segala bidang merupakan program dari 4 partai dari PPP, PK, PBB, PKP di Bandung, Bogor dan Tangerang (Menit: 00.39.09 s/d 00.43.22)

449) Nomor : 7

Sub Masalah : Monologis dan Kampanye Seluruh Indonesia

Tahap : II Kampanye Pemilu (19 Mei – 4 Juni 1999)

Masa Putar : 00.44.18

Warna : Berwarna

Narasi : Bahasa Indonesia

Produksi : Komisi Pemilihan Umum

Tahun Produksi : 1999

Sinopsis :

- Partai Demokrasi Indonesia (PDI) (Tanda gambar No. 11), oleh: Prof. Dr. M. Dimiyati Hartono, SH. Program PDI (Menit: 00.00.31 s/d 00.08.30)
 - Partai Rakyat Indonesia (PARI) (Tanda gambar No. 20.), oleh: KH. Agus Miftach. Riwayat dan program PARI (Menit: 00.09.30 s/d 00.17.40)
 - Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (KAMI) (Tanda gambar No. 5), oleh: Drs. H. Syamsahril, SH.MM Riwayat dan tujuan Partai KAMI (Menit: 00.18.09 s/d 00.28.09)
 - Jurnal Kampanye Pemilu: PIB, Partai MKGR dan PPP kampanye monologis di Jakarta Selatan, Cibinong Bogor Jawa Barat dan Jakarta Timur (Menit: 00.28.25 s/d 00.34.08)
 - Kapolri mengatakan bahwa pada putaran pertama dinilai baik, aman dan terkendali (Menit: 00.34.08 s/d 00.35.41)
 - Ketua umum Partai MKGR Mien Sugandhi melepas kampanye Partai MKGR di Jakarta (Menit: 00.35.41 s/d 00.36.44)
 - PADI melakukan kampanye monologis di Cilandak Jakarta Selatan (Menit: 00.36.44 s/d 00.37.55)
 - Ketua umum Golkar Akbar Tanjung mengadakan kampanye monologis di Kecamatan Bunto Kalimantan Selatan (Menit: 00.37.55 s/d 00.40.39)
 - Sidang Kasus Purbalingga antara Golkar dan PDIP di pengadilan negeri Jakarta Selatan (Menit: 00.40.39 s/d 00.42.20)
 - Kegiatan kampanye dari berbagai partai politik di Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Tengah. (Menit: 00.42.20 s/d 00.44.18)
- 450) Nomor : 8 A
- Sub Masalah : Monologis dan Kampanye Seluruh Indonesia
- Tahap : II Kampanye Pemilu (19 Mei - 4 Juni 1999)
- Masa putar : 00.46.50
- Warna : Berwarna
- Narasi : Bahasa Indonesia
- Produksi : Komisi Pemilihan Umum

Tahun Produksi : 1999

Sinopsis :

- Partai Keadilan (PK) (Tanda gambar No. 24), oleh: Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, MSC. Riwayat dan program PK (Menit: 00.01.16 s/d 00.11.03)
- Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) (Tanda gambar No. 41), oleh: Edi Sudrajat, Riwayat dan program PKP (Menit: 00.11.22 s/d 00.20.22).
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Tanda gambar No. 35), oleh: Hj. Khofifah Indar Parawansa. Program PKB (Menit: 00.22.30 s/d 00.31.17)
- Jurnal Kampanye: Kampanye PKB di Jakarta, situasi kampanye di Jakarta aman dan terkendali (Menit:00.32.00 s/d 00.35.05).
- Kampanye PNU di Tangerang (Menit: 00.35.05 s/d 00.35.40).
- Masalah Satgas Golkar di Banten, Madura, Serang (Menit: 00.35.40 s/d 00.37.30).
- Ketua DPP Golkar pada kampanye di Kabupaten Bangka dengan tema Pro Status Quo (Menit : 00.37.30 s/d 00.40.10).
- Mien Sugandhi dalam kampanye MKGR di Banten dengan tema status pembangunan Banten menjadi propinsi (Menit: 00.40.10 s/d 00.41.38).
- Akbar Tanjung kampanye partai Golkar di Bali (Menit: 00.41.38 s/d 00.43.25).
- Ungkapan rasa kegembiraan dari rakyat Blora pada saat kampanye PDIP di Blora Jawa Tengah (Menit: 00.43.25 s/d 00.45.54).
- Kegiatan kampanye dari berbagai partai aman terkendali di Tapak Siring Bali (Menit: 00.45.54 s/d 00.46.50)

451) Nomor : 8 B
Sub Masalah : Monologis dan Kampanye Seluruh Indonesia
Tahap : II Kampanye Pemilu (19 Mei - 4 Juni 1999)
Masa putar : 00.19.50
Warna : Berwarna

- Narasi : Bahasa Indonesia
 Produksi : Komisi Pemilihan Umum
 Tahun Produksi : 1999
 Sinopsis :
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Tanda gambar No. 9), oleh: Zarkasie M Noor. Gambaran kondisi Indonesia dan harapannya (Menit: 00.00.01 s/d 00.19.50)
- 452) Nomor : 9 A
 Sub Judul : Kampanye Monologis
 Tahap : II Kampanye Pemilu (19 Mei - 4 Juni 1999)
 Masa putar : 00.28.00
 Hitam Putih / Warna : Berwarna
 Narasi : Bahasa Indonesia
 Produksi : Komisi Pemilihan Umum
 Tahun Produksi : 1999
 Sinopsis :
- Partai Kristen Nasional Indonesia (KRISNA) (Tanda gambar No. 2), Jurkam DR. Guara Mariam Sitompul. Program-program (Menit: 00.00.01 s/d 00.10.00)
 - Partai Masyumi Baru (Tanda gambar No. 21), Jurkam Syarfi Mulyani SH No.8. Program-program Partai Masyumi Baru. (Menit: 00.10.00 s/d 00.18.00)
 - Partai Ummat Islam (PUI) (Tanda gambar No. 6), Jurkam KH. M. Royanudin AS. Program-program PUI (Menit: 00.19.00 s/d 00.28.00)
- 453) Nomor : 9 B
 Sub Judul : Jurnal Pemilu Hari ke 2
 Masa Putar : 00.20.00
 Hitam Putih / Warna : Warna
 Narasi : Bahasa Indonesia
 Produksi : Komisi Pemilihan Umum
 Tahun Produksi : 1999

Sinopsis :

- Jurnal Pemilu Hari ke 2: Kampanye pawai dijalankan antara lain PBB, PNU, PAN. Pangdam Jaya mensinyalir ada kelompok-kelompok tertentu akan memanfaatkan suasana kampanye agar terjadi kekacauan. PDI Budi Hardjono terkait masalah dana, dan memberikan kriteria calon presiden salah satunya pendidikan minimal S1 (Menit: 00.05.00 s/d 00.08.00).
- Kampanye IPKI, PNU, Golkar (Menit : 00.08.00 s/d 00.14.00).
- Di Sulawesi Selatan PKP, SPSI, PNBI (Menit: 00.14.00 s/d 00.20.00)

454) Nomor : 10

Sub Judul : Kampanye Monologis dan Jurnal Kampanye

Tahap : II Kampanye Pemilu (19 Mei - 4 Juni 1999)

Masa Putar : 01.15.52

Hitam Putih / Warna : Berwarna

Narasi : Bahasa Indonesia

Produksi : Komisi Pemilihan Umum

Tahun Produksi : 1999

Sinopsis :

- Partai Rakyat Demokratik (PRD) (Tanda gambar No. 16), oleh: Eddy Sunarti. Program-program (Menit : 00.01.00 s/d 00.08.58).
- Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI) (Tanda gambar No. 43), oleh: Sri Mulyaningsih. Program PNBI (Menit: 00.08.58 s/d 00.19.40).
- PNI Massa Marhaen (Tanda gambar No. 30), oleh: Drs. Andi Achmad. S. Jaya. Visi dan Misi (Menit: 00.19.40 s/d 00.26.36)
- Jurnal Kampanye: Pelaksanaan kampanye di Jakarta dimeriahkan oleh 10 partai politik (Menit: 00.26.46 s/d 00.35.50).
- Pelanggaran lalu lintas yang terjadi hingga hari ke 9 kampanye (Menit: 00.35.50 s/d 00.37.47).

- Pelaksanaan kampanye PDIP gagal dilaksanakan karena diserbu oleh pemuda yang juga melakukan pembakaran di lokasi kampanye (Menit: 00.37.47 s/d 00.39.28).
- Kampanye PPP di Pontianak (Menit: 00.39.28 s/d 00.40.56).
- Kampanye dialogis Ketua DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan (Menit: 00.40.56 s/d 00.43.44).
- Kampanye di Aceh oleh Parpol PPP Abul Yatama, PBB, PDR (Menit: 00.43.44 s/d 00.48.48).
- Kampanye di Banjarmasin, oleh PBB, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Partai Daulat Rakyat (Menit: 00.48.48 s/d 00.51.18).
- Kampanye di Yogyakarta: PP di Sleman, PNI Massa Marhaen, PKM, PKD, PKP dan PKU (Menit: 00.51.18 s/d 00.56.53).
- Kampanye di Batam dan Pekanbaru: Golkar, Partai IPKI, Partai MKGR, PCD (Menit: 00.56.53 s/d 01.00.02).
- Kampanye di Jawa Barat diramaikan oleh PUDI di Indramayu, Partai Golkar di Bandung, PNU di Garut, PDIP di Subang (Menit: 01.06.39 s/d 01.09.50).
- Kampanye di Palembang: PKD, PBN, PDR, PKB, Partai Nasional Demokrat, Partai Golkar (Menit: 01.09.50 s/d 01.12.31).
- Kampanye di Denpasar Bali: PNI Massa Marhaen, PDIP, PUDI, Partai Suni (Menit: 01.12.31 s/d 01.15.52)

455) Nomor : 11
 Sub Masalah : Monologis dan Kampanye Seluruh Indonesia
 Tahap : II Kampanye Pemilu (19 Mei - 4 Juni 1999)
 Masa Putar : 00.46.18
 Warna : Berwarna
 Narasi : Bahasa Indonesia
 Produksi : Komisi Pemilihan Umum
 Tahun Produksi : 1999
 Sinopsis :

- Partai Pilihan Rakyat (PILAR) (Tanda gambar No. 19), oleh: Drs. Humala Tambunan,SH. Program PILAR (Menit: 00.00.43 s/d 00.09.30).
- Partai Islam Demokrat (PID) (Tanda gambar 29), oleh: H. Masiga Bugis, SH, Program PID (Menit: 00.10.57 s/d 00.17.50).
- Partai Murba 17 Agustus 1945, (Tanda gambar No. 31), oleh: Zulfikar Tan, Program Partai Murba (Menit: 00.18.47 s/d 00.28.39)
- Jurnal Kampanye: suasana kampanye di DKI (Menit: 00.29.06 s/d 00.30.17).
- Suasana kampanye dari Partai Golkar di Jakarta (Menit: 00.30.17 s/d 00.31.12).
- PUDI, PBN melakukan kampanye monologis di lapangan blok S Jakarta (Menit 00.31.12 s/d 00.32.22).
- PNU melakukan kampanye monologis di Jakarta Barat (Menit: 00.32.22 s/d 00.32.56).
- Kampanye akbar dari PBB di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (Menit: 00.32.22 s/d 00.32.56).
- Kampanye akbar PDI di Bekasi dan Jakarta Barat (Menit: 00.35.26 s/d 00.37.47).
- Kampanye akbar PID di Purwakarta Jawa Barat (Menit: 00.37.47 s/d 00.39.48).
- Kampanye akbar PUDI di Jakarta Utara (Menit: 00.39.48 s/d 00.41.06).
- Kampanye akbar partai Golkar di Cilincing Jakarta Utara (Menit: 00.41.06 s/d 00.42.49).
- Kampanye PAN, PDIP dan PK di Banda Aceh (Menit: 00.42.49 s/d 00.46.18).

456) Nomor : 12 A
 Sub Judul : Kampanye Monologis, Jurnal Kampanye
 Tahap : II Kampanye Pemilu (19 Mei – 4 Juni 1999)
 Masa Putar : 00.50.01
 Hitam Putih / Warna : Warna

Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : Komisi Pemilihan Umum
Tahun Produksi : 1999
Sinopsis :

- Partai Indonesia Baru (Tanda gambar No. 1), oleh: KH. SA. Abu Bakar Abdullah. Tujuan partai (Menit: 00.01.00 s/d 00.10.05)
- PNI Front Marhaenis (Tanda gambar No. 26), oleh: Syamsyudin. Program partai (Menit: 00.10.05 s/d 00.00.19.20)
- Partai Pekerja Indonesia (Tanda gambar No. 48). Program partai (Menit: 00.19.27 s/d 00.25.52)
- Jurnal Kampanye Pemilu: Dari Aceh dilaporkan kampanye Partai Golkar gagal dilakukan karena serangan sekelompok orang yang membakar mobil DPD TK II Meulaboh Aceh Barat (Menit: 00.25.58 s/d 00.27.30). Kedatangan Ketua Umum PPP Hamzah Haz disambut secara meriah oleh simpatisan (Menit: 00.27.30 s/d 00.29.15). Akbar Tanjung dalam pidato kampanye di Lampung, Golkar menghendaki demokrasi dan tidak menyetujui status quo. (Menit: 00.29.15 s/d 00.30.41). Ketua Umum PDI Budi Harjono kampanye di Kediri, Lumajang (Menit: 00.30.41 s/d 00.33.09). Ketua Umum Partai MKGR Mien Sugandhi kampanye di Pariaman Sumatera Barat (Menit: 00.33.09 s/d 00.35.21). Jurkam PDIP Guruh Sukarnoputra kampanye di Cirebon (Menit: 00.35.21 s/d 00.36.44). Situasi di Pekalongan telah aman setelah terjadi bentrokan antara massa PKB dengan massa PPP (Menit: 00.36.44 s/d 00.38.44). Kampanye di Semarang: PPP, Partai Pekerja Indonesia, PK, PSII (Menit: 00.38.44 s/d 00.42.54). Di Bengkulu kampanye PKP, Partai Murba, Partai Golkar (Menit: 00.42.54 s/d 00.46.26). Kampanye di Bali oleh Partai PIB, PDR, PK, PPP dan PKP (Menit: 00.46.26 s/d 00.50.01)

457) Nomor : 12 B
Sub Masalah : Monologis dan Kampanye Seluruh Indonesia
Tahap : II Kampanye Pemilu (19 Mei – 4 Juni 1999)

Masa Putar : 00.44.53
 Warna : Berwarna
 Narasi : Bahasa Indonesia
 Produksi : Komisi Pemilihan Umum
 Tahun Produksi : 1999
 Sinopsis :

- Partai Ummat Islam (PUI) (Tanda gambar No. 6), oleh: Prof Dr. H. Deliar Noer. Cita-cita PUI (Menit: 00.00.01 s/d 00.02.07)
- Partai Bulan Bintang (PBB) (Tanda gambar No. 22), oleh: H. Hartono Mardjono SH. Prinsip Landasan PBB (Menit : 00.02.07 s/d 00.09.32)
- Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) (Tanda gambar No. 36), oleh: DR. Ing Iryanto SE. M. Eng. Visi-Misi dan Program PUDI (Menit : 00.09.32 s/d s/d 00.14.01).
- Tanya jawab PUDI, PUI dan PBB (Menit : 00.35.40 s/d 00.44.53)

458) Nomor : 1
 Sub Judul : Kampanye Dialogis
 Masa Putar : 00.59.00
 Hitam Putih / Warna : Warna
 Narasi : Bahasa Indonesia
 Produksi : Komisi Pemilihan Umum
 Tahun Produksi : 1999
 Sinopsis :

- Kampanye dialogis, Partai Abul Yatama No. 12, oleh DR. Imam Santoso. Program utama (Menit: 00.00.01 s/d 00.07.00).
- Partai Rakyat Indonesia No. 20 oleh DR. H. Agus Miftah. Program partai (Menit: 00.07.00 s/d 00.12.00).
- Partai Golkar No. 33 oleh Aulia Rachman, SH. Tanya Jawab (00.12.00 s/d 00.59.00)

459) Nomor : 3
 Sub Judul : Kampanye Dialogis
 Masa Putar : 00.47.43

Hitam Putih/Warna : Warna
 Narasi : Bahasa Indonesia
 Produksi : Komisi Pemilihan Umum
 Tahun Produksi : 1999
 Sinopsis :
 - Kampanye dialogis tahap II: Moderator John N. Palinggi, Juru kampanye: Jamhari Maskad (Partai KAMI); Abdillah Toha (PAN); Dr. Hadidjojo Msc (Partai Murba).
 - Program Partai Murba (Menit: 00.00.01 s/d 00.01.52).
 - Program PAN (Menit: 00.01.52 s/d 00.06.59).
 - Program Partai KAMI (Menit: 00.06.59 s/d 00.12:02).
 - Tanya-jawab (Menit: 00.12.02 s/d 00.47:43)

460) Nomor : 5
 Sub Judul : Kampanye Dialogis
 Masa Putar : 00.55.16
 Hitam Putih/Warna : Berwarna
 Narasi : Bahasa Indonesia
 Produksi : Komisi Pemilihan Umum
 Tahun Produksi : 1999
 Sinopsis :
 - Moderator John N. Palinggi, Juru kampanye: Drs. Danu Ismail (PSII-1905); Mayjend. (Purn.) R. Rosadi Brata Adisuria (PR); H. Moh. Husein Naro (PP).
 - Program PR (Menit: 00.00.01 s/d 00.01.50).
 - Program PSII-1905 (Menit : 00.01.52 s/d 00.06.46).
 - Program PP (Menit: 00.06.46 s/d 00.12 :33).
 - Tanya-jawab (Menit: 00.12.38 s/d 00.55.16)

461) Nomor : No. 6
 Sub Judul : Kampanye Dialogis
 Masa Putar : 00.50.26
 Hitam Putih/Warna : Berwarna
 Narasi : Bahasa Indonesia

- Produksi : Komisi Pemilihan Umum
 Tahun Produksi : 1999
 Sinopsis :
- Kampanye Dialogis, Moderator John N. Palinggi, Juru kampanye: Germanikus Hasibuan (PNI Massa Marhaen); Markus Wauran (PDI); Ir. Gunadi Malang Joedo (PNBI).
 - Program-program partai (Menit: 00.00.01 s/d 00.07.11).
 - Tanya jawab antar juru kampanye (Menit: 00.07.11 s/d 00.50.26)
- 462) Nomor : 8
 Sub Judul : Kampanye Dialogis
 Masa Putar : 00.38.24
 Hitam Putih/Warna : Warna
 Narasi : Bahasa Indonesia
 Produksi : Komisi Pemilihan Umum
 Tahun Produksi : 1999
 Sinopsis :
- Kampanye Dialogis, Moderator John N. Palinggi, Juru kampanye: Probosutejo (PNI Front Marhaenis); Dr. H. Andi Rasyid Djalil (PID); Drs. H.R. Dhanny SN, Dipl. MB.MBA (PUMI) (Menit : 00.00.01 s/d 00. 01 :06).
 - Program-program partai (Menit: 00.01.26 s/d 00.12 :22).
 - Pertanyaan antar juru kampanye (Menit: 00.12.22 s/d 00.38.24).
- 463) Nomor : 10
 Sub Judul : Kampanye Dialogis
 Masa Putar : 00.59.60
 Hitam Putih/Warna : Warna
 Narasi : Bahasa Indonesia
 Produksi : Komisi Pemilihan Umum
 Tahun Produksi : 1999
 Sinopsis :

- Kampanye dialogis tahap II, Moderator Dr. Salim Said, Juru kampanye: Merphin Panjaitan (PDKB); Andi Arif (PRD); Prof. Said Agil Siraj (PKB).
- Program-program partai (Menit: 00.0.01 s/d 00.13:12).
- Pertanyaan antar juru kampanye (Menit: 00.13.12 s/d 00.59.60)

464) Nomor : 12
 Sub Judul : Kampanye Dialogis
 Masa Putar : 00.58.10
 Hitam Putih/Warna : Berwarna
 Narasi : Bahasa Indonesia
 Produksi : Komisi Pemilihan Umum
 Tahun Produksi : 1999
 Sinopsis :

- Kampanye dialogis hari ke-15, Moderator John N. Palinggi, Juru kampanye: Kwik Kian Gie (PDIP); Ny. Nuniek T. hariyani (PDR); Edwin Henawan Soekowati (PND) (Menit: 00.00.01 s/d 00.00.53)
- Program-program partai (Menit: 00.00.53 s/d 00.13 .52)
- Pertanyaan antar juru kampanye (Menit: 00.19.36 s/d 00.58.10)

3. Pemungutan Suara

a. Arsip Tekstual

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959

465) Berkas mengenai penjagaan keamanan pemilu daerah Kalimantan dan Makassar. 28 September - 25 Oktober 1955, asli, 1 sampul.(No. 1927)

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 Jilid II

466) Surat dari Perdana Menteri kepada Kepolisian Negara RI mengenai penjagaan dan pengawalan surat-surat penting dalam rangka pemilihan anggota Konstituante, nb. beserta lampiran. 10 November 1955, pertinggal, 1 sampul. (No. 2434)

Kabinet Presiden RI 1950-1959

- 467) Surat edaran Kepala Rumah Tangga Presiden No. 754/55 tentang pemberian suara Presiden di Kementerian Penerangan Merdeka Barat 9. 28 September 1955, stensilan, 1 sampul. (No. 992)
- 468) Surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 54843/Kab tentang hari libur sekolah dan perguruan tinggi pada waktu pemungutan suara untuk pemilu anggota-anggota DPR dan Konstituante. 20 September 1955, salinan, 1 lembar. (No. 1176)

Nahdlatul Ulama 1948-1979

- 469) Surat dari PW Lapunu Jakarta kepada PC Lapunu di Jakarta mengenai instruksi PPI No. 12/ ... tentang cara-cara penyelenggaraan pemilihan suara. 3 September 1955, tembusan, 8 lembar. (No. 2306)
- 470) Surat-surat mengenai jangka waktu pemilihan dan instruksi pendaftaran pemilih untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD di Sumatera Utara pada 1958. 13 Maret - 2 Oktober 1958, salinan, tembusan, 6 lembar. (No. 2312)
- 471) Jadwal penghitungan suara, penetapan terpilih, pelantikan, dan sidang-sidang awal DPR, DPRD I, dan DPRD II (nb tidak lengkap). 1971. salinan, 1 lembar. (No. 2326)
- 472) Surat dari Lukman Darmo Lukito kepada ketua DPC PPP Lumajang mengenai laporan petunjuk teknis pemilu. 15 September 1976, tembusan, 2 lembar. (No. 2332)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1971-1999

- 473) Surat-surat formulir yang dipergunakan dalam pemilihan umum tahun 1977 dalam pemungutan suara. 1977, fotokopi, 2 jilid. (No.1234)
- 474) Himpunan surat-surat suara dari tiap daerah untuk dipergunakan dalam pemilihan umum. 1982, fotokopi, 1 jilid. (No.1239)
- 475) Jadwal kegiatan setelah pelaksanaan pemungutan suara. 1987, fotokopi, 1 jilid. (No.1241)

- 476) Daftar jumlah penduduk WNRI yang terdaftar dan penetapan jumlah anggota DPR, DPRD, dan DPRD II yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan dalam pemilihan umum. 1987, fotokopi, 1 jilid. (No.1242)
- 477) Daftar perhitungan pembagian jumlah wakil anggota DPRD Tk. I hasil pemilihan umum. 1987, fotokopi, 1 jilid. (No.1243)
- 478) Daftar jumlah badan penyelenggara/pelaksana pemilihan umum di daerah dalam pemilihan umum. 1992, fotokopi, 1 jilid. (No.1245)
- 479) Rancangan daftar jumlah anggota DPR, DPRD I, DPRD II yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan dalam pemilihan umum tahun 1992 dan daftar tambahan jumlah wakil daerah Tingkat II di DPR yang jumlahnya lebih dari seorang dalam pemilihan umum. 1992, fotokopi, 1 jilid. (No.1246)
- 480) Rumus penggunaan formulir dan indeks alokasi buku badan penyelenggara/pelaksana pemilu. 1997, fotokopi, 1 jilid. (No.1247)
- 481) Rekapitulasi alokasi jilid, formulir, dan kelengkapan administrasi gabungan dan fotokopi pusat untuk daerah serta fotokopi oleh daerah untuk keperluan badan penyelenggara/pelaksana pemilihan umum tahun 1997 seluruh Indonesia, 1997, fotokopi, 1 jilid. (No.1248)
- 482) Lampiran III (jilid 4) tentang teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum. 1999, fotokopi, 1 jilid. (No. 1324. 4)

b. Arsip Foto

Kempen Sumatera Utara 1950-1955

- 483) Pemilihan umum di Kabupaten Deli Serdang (Medan). Dalam foto terlihat situasi di TPS II Simpang III Titi Kuning. Lokasi TPS di sebuah sekolah cina sudah penuh oleh orang yang berbaris menanti giliran memberikan suara. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3595, No. Negatif 1)
- 484) Pemilihan umum di Kabupaten Deli Serdang, para panitia pemungutan suara membuka kertas-kertas suara yang masuk disaksikan oleh para hadirin. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3600, No. Negatif 2)

- 485) Suara yang masuk disaksikan oleh para hadirin. Seorang lelaki tua yang ikut dalam pemilihan umum di Kabupaten Deli Serdang, ia memasukkan kartu suara ke dalam kotak yang sudah disediakan di TPS. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3601, No. Negatif 3)
- 486) Seorang wanita tua berkebayu sedang dibimbing oleh petugas pemilu. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3604, No. Negatif 4)
- 487) Suasana dalam Pemilu di Kabupaten Deli Serdang. Panitia sedang memeriksa daftar nama orang yang meramaikan pemilu September 1955 di Medan. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3607, No. Negatif 5)
- 488) Pemilihan umum di Kabupaten Deli Serdang memperlihatkan aspirasi rakyat di Medan yang aspirasi rakyat di Medan yang masih antusias untuk memilih calon pemimpin mereka. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3608, No. Negatif 6)
- 489) Suasana dalam Pemilu di Kabupaten Deli Serdang Medan. Ada yang duduk menunggu giliran, menusuk kartu suara, dan ada yang memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3610, No. Negatif 7)
- 490) Seorang wanita tua dibantu oleh para petugas pemilu untuk memasukkan kartu suara ke kotak suara yang disediakan. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3611, No. Negatif 8)
- 491) Para wanita sedang menunggu giliran mengambil kartu suara. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3613, No. Negatif 9)
- 492) Petugas TPS sedang menunjukkan kotak suara. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3614, No. Negatif 10)
- 493) Petugas TPS sedang berada di depan rumah Partai di Kab. Deli Serdang. 29 September 1955 (No. 3616, No. Negatif 11)
- 494) Suasana pemilu di Kabupaten Deli Serdang. 29 September 1955 (No. 3618, No. Negatif 12)
- 495) Suasana pemilu di Kabupaten Deli Serdang. Aparat keamanan sedang konvoi menjaga keamanan. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3619, No. Negatif 13)

- 496) Petugas sedang menghitung Kartu Suara. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3622, No. Negatif 15)
- 497) Petugas TPS sedang menunjukkan kotak suara. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3623, No. Negatif 16)
- 498) Lambang-lambang partai ditempel di pohon. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3624, No. Negatif 17)
- 499) Pemilih sedang mendaftar pada petugas. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3625, No. Negatif 18)
- 500) Petugas TPS sedang menata Kartu Pemilih. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3626, No. Negatif 19)
- 501) Warga sedang menunggu giliran. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3627, No. Negatif 20)
- 502) Warga sedang menuju TPS. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3628, No. Negatif 21)
- 503) Pemilihan Umum di Kabupaten Karo. 29 September 1955 (No. 3657 - 3685, No. Negatif 550929 AA 1 A - 8 E)
- 504) Di Kampung Limau Sundai Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat TPS III, Ketua panitia sedang membuka rapat pemungutan suara. Langkat Binjai, 29 September 1955 (No. 3598, No. Negatif 1)
- 505) TPS III Kampung Limau Sundai Kecamatan Binjai di Kabupaten Langkat. Ketua panitia sedang memperlihatkan bungkusan kartu suara yang masih di lak (belum dibuka) kepada para pemilih. Langkat Binjai, 29 September 1955 (No. 3602, No. Negatif 3)
- 506) Di Kampung Limau Sundai Hilir (Titi gantung) TPS II terlihat para pemilih duduk berbaris dan tegak sedang menanti giliran untuk melaksanakan pemilihan umum. Gambar ini ada di Kecamatan Binjai di Kabupaten Langkat. 29 September 1955 (No. 3612, No. Negatif 8)
- 507) Di Kampung Beragam Kec. Binjai Kab. Langkat TPS I para pemilih sedang berjejal-jejal menanti giliran untuk memilih. Langkat Binjai, 29 September 1955 (No. 3615, No. Negatif 10)
- 508) Aparat keamanan sedang melaksanakan pemungutan suara. Deli Serdang, 29 September 1955 (No. 3617, No. Negatif 11)

- 509) TPS I Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat kelihatan seorang ibu sedang melaksanakan kewajibannya. Langkat Binjai, 29 September 1955 (No. 3629 - 3630, No. Negatif 22-23)
- 510) Seorang ibu yang baru melahirkan bayi turut memilih kelihatan sedang memasukkan kartu suara ke dalam tabung. Langkat Binjai, 29 September 1955 (No. 3631, No. Negatif 24)
- 511) Di kampung Limau Sundai Kecamatan Binjai di Kab. Langkat TPS III membuka bungkusan kartu yang di-lak, Ketua panitia menghitung mengira kartu suara dengan dipersaksikan oleh para pemilih. Langkat Binjai, 29 September 1955 (No. 3632, No. Negatif 25)
- 512) Para pemilih sedang melakukan tugas pilih memasuki kamar rahasia. Langkat Binjai, 29 September 1955 (No. 3633, No. Negatif 26)
- 513) TPS III Kampung Limau Sundai Kecamatan Binjai di Kabupaten Langkat. Ketua panitia sedang memperlihatkan bungkusan kartu suara yang masih di lak (belum dibuka) kepada para pemilih. Langkat Binjai, 29 September 1955 (No. 3634, No. Negatif 27)
- 514) Pemilihan Umum di Kabanjahe. Labanjahe, 29 September 1955 (No. 3686 - 3706, No. Negatif 550929 AA 3 CS - 21 LS)
- 515) Pemilihan Umum di Tanjung Balai. Suasana ramai di TPS sektor 5 yang dihadiri para pemilih juga dijaga dengan keamanan setempat. Tanjung Balai, 29 September 1955 (No. 3596, No. Negatif 1)
- 516) Di sela-sela penantian untuk memberikan suara, anak kecil ikut menyertai ibunya yang akan memilih di TPS Tanjung Balai. 29 September 1955 (No. 3597, No. Negatif 1)
- 517) Tampak petugas sedang membuka kartu suara untuk diperlihatkan kepada para hadirin yang siap untuk memilih. Di dalam kertas suara tersebut terlihat gambar-bambar/lambang partai-partai yang ikut pemilu. Tanjung Balai, 29 September 1955 (No. 3599, No. Negatif 2)
- 518) Para petugas yang ikut menjaga keamanan di dalam pemilihan umum di Tanjung Balai sedang bergambar bersama. 29 September 1955 (No. 3597, No. Negatif 4)

- 519) Kantor Polisi Negara kantor wilayah Tanjung Balai yang juga mengamankan acara Pemilu. 29 September 1955 (No. 3605, No. Negatif 4)
- 520) Para penduduk yang antri untuk melakukan pemilu di Tanjung Balai. Ada beberapa barisan antrian, bahkan ada yang sambil membawa anaknya. 29 September 1955 (No. 3609, No. Negatif 6)
- 521) Pemilihan Umum di Tanjung Balai. 29 September 1955 (No. 3635 - 3644, No. Negatif 550929 AA 1 - AA 10)
- 522) Bertempat di ruang S.R. para pemilih menunggu gilirannya masing-masing untuk dapat masuk ruangan kelihatan dari muka. Tanjung Morawa, 13 Agustus 1955 (No. 3588, No. Negatif 550813 AA 1)
- 523) Para pemilih berbaris teratur menurut nomor berurut menanti panggilan. Tanjung Morawa, 13 Agustus 1955 (No. 3589, No. Negatif 550813 AA 2)
- 524) Pemandangan dalam pemilihan umum. Tanjung Morawa, 13 Agustus 1955 (No. 3590, No. Negatif 550813 AA 3)
- 525) Seorang wanita menerima kartu pemilih untuk dapat masuk ke ruangan pemilihan. Tanjung Morawa, 13 Agustus 1955 (No. 3591, No. Negatif 550813 AA 4)
- 526) Ibu sudah tua turut memilih seperti yang nampak sedang masuk yang disukai. Tanjung Morawa, 13 Agustus 1955 (No. 3592, No. Negatif 550813 AA 5)
- 527) Demikian pula seorang wanita sedang menggendong anaknya, merasa senang dapat memilih dengan bebas. Tanjung Morawa, 13 Agustus 1955 (No. 3593, No. Negatif 550813 AA 7)
- 528) Dengan senang hati seorang bapak memasukkan kartu pilihannya di muka para panitia. Tanjung Morawa, 13 Agustus 1955 (No. 3594, No. Negatif 550813 AA 8)
- 529) Seorang laki-laki buta sedang dibimbing memasukkan kartu suara ke dalam kotak. Tapanuli Tengah, 29 September 1955 (No. 3620, No. Negatif 14)

- 530) Pemilihan Umum di Tapanuli Tengah. 29 September 1955 (No. 3645 - 3656, No. Negatif 550929 AA 1 - 13)
- 531) Pemilihan Umum di Tapanuli Tengah. Seorang nenek sedang memasukkan suara ke kotak suara. Ia tak ketinggalan meramaikan pemilu tahun 1955. Tapanuli Tengah, 29 September 1955 (No. 3706, No. Negatif 4)

Kempen Sumatera Barat 1955-1965

- 532) Pembuatan tanda gambar Masyumi untuk pemilu di masjid Muara Panas. Solok, 30 Mei 1955, (No. 3247, No. Positif: 550530 CC 1)
- 533) Pemandangan di kampung Tionghoa, Bukittinggi dimana jalan pemilih tampak juga yang sudah lanjut usianya. 29 September 1955, (No. 3248, No. Positif: 550929 CC 1)
- 534) Seorang calon pemilih yang sudah lanjut umurnya sedang memeriksa surat suara yang telah berlobang karena terkena paku. Bukittinggi, 29 September 1955, (No. 3249, No. Positif: 550929 CC 2)
- 535) Seorang calon pemilih yang sudah lanjut umurnya sedang memeriksa surat suara telah berlobang. Bukittinggi, 29 September 1955 (No. 3250, No. Positif: 550929 CC 3)
- 536) Seorang calon pemilih yang sudah lanjut umurnya sedang memeriksa surat suara telah berlobang karena terkena paku . bukittinggi 29 September 1955 (No. 3251 - 3252, No. Positif: 550929 CC 4 – CC 5)
- 537) Pemandangan dalam TPS ketika pemungutan suara. Bukittinggi, 29 September 1955 (No. 3253, No. Positif: 550929 CC 6)
- 538) Salah satu TPS di Kampung Sanjai pada saat pemilihan umum yang mengambil tempat di sebuah sekolah rakyat. Bukittinggi 29 September 1955, (No. 3254 - 3256, No. Positif: 550929 CC 7 – CC 9)
- 539) TPS di Bukittinggi. 29 September 1955 (No. 3257, No. Positif: 550929 CC 10)
- 540) Para Calon pemilih ketika sedang menunjukkan surat panggilan pada panitia yang bertugas dibagian pintu masuk dari ruangan TPS.

Bukittinggi, 29 September 1955 (No. 3258 - 3269, No. Positif: 550929 CC 11 – CC 22)

- 541) TPS di gedung Biruga II surat-surat suara terlebih dahulu dihitung untuk mengetahui jumlahnya. Bukittinggi, 29 September 1955 (No. 3270 - 3272, No. Positif: 550929 CC 24 – CC 26)
- 542) TPS di gedung CHTH Bukittinggi seorang warga negara ketika memasuki surat suaranya. Bukittinggi, 29 September 1955 (No. 3273 - 3274, No. Positif: 550929 CC 27 – CC 28)
- 543) CHTH Bukittinggi seorang warganegara ketika memasuki surat suaranya. Bukittinggi, 29 September 1955, (No. 3275, No. Positif: 550929 CC 29)
- 544) Pemilu bagi keluarga anggota angkatan perang bertempat di Balai Pertemuan Datasemen Tentara Bukit Barisan, suasana ketika rakyat menantikan gilirannya untuk memberikan suaranya. Bukittinggi, 29 September 1955, (No. 3276, No. Positif: 550929 CC 30)
- 545) Orang sedang dirawat di RSUP Bukittinggi pun diberi kesempatan untuk menentukan wakilnya. Bukittinggi, 29 September 1955, (No. 3277 - 3282, No. Positif: 550929 CC 31 – CC 36)

Kempen Jawa Tengah 1950-1965

- 546) Panitia Pemilu daerah Karanganyar mengangkut kotak suara dengan berjalan kaki sampai malam menuju ke tempat PPI dan Ketua Panitia Pemilu Jawa Tengah, Drs. Rustamadji membuka rapat pengumuman hasil pemungutan suara di Semarang. (1955 September, 107 lb, Neg: 551014 GN 6)
- 547) Gubernur Jawa Tengah, RMT. Pandji Mangunagoro melakukan pemungutan suara untuk memilih anggota Konstituante di Semarang. (1955 Desember, 30 lb, Neg:-)

Kempen Aceh 1947-1965

- 548) Pemilu di Kabupaten Aceh Barat. Aceh, 25 September 1955 (No.1879 – 1882, No. Negatif 550925 AA 1 – 4)

- 549) Wanita-wanita sedang menanti gilirannya memberikan suaranya, dan para pejabat sedang memberikan suaranya di Aceh. 25 September 1955 (No.1883, No. Negatif 550925 AA 5)
- 550) Penyelenggara TPS sedang melaksanakan tugasnya di Aceh. 25 September 1955 (No.1884, No. Negatif 550925 AA 6)
- 551) Penyelenggara TPS sedang menghitung hasil suara, seorang kakek sedang menuju TPS di Aceh. 25 September 1955 (No.1886, No. Negatif 550925 AA 8)
- 552) Pemilu di Kabupaten Aceh Barat. 25 September 1955 (No.1887, No. Negatif 550925 AA 9)
- 553) Seorang petani sedang memasukkan kartu suara di Aceh. 25 September 1955 (No.1888, No. Negatif 550925 AA 10)
- 554) Seorang wanita sedang memasukkan kartu suara di Aceh. 25 September 1955 (No.1889, No. Negatif 550925 AA 11)
- 555) Seorang pria tua sedang memasukkan kartu suara di Aceh. 25 September 1955 (No.1890, No. Negatif 550925 AA 12)
- 556) Suasana Pemilu kedai-kedai pada tutup di Aceh. 25 September 1955 (No.1892, No. Negatif 550925 AA 14)
- 557) Pemilu di Kabupaten Aceh Barat. 25 September 1955 (No.1893, No. Negatif 550925 AA 15)
- 558) Para pemilih berdesakan ke meja TPS di Aceh. Meulaboh, 15 Desember 1955 (No.1894, No. Negatif 551215 AA 1)
- 559) Seorang cacat dengan tersenyum tak mau ketinggalan di Aceh. 15 Desember 1955 (No.1895, No. Negatif 551215 AA 2)
- 560) Kaum wanita didahulukan suaranya di TPS Kepala Jepen Aceh Barat tengah mengikuti jalannya penghitungan suara. 15 Desember 1955 (No.1896, No. Negatif 551215 AA 3)
- 561) Seorang buta didahulukan dari pemilih yang lain di Aceh. 15 Desember 1955 (No.1897, No. Negatif 551215 AA 5)
- 562) Dengan dituntun oleh anggota PPS seorang buta memasukkan surat suaranya di Aceh. Aceh, 15 Desember 1955 (No.1898, No. Negatif 551215 AA 6)

- 563) Petugas Jepen dengan pengawasan keamanan sibuk di samping pemungutan suara di Aceh. 15 Desember 1955 (No.1899, No. Negatif 551215 AA 7)
- 564) Dengan gembira para pemilih menunggu gilirannya di TPS Suak Timah, Kecamatan Sama Tiga. Aceh, 15 Desember 1955 (No.1900, No. Negatif 551215 AA 8)
- 565) TPS di Kampung Tjot Kecamatan Sam Tiga. Aceh, 15 Desember 1955 (No.1901, No. Negatif 551215 AA 9)
- 566) Kepala Jepen (Djam'an Kasim) penghabisan bertugas melipat suaranya di balik suara TPS Gunung Keling. Aceh, 15 Desember 1955 (No.1902, No. Negatif 551215 AA 10)
- 567) Petugas Jepen Sdr. Bahrn Naler, tengah memasukkan suara suaranya di TPS Meuub. Aceh, 15 Desember 1955 (No.1903, No. Negatif 551215 AA 11)
- 568) Para anggota PPPS Peurombou sewaktu hendak mengirimkan bungkusan surat suara dengan tong suaranya ke Kecamatan Kawajj XVI di Ujung Kalak. 15 Desember 1955 (No.1904, No. Negatif 551215 AA 12)

Kempen Sumatera Selatan 1950-1967

- 569) Dua wanita tua sedang duduk-duduk menunggu antrian untuk mencoblos saat pemilihan anggota Konstituante Akasi IB, Tanjung Pandan, 1958. (No. 3039, No. Positif: 15)
- 570) Panitia sedang membacakan beberapa partai saat pemilihan anggota Konstituante Akasi IB, Tanjung Pandan, 1958. (No. 3041-3042, No. Positif: 18-17)
- 571) Panitia sedang memberikan pengarahan pada peserta calon pemilih, Tanjung Pandan, 1958. (No. 3043-3044, No. Positif: 20-21)
- 572) Seorang wanita sedang memasukan kartu ke kotak suara saat pemilihan anggota Konstituante Akasi IB, Tanjung Pandan, 1958. (No. 3061, No. Positif: 19)

- 573) Tampak kaum wanita dengan tenang menunggu giliran untuk memberikan suaranya pada salah satu TPS, Kab. Ogan/Komering ilir, 15 Desember 1955. (No. 3778 dan 3779, No. Positif: 00503a dan 00505a)
- 574) Pemungutan suara untuk anggota DPRD Kab. Ogan/Komering, Palembang, 1 Desember 1957. (No. 3764-3769, No. Positif: 572101)
- 575) Suasana Pemilu, Kab. Ogan/Komering Ilir, 15 Desember 1955. (No. 3775, No. Positif: 00518a).
- 576) Pemilu di Kab. Belitung. Salah satu pemilih anggota polisi negara sedang memasukan kartu suara ke dalam kotak. Belitung, 29 September 1955. (No. 3747, No Positif: 1)
- 577) Pemilu di Kab. Belitung. Salah satu pemilih anggota tentara sesudah mempergunakan hak pilihnya dipersilahkan keluar dari pintu keluar, Palembang, 29 September 1955. (No. 3748, No. Positif 2)
- 578) Pemilu di Kab. Belitung. TPS II Kampung Parit Tanjung Pandan, Palembang, 29 September 1955. (No. 3749, No. Positif: 3)
- 579) Pemilu di Kab. Belitung. Pembukaan kotak pemilihan, Palembang, 29 September 1955. (No. 3750, No. Positif: 8)
- 580) Pemungutan suara untuk anggota DPRD Kab. Ogan/Komering, Palembang, 1 Desember 1957. (No. 3751-3763, No. Positif: 571201)
- 581) Pemilihan umum dalam daerah Kotabesar Tanjung Katang, Teluk Betung, 1 Februari 1957. (No. 3729-3740, No. Positif: 1-12)
- 582) Pemilihan umum Tk I/II di Kab. Musi Banyuasin, Palembang, 1 Desember 1957. (No. 3741-3742, No. Positif: 1-2)
- 583) Pemilu di Kab. Belitung. Anak-anak sedang bermain sementara orang tua mereka sedang menanti bergilir untuk memilih, Palembang, 29 September 1955. (No. 3743, No. Positif: 5)
- 584) Pemilu di Kab. Belitung. Para pemilih laki-laki dan perempuan, pengusaha berinisiatif mendirikan warung di tempat pemilihan, puluhan pemilih sedang berjejal-jejal untuk memilih, Palembang, 29 September 1955. (No. 3744-3746, No. Positif: 4,7,6)

- 585) Para Panitia sedang menghitung suara yang diperolehnya, Kab. Ogan/Komering ilir, 15 Desember 1955. (No. 3709-3713, No. Positif: 00512a-00517a)
- 586) Bapak-bapak sedang berantrian untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemilih, Palembang, 1 Desember 1957. (No. 3697, No. Positif: 6)

Kempen DI Yogyakarta 1950-1965

- 587) Pelaksanaa Pemilu untuk Anggota DPR Blanko formulir pemilu menumpuk di ruang panitia pemilu untuk dibagikan ke setiap KPPS, 16 Juli 1951. (No. 880, No. Negatif: a.1)
- 588) Panitia pemilu sedang membagi blanko formulir pemilu untuk dibagikan ke setiap KPPS, 16 Juli 1951. (No. 881-882, No. Negatif: a.2-a.3)
- 589) Poster pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD yang dibuat oleh Jawatan Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Juli 1951. (No. 883, No. Negatif: 175/1)
- 590) Poster berisi "UU Islam Akan Berlaku Kalau Umat Islam Menang" dari Jawatan Penerangan pada pelaksanaan pemilu di Yogyakarta, 16 Juli 1951. (No. 884, No. Negatif: 510716 GM 4)
- 591) Masyarakat Yogyakarta sedang antri mengikuti pemilu di salah satu KPPS untuk memilih anggota Parlemen, 16 Juli 1951. (No. 885, No. Negatif: 510716 GM 5)
- 592) Kartu suara di salah satu KPPS di Yogyakarta untuk pelaksanaan pemilu guna memilih anggota parlemen, 16 Juli 1951. (No. 886, No. Negatif: 510716 GM 6)
- 593) Panitia pemilu sedang menulis formulir yang akan dibagikan kepada penduduk yang memiliki hak pilih, 16 Juli 1951. (No. 887, No. Negatif: 510716 GM 7)
- 594) Para calon anggota parlemen DIY sedang duduk berjejer di depan masyarakat yang akan memilih, 16 Juli 1951. (No. 888, No. Negatif: 510716 GM 8)

- 595) Wakil Kepala Daerah, Sri Paku Alam VIII sedang mengamati para calon parlemen yang akan dipilih pada pemilu yang sedang dilaksanakan oleh panitia DIY, 16 Juli 1951. (8895R 510716 GM 9)
- 596) Para calon anggota parlemen DIY diberi tanda didadanya saat duduk bersanding dengan calon yang lain pada pemilu di Yogyakarta, 16 Juli 1951. (No. 890, No. Negatif: 510716 GM 10)
- 597) Calon pemilih sedang mendengarkan penjelasan tentang tata tertib pemilu parlemen dari panitia pemungutan suara di Yogyakarta sebelum dimulai pelaksanaannya, 16 Juli 1951. (No. 891-893, No. Negatif: 510716 GM 11 - 510716 GM 14)
- 598) Para calon anggota parlemen DIY duduk berjejer di belakang tanda gambar saat pelaksanaan pemilu di Yogyakarta, 16 Juli 1951 (No. 895, No. Negatif: 510716 GM 15)
- 599) Masyarakat mulai menggunakan hak pilihnya dimana satu persatu masuk di bilik suara untuk menentukan wakilnya di parlemen, 16 Juli 1951 (No. 896, No Negatif: 510716 GM 16)
- 600) Seorang calon pemilih sedang berjalan di depan para calon anggota parlemen untuk mencari calonnya yang akan dipilih di bilik suara saat pelaksanaan pemilu di Yogyakarta, 16 Juli 1951 (No.897, No. Negatif: 510716 GM 17)
- 601) Pemandangan bilik suara yang digunakan untuk pemilu parlemen, tampak para panitia pemungutan suara duduk di luar bilik suara, 16 Juli 1951 (No.900, No. Negatif 510716 GM 20)
- 602) Para calon pemilih menandatangani absen sebelum diberi formulir pemungutan suara, 16 Juli 1951. (No. 901-902, No. Negatif: 510716 GM 21 - 510716 GM 22)
- 603) Calon pemilih diberi formulir pemungutan suara untuk memilih 10 calon anggota parlemen pada pemilu di Yogyakarta, 16 Juli 1951. (No.903, No. Negatif: 510716 GM 23)
- 604) Calon pemilih sedang menunggu giliran dipanggil oleh panitia pemungutan suara di KPPS Yogyakarta, 16 Juli 1951. (No. 904, No. Negatif: 510716 GM 24)

- 605) Calon pemilih sedang menukarkan kartu undangan dengan kartu suara di sebuah KPPS dalam pelaksanaan pemilu di Yogyakarta untuk memilih anggota parlemen, 16 Juli 1951. (No. 905, No. Negatif: 510716 GM 25)
- 606) Dua orang pemuda sedang menandatangani daftar nama calon anggota parlemen yang akan dipilih, 16 Juli 1951. (No. 906, No. Negatif: 510716 GM 26)
- 607) Petugas KPPS sedang menulis nama calon pemilih untuk mendapatkan blanko formulir untuk memilih 10 pendukung 16 Juli 1951. (No. 907, No. Negatif: 510716 GM 27)
- 608) Seorang wanita calon pemilih sedang melakukan sidik jari di depan petugas KPPS sebelum memberikan suaranya, 16 Juli 1951. (No. 908, No. Negatif: 510716 GM 28)
- 609) Kesibukan pemilu di Kantor Pembantu Pemungutan Suara di Pakualaman Timur, Yogyakarta, 16 Juli 1951 (No. 909, No. Negatif: 510716 GM 29)
- 610) Masyarakat berjejal untuk stempel jari, menandakan sudah mengikuti pemilu, 16 Juli 1951. (No. 910, No. Negatif: 510716 GM 30)
- 611) Para pemuda sedang melakukan sidik jari karena tidak bisa menulis/ buta huruf saat akan mendapatkan blanko formulir pemungutan suara, 16 Juli 1951. (No. 911, No. Negatif: 510716 GM 31)
- 612) Para petugas KPPS sedang menulis nama calon pemilih sebelum mendapatkan blanko formulir pemungutan suara, 16 Juli 1951. (No. 912, No. Negatif: 510716 GM 32)
- 613) Calon pemilih sedang menulis 10 nama pendukungnya untuk memberikan suaranya, 16 Juli 1951. (No. 913, No. Negatif: 510716 GM 33)
- 614) Seorang calon pemilih diberi blanko formulir surat suara untuk diisi dengan disaksikan oleh pengawas, 16 Juli 1951. (No. 914, No. Negatif: 510716 GM 65)

- 615) Seorang calon pemilih sedang menulis calon yang didukung dalam kartu suara pemilu di KPPS, 16 Juli 1951 (No. 915, No. Negatif: 510716 GM 68)
- 616) Calon pemilih sedang mendaftarkan sebagai peserta pemilu di depan petugas KPPS, 16 Juli 1951. (No. 916, No. Negatif: 510716 GM 34)
- 617) Petugas KPPS sedang menerima pendaftaran masyarakat yang mencalonkan diri pada pemilu anggota parlemen, 16 Juli 1951. (No. 917, No. Negatif: 510716 GM 35)
- 618) Para calon pemilih sedang antri di daftar oleh petugas KPPS untuk mendapatkan blanko formulir pemilu, 16 Juli 1951 (No. 920, No. Negatif: 510716 GM 39)
- 619) Besek tempat kartu suara yang ditempel dengan gambar calon pendukung sebagai sarana pemilu parlemen di Yogyakarta 16 Juli 1951. (No. 921-922, No. Negatif: 510716 GM 40 - 510716 GM 41)
- 620) Seorang pemilih wanita sedang memasukkan kartu suaranya yang menggunakan besek sebagai tempat kartu suara pada pemilu parlemen di Yogyakarta, 16 Juli 1951. (No. 923, No. Negatif: 510716 GM 42)
- 621) Seorang pemilih pria sedang memasukkan kartu suaranya di bumbung bambu yang diberi tanda dari pepohonan sebagai tempat kartu suara pada pemilu parlemen di Yogyakarta, 16 Juli 1951. (No. 924-925, No. Negatif: 510716 GM 43-510716 GM 44)
- 622) Calon pemilih sedang didaftar oleh petugas KPS Gondowulung, Yogyakarta untuk memberikan hak suaranya pada pemilu parlemen, 16 Juli 1951. (No. 926, No. Negatif: 510716 GM 46)
- 623) Seorang pemilih sedang memasukkan kartu suaranya di kotak suara disaksikan oleh petugas KPS Gondowulung, Yogyakarta, 16 Juli 1951. (No. 927, No. Negatif: 510716 GM 47)
- 624) Petugas sedang menyerahkan kotak hasil suara pemilih ke tingkat kecamatan, 16 Juli 1951. (No. 928, No. Negatif: 510716 GM 48)
- 625) Besek yang digunakan sebagai tempat kartu suara diikat dan dikirim ke KPPU, 16 Juli 1951. (No. 929-931, No. Negatif: 510716 GM 49 - 510716 GM 51)

- 626) Wakil Kepala DIY, Sri Paku Alam VIII sedang menyaksikan petugas pemilu membelah bambu berisi kartu suara untuk dihitung perolehan suaranya, 16 Juli 1951. (No. 932, No. Negatif: 510716 GM 45)
- 627) Petugas KPPU sedang membuka besek berisi kartu suara disaksikan oleh seorang pejabat KPU, 16 Juli 1951. (No. 933, No. Negatif: 510716 GM 53)
- 628) Panitia pemungutan suara sedang menghitung kartu suara hasil pemilu yang terakhir, 16 Juli 1951. (No. 935, No. Negatif: 510716 GM 52)
- 629) Petugas KPU sedang memeriksa daftar nama perolehan suara dari pemilih, 16 Juli 1951. (No. 937, No. Negatif: 510716 GM 56)
- 630) Petugas KPU sedang memeriksa kartu suara dalam penghitungan suara pemilu di KPPU, 16 Juli 1951. (No. 938, No. Negatif: 510716 GM 58)
- 631) Ketua Pelaksanaan pemilu sedang membacakan tata tertib penghitungan suara di Kelurahan Umbun Rebo, Yogyakarta, 16 Juli 1951. (No. 939, No. Negatif: 510716 GM 59)
- 632) Petugas KPU sedang membacakan hasil perolehan suara untuk setiap nama calon parlemen di KPPU, 16 Juli 1951. (No. 940, NO. Negatif: 510716 GM 60)
- 633) Besek yang berisi kartu suara sebelum dibuka diperlihatkan lebih dulu kepada pengawas pemilu, 16 Juli 1951. (No. 941, No. Negatif: 510716 GM 61)
- 634) Para saksi sedang memeriksa dan mengawasi proses penghitungan suara di KPPU, 16 Juli 1951. (No. 942, No. Negatif: 510716 GM 62)
- 635) Petugas KPU sedang menulis jumlah peroleh suara pemilu parlemen dari Partai Masyumi di papan tulis, 16 Juli 1951. (No. 943, No. Negatif: 510716 GM 57)
- 636) Petugas KPU sedang menulis jumlah perolehan suara pemilu parlemen dari Partai Katholik di papan tulis, 16 Juli 1951 (No. 944, No. Negatif: 510716 GM 63)

- 637) Petugas KPPU sedang memasukkan hasil penghitungan suara di kotak suara dengan disaksikan oleh para pengawas pemilu, 16 Juli 1951 (No. 946, No. Negatif: 510716 GM 64)
- 638) Daftar tetap calon anggota DPR DI Yogyakarta dipasang di papan pengumuman, 16 Juli 1951. (No. 947, No. Negatif: 510716 GM 67)
- 639) Petugas PPPI membagikan surat pemberitahuan tentang Pemilu di Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4875, No. Negatif: 3)
- 640) Petugas PPPI membagikan surat pemberitahuan tentang Pemilu di Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4876, No. Negatif: 4)
- 641) Pelaksanaan Pemilihan Umum di Yogyakarta para petugas menjaga Kantor Panitia Pemilihan Kotapraja Yogyakarta yang berdampingan dengan kantor Kesatuan Penerangan Mobil Yogyakarta Kementerian Penerangan, 29 September 1955. (No. 4877, No. Negatif: 5)
- 642) Para petugas menjaga Kantor Panitia Pemilihan Kotapraja Yogyakarta yang berdampingan dengan kantor Kesatuan Penerangan Mobil Yogyakarta Kementerian Penerangan, 29 September 1955. (No. 4878, No. Negatif: 7)
- 643) Para petugas menjaga pengiriman surat suara di Yogyakarta. Tampak surat suara diangkut ke dalam truk, 29 September 1955. (No. 4879, No. Negatif: 8)
- 644) Para polisi dan tentara yang bertugas di Kantor Jawatan Penerangan DI Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4880, No. Negatif: 6)
- 645) Tumpukan surat suara sedang disortir menurut daerah-daerahnya sebelum dikirim ke berbagai TPS oleh Kantor Pemilihan Kotapraja Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4881, No. Negatif: 14)
- 646) Sebelum dimulainya pemungutan suara, pimpinan TPS Kemantren Wirodrajan memberi penjelasan penting, 29 September 1955. (No. 4882, No. Negatif: 12)
- 647) Pimpinan TPS Kemantren Wirobrajan menghitung kembali jumlah surat suara yang diterima, 29 September 1955. (No. 4883, No. Negatif: 15)

- 648) Panitia pemungutan suara memperlihatkan kotak suara yang kosong sebelum digunakan, 29 September 1955. (No. 4884, No. Negatif: 16)
- 649) Para petugas pemungutan suara sedang membicarakan tentang tugas-tugasnya, 29 September 1955. (No. 4885, No. Negatif: 11)
- 650) Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama para wartawan, meninjau berbagai TPS, 29 September 1955 (No. 4886, No. Negatif: 9)
- 651) Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama wartawan Kedaulatan Rakyat (di sebelah kiri) dan Pak Besoet (di sebelah kanan) membicarakan berbagai hal aneh dalam pemungutan suara, 29 September 1955. (No. 4887, No. Negatif: 20)
- 652) Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan para wartawan memperhatikan kerja panitia Pemilu, 29 September 1955. (No. 4888, No. Negatif: 19)
- 653) Para wartawan dan para petinggi Yogyakarta, mengikuti jalannya Pemilu, 29 September 1955. (No. 4890, No. Negatif: 17)
- 654) Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS Joyokusuman, Kemantren Keraton, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4891, No. Negatif: 67)
- 655) Warga Yogyakarta sedang mengantri untuk menukarkan surat pemberitahuan dengan surat suara di TPS Joyokusuman, Kemantren Keraton, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4892, No. Negatif: 27)
- 656) Suasana Pemilu, ada warga Yogyakarta sedang mengantri untuk menukarkan surat pemberitahuan dengan surat suara dan ada pula yang memasukan surat suara ke dalam kotak suara di TPS Joyokusuman, Kemantren Keraton, Yogyakarta, 29 September 1955 (No. 4894, No. Negatif: 47)
- 657) Warga Yogyakarta sedang mengantri untuk memasukkan surat suara dengan membawa anak mereka di TPS Joyokusuman, Kemantren Keraton, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4895, No. Negatif: 55)

- 658) Warga Yogyakarta sedang mengantri di halaman TPS untuk memasukkan surat suara dengan membawa anak mereka di TPS Joyokusuman, Kemantren Keraton, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4896, No. Negatif: 36)
- 659) Seorang bapak tua sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang dipandu oleh petugas pemungutan suara di TPS Ngabean, Kemantren Keraton, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4897, No. Negatif: 72)
- 660) Rumah Pangeran Ngabehi yang dijadikan TPS Kemantren Keraton, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4898, No. Negatif: 111)
- 661) Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paku Alam VIII sedang berjalan menuju TPS untuk memberikan suaranya di Kemantren Pakualaman, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4899, No. Negatif: 10)
- 662) Pimpinan TPS sedang memberi penjelasan sebelum penghitungan suara dimulai kepada para warga yang hadir di TPS Pakuningratan di Kemantren Keraton, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4900, No. Negatif: 104)
- 663) Seorang bapak sambil menggendong anaknya, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS, Ngabean Kemantren Keraton, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4901, No. Negatif: 82)
- 664) Petugas pemungutan suara TPS Kemantren Gondomanan, Yogyakarta telah mengeluarkan surat suara dari kotak suara, kotak suara terlihat kosong, 29 September 1955. (No. 4902, No. Negatif: 103)
- 665) Ketua TPS mengarahkan agar penghitungan surat suara dilakukan secara teliti di TPS Kemantren Gondomanan, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4903, No. Negatif: 96)
- 666) Surat suara dihitung dan dicocokkan dengan jumlah pemilih di TPS Kemantren Gondomanan, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4904, No. Negatif: 100)

- 667) Surat suara ditumpuk setelah selesai dihitung di TPS Kemantren Gondomanan, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4905, No. Negatif: 101)
- 668) Ketua TPS mengarahkan agar sah tidaknya surat suara, dilakukan secara teliti di TPS Kemantren Gondomanan, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4906, No. Negatif: 102)
- 669) Para warga menyaksikan kegiatan para petugas pemungutan suara sebelum dimulainya penghitungan suara di TPS Kemantren Gondomanan, Yogyakarta, 29 September 1955 (No. 4907, No. Negatif: 106)
- 670) Para warga menyaksikan kegiatan para petugas pemungutan suara sebelum dimulainya penghitungan suara di TPS Kemantren Gondomanan, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4908, No. Negatif: 98)
- 671) Para petugas pemungutan suara sedang memeriksa surat suara yang telah dicoblos pemilih di TPS Kemantren Gondomanan, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4909, No. Negatif: 92)
- 672) Para petugas pemungutan suara sedang memeriksa surat suara yang telah dicoblos pemilih di TPS Kemantren Gondomanan, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4910, No. Negatif: 89)
- 673) Para petugas pemungutan suara sedang menghitung suara yang sah dan tidak untuk dihitung di TPS Kemantren Gondomanan, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4911, No. Negatif: 90)
- 674) Tampak dari kejauhan Rumah Sekolah Rakyat yang dijadikan TPS Kemantren Gondomanan, di Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4912, No. Negatif: 99)
- 675) Para warga mengantri untuk menukarkan surat suara kepada para petugas di TPS Kemantren Wirobrajan, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4913, No. Negatif: 26)
- 676) Para warga mengantri untuk menukarkan surat suara di TPS Kemantren Wirobrajan, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4914, No. Negatif: 39)

- 677) Petugas pemungutan suara sedang mencocokkan surat pemberitahuan dengan daftar penduduk di TPS Kemantren Jetis, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4915, No. Negatif: 22)
- 678) Para warga sedang menunggu giliran menukarkan surat pemberitahuan dengan surat suara di TPS Kemantren Jetis, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4916, No. Negatif: 29)
- 679) Angin berputar (lesus dalam bahasa Jawa) menghentikan sementara kegiatan pemungutan suara di TPS Kemantren Jetis, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4917, No. Negatif: 37)
- 680) Suasana pemungutan suara di TPS Kemantren Jetis, Yogyakarta. Tampak seorang ibu sedang menerima surat suara, dan ada pula seorang ibu yang memasukkan surat suara ke kotak suara, 29 September 1955. (No. 4918, No. Negatif: 41)
- 681) Para warga berkerumun di depan meja petugas pemungutan suara untuk menukarkan surat pemberitahuan dengan surat suara di TPS Kemantren Jetis, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4919, No. Negatif: 51)
- 682) Aktivitas para warga dalam pemungutan suara, ada yang di bilik suara dan ada pula yang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS Kemantren Jetis, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4920, No. Negatif: 65)
- 683) Wanita meninggalkan bilik suara menuju kotak suara di TPS Kemantren Jetis, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4922, No. Negatif: 66)
- 684) Seorang wanita memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dengan bantuan petugas di TPS Kemantren Jetis, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4924, No. Negatif: 76)
- 685) Papan penunjuk jalan masuk ke dalam TPS Kemantren Jetis, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4925, No. Negatif: 110)
- 686) Papan penunjuk jalan ke luar TPS Kemantren Jetis, Yogyakarta. TPS Kemantren Jetis menggunakan Panti Pemuda di Jl. Gondolayu, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4926, No. Negatif: 109)

- 687) Dua orang zuster (biarawati Katholik) sedang menukarkan surat pemberitahuan dengan surat suara di TPS Kemantren Gondokusuman, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4927, No. Negatif: 45)
- 688) Seorang zuster (biarawati Katholik) sedang memasukkan surat suara di TPS Kemantren Gondokusuman, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4930, No. Negatif: 71)
- 689) Seorang warga tuna netra sedang mencoblos surat suara dengan dibantu petugas pemungutan suara di TPS Kemantren Ambarukmo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4931, No. Negatif: 58)
- 690) Seorang warga tunanetra sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dengan dibantu petugas pemungutan suara di TPS Kemantren Ambarukmo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4932, No. Negatif: 74)
- 691) Seorang ibu dengan menggendong anak bayi sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS Kemantren Wirogunan, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4933, No. Negatif: 85)
- 692) Seorang nenek sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS Kemantren Wirogunan, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4934, No. Negatif: 86)
- 693) Para petugas pemungutan suara sedang menghitung surat suara yang disaksikan para warga sampai malam di TPS Kemantren Wirogunan, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4935, No. Negatif: 105)
- 694) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS Lembaga Pemasyarakatan (Rumah Penjara) di Wirogunan, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4936, No. Negatif: 13)
- 695) Para petugas TPS sedang memeriksa dan menghitung surat suara di TPS Ngupasan Kemantren, Gondomanan, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4937, No. Negatif: 91)
- 696) Para petugas mulai memeriksa dan menghitung surat suara di TPS Ngupasan Kemantren Gondomanan, Yogyakarta. Tampak para petugas

- tertawa melihat keganjilan pencoblosan pada surat suara, 29 September 1955. (No. 4938, No. Negatif: 93)
- 697) Seorang ibu sedang menukarkan surat pemberitahuan dengan surat suara di TPS, 29 September 1955. (No. 4939, No. Negatif: 21)
- 698) Para petugas pemungutan suara Kabupaten Sleman (memakai caping) sedang melaksanakan tugasnya, 29 September 1955. (No. 4940, No. Negatif: 23)
- 699) Para petugas pemungutan suara mencocokkan surat pemberitahuan dengan daftar penduduk. Tampak para WNI keturunan Tionghoa menggunakan hak pilihnya di TPS, 29 September 1955. (No. 4942, No. Negatif: 25)
- 700) Suasana di salah satu TPS, tampak warga Yogyakarta mengantri untuk menukarkan surat pemberitahuan dengan surat. Tampak pula para petugas keamanan menjaga jalannya pemungutan suara, 29 September 1955. (No. 4944, No. Negatif: 30)
- 701) Antrian warga Yogyakarta yang akan memberikan suara di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4947, No. Negatif: 33)
- 702) Salah seorang tentara sedang membantu jalannya pemungutan suara di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4949, No. Negatif: 35)
- 703) Sebelum diberikan kepada pemilih, surat suara terlebih dahulu dilihat cacat atau tidak di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955 (No. 4950, No. Negatif: 42)
- 704) Para pemilih, dipersilahkan masuk ke dalam bilik suara oleh petugas pemungutan suara di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955 (No. 4953, No. Negatif: 43)
- 705) Warga Yogyakarta mengantri untuk menyerahkan surat suaranya. Petugas pemungutan suara sedang memeriksa cacat atau tidaknya surat pemberitahuan warga di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4954, No. Negatif: 44)
- 706) Petugas pemungutan suara sedang meneliti dan mengatur daftar penduduk agar proses pemungutan suara dapat berjalan lancar di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4955, No. Negatif: 49)

- 707) Warga Yogyakarta sedang menunggu pemberian surat suara di depan meja petugas pemungutan suara di TPS, Yogyakarta 29 September 1955. (No. 4956, No. Negatif: 50)
- 708) Warga Yogyakarta mengantri mendapatkan surat suara selanjutnya menuju bilik suara untuk memberikan hak pilihnya di TPS, Yogyakarta 29 September 1955. (No. 4957, No. Negatif: 53)
- 709) Seorang nenek menuju bilik suara untuk memberikan hak suaranya di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4958, No. Negatif: 54)
- 710) Ki Hajar Dewantoro sedang memberikan hak suaranya di bilik suara di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4959, No. Negatif: 56)
- 711) Nyi Hajar Dewantara sedang memberikan hak suaranya di bilik suara di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4960, No. Negatif: 57)
- 712) Seorang juru foto sedang memberikan hak suaranya di bilik suara di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4961, No. Negatif: 59)
- 713) Seorang ibu sedang memberikan hak suaranya di bilik suara di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4962, No. Negatif: 60)
- 714) Seorang ibu sedang mencoblos tanda gambar pada surat suara di bilik suara, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4963, No. Negatif: 61)
- 715) Seorang ibu sedang memberikan hak suaranya di bilik suara di TPS, Yogyakarta. Tampak seorang anak yang ikut ibunya ke bilik suara, 29 September 1955. (No. 4965, No. Negatif: 63)
- 716) Seorang anggota Angkatan Perang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4966, No. Negatif: 69)
- 717) Seorang kakek memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4967, No. Negatif: 73)
- 718) Seorang petugas memeriksa betul tidaknya lipatan surat suara sebelum dimasukkan oleh seorang wanita ke dalam kotak suara di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4969, No. Negatif: 78)
- 719) Seorang wanita Tionghoa memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4970, No. Negatif: 79)

- 720) Para warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4972, No. Negatif: 81)
- 721) Seorang wanita lansia dibantu petugas, dituntun menuju bilik suara di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4975, No. Negatif: 88)
- 722) Seorang petugas menuntun seorang wanita lansia yang telah memasukkan surat suara di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4976, No. Negatif: 87)
- 723) Papan pengumuman yang berisi pengumuman hasil Pemilu TPS wilayah Kemantren Danurejan di tepi jalan Malioboro. Tampak para warga melihat dan mencatat hasilnya, 29 September 1955. (No. 4978, No. Negatif: 107)
- 724) Seorang pedagang pada hari Pemilihan Umum di pasar Kranggan Yogyakarta. Tampak hanya seorang pedagang yang berjualan di pasar Kranggan, 29 September 1955 (No. 4980, No. Negatif: 112)
- 725) Tebu-tebu yang tidak dijaga pedagangnya di pasar Kranggan karena pedagangnya memberikan hak suaranya di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4981, No. Negatif: 113)
- 726) Seorang petugas sedang memperhatikan surat suara dengan bergambar lambang-lambang partai politik sebelum dicoblos, 29 September 1955. (No. 4988, No. Negatif: 52)
- 727) Para petugas mulai memeriksa dan menghitung surat suara di TPS, Yogyakarta. Tampak para petugas tercengang melihat surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar, 29 September 1955. (No. 4989, No. Negatif: 94)
- 728) Para warga mencatat hasil pemungutan suara di TPS, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4990, No. Negatif: 95)
- 729) Para petugas keamanan yang bersiap-siap berangkat untuk menjaga keamanan pada hari Pemilihan Umum di Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4992, No. Negatif: 121)
- 730) Para petugas keamanan yang menjaga dan mengantar surat suara ke Kantor Pemilihan Kotapraja Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 4993, No. Negatif: 120)

- 731) Para petinggi sipil, petinggi militer dan Ketua Panitia setempat, sebelum konvoi mengantarkan surat suara ke Semarang, Jawa Tengah, 29 September 1955 (No. 4995, No. Negatif: 123)
- 732) Para tentara bersiap-siap akan mengantarkan surat suara ke Semarang, Jawa Tengah, 29 September 1955. (No. 4996, No. Negatif: 122)
- 733) Penyerahan hadiah kepada pemenang lomba mengarang lagu Pemilihan Umum di Kegiatan Jawatan Penerangan DI Yogyakarta. Perlombaan ini diketuai oleh Kepala Japendi Yogyakarta, 29 September 1955 (No. 4999, No. Negatif: 127)
- 734) Pertemuan antara Jawatan Penerangan DI Yogyakarta dan berbagai Jawatan Penerangan Kabupaten Yogyakarta. Dalam pertemuan ini, dilaporkan tentang hasil pemilihan umum pada masing-masing daerah, 29 September 1955. (No. 5001, No. Negatif: 129)
- 735) Suasana jalan raya di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta tampak ramai di hari pemilihan umum pada hari itu, 29 September 1955. (No. 5002, No. Negatif: 2)
- 736) Masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta sedang antri melakukan pemungutan suara untuk memilih anggota parlemen, 29 September 1955. (No. 5003, No. Negatif: 4)
- 737) Para pemilih wanita sedang menunggu penghitungan suara pada pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5004, No. Negatif: 6)
- 738) Masyarakat Gunung Kidul sedang menunggu saat-saat penghitungan suara hasil pemilihan umum di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5005, No. Negatif: 7)
- 739) Suasana pemilihan umum di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5006, No. Negatif: 23)
- 740) Para warga sedang mengantri di TPS Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5007, No. Negatif: 5)
- 741) Bilik suara yang digunakan pada salah satu TPS di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta pada hari pelaksanaan pemilihan umum, 29 September 1955. (No. 5008, No. Negatif: 10)

- 742) Salah satu TPS di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta saat pelaksanaan pemilihan umum, 29 September 1955. (No. 5009, No. Negatif: 11)
- 743) Dua orang wanita sedang mencoblos tanda gambar pada surat suara di bilik-bilik suara pada salah satu TPS di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5010, No. Negatif: 14)
- 744) Para warga sedang mencoblos surat suara pada bilik-bilik suara di salah satu TPS di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5011, No. Negatif: 16)
- 745) Surat suara para pemilih dikeluarkan dari kotak suara di salah satu TPS Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta untuk dihitung perolehannya, 29 September 1955. (No. 5015, No. Negatif: 20)
- 746) Masyarakat ikut menyaksikan penghitungan surat suara pada salah satu TPS di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5016, No. Negatif: 19)
- 747) Seorang anggota petugas keamanan sedang menuntun sepedanya mengelilingi daerah pada hari pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5017, No. Negatif: 21)
- 748) Dua orang anggota petugas keamanan sedang melakukan patroli keamanan dengan mengendarai sepeda pada hari pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5018, No. Negatif: 22)
- 749) Para anggota petugas keamanan sedang menjaga ketertiban pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5019, No. Negatif: 25)
- 750) Peti kayu yang berisi surat suara diturunkan dari truk ke salah satu TPS dengan mendapat penjagaan dari seorang anggota petugas keamanan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5020, No. Negatif: 10)
- 751) Suasana pelaksanaan pemilu pada salah satu TPS di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5021, No. Negatif: 1)

- 752) Para warga mengantri menuju bilik suara untuk menggunakan hak suara mereka pada salah satu TPS di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5023, No. Negatif: 2)
- 753) Seorang warga sedang mencoblos di bilik suara pada salah satu TPS di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5025, No. Negatif: 4)
- 754) Seorang petugas memperhatikan seorang tentara yang memasukkan surat suara pada salah satu TPS di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5026, No. Negatif: 5b)
- 755) Para petugas mengeluarkan surat suara dari kotak suara yang diletakan di atas meja untuk dihitung perolehan suaranya pada salah satu TPS di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5028, No. Negatif: 6a)
- 756) Para petugas memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong setelah surat suara dikeluarkan di atas meja untuk dihitung perolehan suaranya pada salah satu TPS di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5029, No. Negatif: 6b)
- 757) Para petugas menyusun dan merapikan surat suara di atas meja pada salah satu TPS di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, 29 September 1955. (No. 5030, No. Negatif: 8)
- 758) Aktivitas warga di salah satu pasar daerah Gunung Kidul saat pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota konstituante, 15 Desember 1955. (No. 5127, No. Negatif: 2)
- 759) Pengumuman hasil pemungutan suara untuk anggota Konstituante akan diumumkan pada hari Jumat 30 Desember 1955, pukul 09.00 di halaman Kantor Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, 15 Desember 1955. (No. 5128, No. Negatif: 1)
- 760) Para warga Kecamatan Wonosari sedang menunggu panggilan untuk melakukan pemungutan suara pada Pemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituante Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, 15 Desember 1955. (No. 5131, No. Negatif: 4)

- 761) Seorang anggota petugas keamanan sedang menjaga para warga Kecamatan Wonosari untuk melaksanakan pemungutan suara pada Pemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituante di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, 15 Desember 1955. (No. 5133-5142, No. Negatif: 5-14)
- 762) Seorang warga Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul bersiap-siap masuk ke bilik suara pada pemungutan suara pada Pemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituante di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, 15 Desember 1955. (No. 5143, No. Negatif: 13)
- 763) Para warga Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta sedang menunggu panggilan dari petugas KPPS untuk memberikan suaranya pada pemilu untuk memilih anggota Konstituante di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, 15 Desember 1955. (No. 5144-5147, No. Negatif: 16, 18, 20, 21)
- 764) Para warga sedang duduk di sekitar sebuah rumah Joglo untuk menunggu panggilan petugas KPPS di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, 15 Desember 1955. (No. 5149, No. Negatif: 26)
- 765) Para petugas KPPS sedang memeriksa surat suara pada Pemilihan Umum untuk Konstituante Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, 15 Desember 1955. (No. 5150-5152, No. Negatif: 19, 28)
- 766) Para petugas KPPS sedang mengatur besek-besek tempat kartu suara pada Pemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituante di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, 15 Desember 1955. (No. 5153, No. Negatif: 27)
- 767) Para anggota petugas keamanan sedang mengamankan pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih Konstituante Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, 15 Desember 1955. (No. 5155, No. Negatif: 23)
- 768) Pendaftaran Calon anggota DPRD Panitia Pemilihan Daerah (PPD) sedang menerima pendaftaran calon DPRD di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, 08 Agustus 1957. (No. 7313-7319, No. Negatif: 1-7)

- 769) Poster Pemilihan Umum Anggota DPRD Yogyakarta, 09 Agustus 1957 (No. 7320)
- 770) Pemilu Anggota DPRD Yogyakarta (I) Ketua Panitia Pemungutan Suara sedang membuka pelaksanaan pemungutan suara dengan mengecek berbagai perlengkapan di hadapan Saksi dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPRD Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8114, No. Negatif: 1)
- 771) Pengecekan kotak suara di hadapan saksi dan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPRD Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8115, No. Negatif: 2)
- 772) Pengecekan kertas lembar Suara di hadapan saksi dan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPRD Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8117-8119, No. Negatif: 4-6)
- 773) Sri Sultan Hamengku Buwono IX sedang melaksanakan hak pilihnya di TPS untuk memilih anggota DPRD di Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8120, No. Negatif: 7)
- 774) Sri Paku Alam VIII sedang melaksanakan hak pilihnya di TPS untuk memilih anggota DPRD di Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8121, No. Negatif: 8)
- 775) Seorang pejabat daerah sedang melaksanakan hak pilihnya di TPS untuk memilih anggota DPRD di Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8122, No. Negatif: 9)
- 776) Suasana warga masyarakat Yogyakarta sedang melaksanakan hak pilihnya di TPS untuk memilih anggota DPRD di Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8123 - 8124, No. Negatif: 10-11)
- 777) Sri Paku Alam VIII sedang mengecek para anggota TPS dalam pelaksanaan pemilihan anggota DPRD di Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8125, No. Negatif: 12)
- 778) Suasana warga masyarakat Yogyakarta sedang melaksanakan hak pilihnya di TPS untuk memilih anggota DPRD di Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8126, No. Negatif: 13)

- 779) Suasana warga masyarakat Yogyakarta sedang melaksanakan hak pilihnya di TPS untuk memilih anggota DPRD di Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8127, No. Negatif: 14)
- 780) Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan kepala Japen DIY sedang menyaksikan pelaksanaan pemilihan Anggota DPRD di Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8128, No. Negatif: 15)
- 781) Suasana warga masyarakat Yogyakarta sedang melaksanakan hak pilihnya di TPS untuk memilih anggota DPRD di Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8129-8131, No. Negatif: 16-18)
- 782) Sri Paku Alam VIII dan pejabat Daerah sedang menyaksikan pelaksanaan pemilihan Anggota DPRD di Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8132, No. Negatif: 19)
- 783) Pemilu Anggota DPRD Yogyakarta (II) Suasana warga masyarakat Yogyakarta sedang melaksanakan hak pilihnya di TPS untuk memilih anggota DPRD di Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8134-8137, No. Negatif: 21-24)
- 784) Sri Paku Alam VIII dan para pejabat daerah sedang berjalan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPRD di Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8138, No. Negatif: 25)
- 785) Sri Paku Alam VIII sedang memasukkan Kertas Suara di Kotak Suara untuk memilih anggota DPRD di Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8140, No. Negatif: 29)
- 786) Suasana warga masyarakat Yogyakarta sedang melaksanakan hak pilihnya di TPS untuk memilih anggota DPRD di Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8149, No. Negatif: 38)
- 787) Anggota TPS sedang melakukan penghitungan suara dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPRD di Yogyakarta, 11 November 1957. (No. 8150, No. Negatif: 39)

Sekretariat Negara RI 1966-1989

- 788) Presiden Suharto sedang memberikan suaranya di TPS II Kelurahan Gondangdia, Jakarta Pusat pada pemilu tahun 1987. (No. 2830)

- 789) Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH akan memasukkan kartu suara di TPS II Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada pemilihan umum 1987. (No. 2831-2832)
- 790) Presiden Suharto sedang menyaksikan penghitungan suara hasil pemilu tahun 1987 di rumah kediaman Jl. Cendana, Jakarta, 24 April 1987. (No. 2838-2841)

c. Arsip Film

Daftar Film Gelora Indonesia (FL 25)

- 791) No Film GI : 226
 File : Rakyat Indonesia Memilih
 Type : Released
 Produksi : 1955
 Isi :
 Suasana Jakarta menjelang pemilu; Rakyat dan pemimpin menuju TPS; Pemungutan suara dimulai dengan pidato; Presiden dan Wakil Presiden, Perdana Menteri bersama sama rakyat memilih; Orang-orang tua, sakit dan pemungutan suara di penjara; Penghitungan suara dan pengangkutan kotak suara.
- 792) Film GI : 227
 File : Pemungutan Suara
 Type : Released
 Produksi : 1955
 Isi :
 Pemungutan suara di Penjara Kalisosok, Surabaya; Pemungutan suara oleh kaum ibu dengan anak, dan seorang pemilih buta di Semarang; TPS di Rumah Lembaga Orang Buta di Bandung; Gubernur Winarno memilih di Palembang dan TPS di daerah Minyak; Sepanjang Sungai Barito di Banjarmasin; Kedatangan surat suara yang dikawal di Makasar; Pinggir kota Kotaraja; Suasana di Bali.
- 793) Film GI : 229
 File : Berita Angkatan Perang

Type : Released

Produksi : 1955

Isi :

Pemungutan Suara oleh anggota-anggota Angkatan Perang yang dahulu bertugas di dua TPS terdekat.

794) Film GI : 235

File : Sekitar Pemilihan Umum

Type : Released

Produksi : 1956

Nomor Reproduksi : DVD RK 178, RK 319

Isi :

Sekitar Pemilihan Umum; Ketua PPI memilih dan memeriksa; Jaksa Agung, Presiden Sukarno dan Ibu Fatmawati memilih; Pemilihan di Madura, Yogyakarta, dan Solo; Apel besar di Bandung dan Cimahi.

PPFN: Seri Gelora Pembangunan 1978-1983

795) Nomor : Gelora Pembangunan 203

Nomor Kaset : DVD No. 166; 220, BC 166

Track : 1

Judul : Sidang Umum MPR 1978 dan Pelantikan
Presiden - Wakil Presiden 11-25 Maret 1978

Durasi : 11'48''

Tahun Produksi : 1978

Narasi : Bahasa Indonesia

Warna : Berwarna

Produksi : PPN

Copyright : PPN

Format : DVD

Sinopsis :

Pelaksanaan pemilu 1977 di Jakarta, Sidang Umum MPR tahun 1978 dan pelantikan Jenderal (Purn.) Suharto dan H. Adam Malik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI

Video TVRI Tahun 1982 Format *Umatic* (Pembuatan 2011)

- 796) Nomor : 93
File : Berita Nasional
Nomor Kaset : C. XV.C.61.20.040682. VC.482
Time Code : 08:02 - 09:45
Isi :
Gubernur Kalimantan Timur, J. Ari Suparjan memimpin rapat perhitungan suara hasil Pemilu 1982 yang dikirim dari DPP 2 se-Kalimantan Timur.

Video TVRI Tahun 1982 (Format *Umatic*)

- 797) Nomor : 34
File : Siaran Ulang
Nomor Kaset : C.XV.a.46.VC.555 E (20.160882)
Time Code : 01:15
Isi : *Flash Back* Pemilu tahun 1982 di 27 provinsi.
- 798) Nomor : 35
File : Siaran Ulang
Nomor Kaset : C.XV.a.46.VC.555 E (20.160882)
Time Code : 01:59
Isi : Sistem multi partai dalam pelaksanaan pemilu.

Video TVRI Tahun 1982 Format *Umatic* (Pembuatan 2013)

- 799) Nomor : 929
File : Siaran Khusus (Politik)
Nomor Kaset : C.XV.d.18 VC.601.C, 20.011082
Time Code : 00.01 - 25.20
Isi :
Peliputan Suasana pesta demokrasi Indonesia:
- Liputan pemungutan suara oleh presiden Suharto dan Ibu Tien;
Wakil Presiden Adam Malik dan istri melakukan pemungutan

- suara di kelurahan menteng; pemilu bagi para pasien di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM).
- Pendapat Gubernur Timor Timur oleh I Guilherme Maria Goncalves; Pendapat Wakil Gubernur DIY oleh Sri Paku Alam VIII; penduduk Irian Barat; dan pendapat Menhankam oleh M. Yusuf.
 - Penjelasan penghitungan suara pemilu 1982 Wakil Sekretaris Umum LPU oleh Ibnu Saleh.
 - Proses penghitungan Pemilu melalui komputer .
 - Penetapan hasil pemilu anggota DPR oleh Ketua LPU Amir Mahmoed, PPP mendapat 94 Kursi, Golkar mendapat 242 kursi, PDI mendapat 24 kursi.
 - Suasana Pemilu di berbagai daerah di Indonesia.

VCD Komisi Pemilihan Umum

- 800) Nomor : 15
- Sub Masalah : Monologis dan Kampanye Seluruh Indonesia
- Tahap : III Pemungutan Suara (05 Juni - 24 Juli 1999)
- Masa Putar : 00.31.55
- Masa Putar : Menit
- Warna : Berwarna
- Narasi : Bahasa Indonesia
- Produksi : Komisi Pemilihan Umum
- Tahun Produksi : 1999
- Sinopsis :
- Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan adil termasuk mensosialisasikan tanda gambar (Menit :00.00.01 s/d 00.02.16)
 - Jakarta dalam keadaan lengang dan atribut sudah dibersihkan (Menit: 00.02.16 s/d 00.06.14)

- Pemilihan Umum tinggal dua hari lagi, masyarakat mulai menyiapkan bilik-bilik suara di tempat masing-masing (Menit: 00.06.14 s/d 00.08.17)
- Kapolda Metro Jaya mengadakan gelar pengamanan pasukan untuk mengamankan TPS yang tersebar di wilayah Jabotabek (Menit: 00.08.17 s/d 00.10.33)
- Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara 7 Juni 1999 (Menit: 00.10.33 s/d 00.16.40)
- Setelah memberikan hak suaranya, Presiden dan Ibu Hasri Habibie melakukan kunjungan ke beberapa lokasi TPS di Jakarta Pusat (Menit: 00.16.40 s/d 00.16.46)
- Di TPS 02 Gondangdia Mantan Presiden Suharto dan keluarga menggunakan hak pilihnya (Menit: 00.16.46 s/d 00.17.54)
- Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri menggunakan hak suaranya di TPS 18 Kebagusan Pasar Minggu (Menit: 00.17.54 s/d 00.18.40)
- Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung memberikan hak suaranya di TPS 2 Kelurahan Senayan Kebayoran Baru (Menit: 00.18.40 s/d 00.19.20)
- Ketua Umum PPP Hamzah Haz dan keluarga memberikan hak suaranya di TPS 18 Tegalan Matraman Jakarta Timur (Menit: 00.19.20 s/d 00.19.56)
- Ketua MPR Harmoko dan Mendagri Syarwan Hamid melakukan pemberian suara di Komplek Widya Candra Jakarta (Menit: 00.19.56 s/d 00.20.43)
- Presiden BJ. Habibie menilai penyelenggaraan Pemilu hari ini terlaksana dengan tenang, aman dan sesuai dengan peraturan demokratisasi meski persiapannya dilakukan dalam waktu yang relatif singkat (Menit: 00.20.43 s/d 00.20.58)
- Pelaksanaan Pemilu 1999 dinilai oleh Tim Pencari Fakta pelanggaran Pemilu di Timor-Timur sebagai hal yang menggembirakan karena hampir seluruh pemilih di Timor-

- Timur mendaftarkan dari pemilu (Menit: 00.20.58 s/d 00.24.19)
- Daftar dugaan pelanggaran yang didapat tim liputan TVRI dari Panwaslu antara lain di Wonosari adanya serangan fajar oleh ketua DPD salah satu Parpol (Menit: 00.24.19 s/d 00.29.50)
 - Di Kabupaten Bolaang Mongondow 54 kertas suara sudah dicoblos sebelum dilipat dan dibagikan kepada milih serta perhitungan suara di malam hari menggunakan lilin (Menit: 00.29.50 s/d 00.31.09)
 - Sorotan TVRI: secara umum pemilu saat ini dinilai lebih baik dibandingkan pemilu di waktu yang lalu, setidaknya kebebasan untuk menentukan pilihan partai yang akan dicoblos semakin terjamin (Menit: 00.31.09 s/d 00.31.55)

4. Penetapan Hasil

a. Arsip Tekstual

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959

- 801) Berkas mengenai upacara pelantikan Konstituante di Bandung pada 10 November 1956. 6 September 1956, asli, 1 sampul. (No. 3762)

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 Jilid II

- 802) Surat-surat mengenai jumlah suara dan pembagian kursi di DPR dan pemerintahan. 2 Januari 1956, asli, tembusan, 1 sampul. (No. 1131)
- 803) Surat dari perdana menteri kepada presiden mengenai pengangkatan sumpah anggota dan pelantikan Konstituante, nb. beserta lampiran. 31 Oktober 1956, pertinggal, 1 sampul. (No. 2448)

Kabinet Presiden RI 1950-1959

- 804) Surat-surat pernyataan Ormas tentang tuntutan diumumkan hasil pemilu dan pemungutan suara, 29 September 1955-1 Maret 1956 , asli, 2 lembar. (No. 993)

- 805) Surat-surat Ketua Panitia Pemeriksaan kepada Presiden RI tentang keputusan-keputusan panitia mengenai penentuan penerimaan terpilih sebagai anggota Konstituante, dengan lampiran. 17 Mei - 20 Desember 1956 asli, tembusan, 1 sampul. (No. 1006).

Konstituante 1956-1960

- 806) Laporan ke-26 Panitia Pemeriksaan tentang penentuan penerimaan para terpilih menjadi anggota Konstituante. 1956-1959, 1 sampul. (No.11)

Sekretariat Negara: Seri Pidato Presiden Suharto 1966-1998

- 807) Naskah-naskah pidato mengenai pengambilan sumpah/janji para anggota DPR dan MPR. 1 Oktober 1977, 1982, 1992 dan 1997, asli, 5 sampul. (No. 313.1-313.4)

Nahdlatul Ulama 1948-1979

- 808) Surat-surat mengenai hasil Pemilu 1955, 1971, dan 1977 di beberapa daerah. 12 Oktober 1955 - 4 November 1977, salinan, tembusan, 1 sampul. (No. 2309)

Setwapres Sri Sultan Hamengku Buwono IX 1973-1978

- 809) Surat Woeryaningrat kepada presiden tentang tanggapan terhadap berakhirnya sidang umum MPR hasil pemilu bulan Maret 1973. 9 Mei 1973, tembusan, 2 lembar. (No.478)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1971-1999

- 810) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 1971 -1997, asli, fotokopi, lampiran, 10 jilid (No.001 s.d 006)
- 811) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Banda Aceh tahun 1977 -1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.007 s.d 011)
- 812) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Sabang tahun 1982 - 1997, asli, 3 jilid (No.012 s.d 014)

- 813) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Aceh Selatan tahun 1977 -1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.015 s.d 018)
- 814) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Aceh Tengah tahun 1977 -1997, asli, fotokopi, 7 jilid (No.019 s.d 023)
- 815) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pidie tahun 1977 - 1997, asli, fotokopi, 7 jilid (No.024 s.d 028)
- 816) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Aceh Timur tahun 1982 -1997, asli, 3 jilid (No.029 s.d 031)
- 817) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Aceh Barat tahun 1982 -1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.032 s.d 034)
- 818) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 1987, asli, 1 jilid (No.035)
- 819) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Aceh Utara tahun 1987 - 1997, fotokopi, 5 jilid (No.036 s.d 038)
- 820) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Aceh Besar tahun 1987 - 1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.039 s.d 040)
- 821) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Sumatera Utara tahun 1982 -1997, asli,fotokopi, 8 jilid (No.042 s.d 045)
- 822) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Pematang Siantar tahun 1977 -1997, asli,fotokopi, 6 jilid (No.046 s.d 049)
- 823) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Tanjung Balai tahun 1977 -1997, asli,fotokopi, 5 jilid (No.050 s.d 053)
- 824) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Binjai tahun 1982 - 1997, asli, 3 jilid (No.054 s.d 056)
- 825) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Sibolga tahun 1987 -1992, asli,fotokopi, 5 jilid (No.057 s.d 059)
- 826) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Medan tahun 1987 - 1997, fotokopi, 4 jilid (No.060 s.d 062)
- 827) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Tebing Tinggi tahun 1992, 1997, asli, 2 jilid (No.063 s.d 064)
- 828) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Deli Serdang tahun 1977 -1997, fotokopi, 4 jilid (No.065 s.d 068)

- 829) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 1977 -1992, asli, fotokopi, 5 jilid (No.069 s.d 072)
- 830) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Asahan tahun 1977 - 1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.073 s.d 076)
- 831) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Labuhan Batu tahun 1977 -1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.077 s.d 079)
- 832) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Karo tahun 1977 - 1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.080 s.d 084)
- 833) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Binjai tahun 1977, asli, 1 jilid (No.085)
- 834) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tebing Tinggi tahun 1977, asli, 1 jilid (No.086)
- 835) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Nias tahun 1982, 1987, fotokopi, 3 jilid (No.087 s.d 088)
- 836) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Dairi tahun 1987 - 1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.089 s.d 091)
- 837) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Langkat tahun 1987 - 1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No 092 s.d 094)
- 838) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 1987 -1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.095 s.d 097)
- 839) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 1992 -1997, asli, fotokopi, 7 jilid (No.098 s.d 099)
- 840) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tanjung Balai tahun 1992, asli, 1 jilid (No.100)
- 841) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Nias tahun 1992 - 1997, asli, 2 jilid (No 101 s.d 102)
- 842) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Simalungun tahun 1997, asli, 2 jilid (No 103)
- 843) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Sumatera Barat tahun 1982 -1997, asli, fotokopi, 7 jilid (No 103 s.d 108)
- 844) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Bukittinggi tahun 1977 -1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No 109 s.d 112)

- 845) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Padang Panjang tahun 1982 -1997, asli, 5 jilid (No 113 s.d 116)
- 846) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Padang tahun 1982 - 1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No 117 s.d 120)
- 847) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Tanah Datar tahun 1982, asli, 1 jilid (No 121)
- 848) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Solok tahun 1987 - 1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No 122 s.d 124)
- 849) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Payakumbuh tahun 1987 -1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No 125 s.d 127)
- 850) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Sawahlunto tahun 1987 -1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No 128 s.d 131)
- 851) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tanah Datar tahun 1977 -1992, asli, fotokopi, 3 jilid (No.132 s.d 134)
- 852) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sawahlunto tahun 1987 -1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.135 s.d 137)
- 853) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Padang Pariaman tahun 1987 -1992, asli, fotokopi, 2 jilid (No.138 s.d 139)
- 854) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pasaman tahun 1987 -1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.140 s.d 142)
- 855) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Limapuluh Kota tahun 1987 -1997,fotokopi, 4 jilid (No.143 s.d 145)
- 856) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Agam tahun 1987 - 1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.146 s.d 148)
- 857) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Solok tahun 1992 - 1997, asli, 3 jilid (No.149 s.d 150)
- 858) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 1987 -1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.151 s.d 153)
- 859) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Jambi tahun 1977 - 1997, asli, fotokopi, 9 jilid (No.154 s.d 158)
- 860) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Jambi tahun 1977 - 1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.159 s.d 164)

- 861) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sarolangun Bangko tahun 1977 -1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.165 s.d 169)
- 862) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Batang Hari tahun 1977 -1992, asli, fotokopi, 4 jilid (No.170 s.d 173)
- 863) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kerinci tahun 1982 - 1997, asli, 4 jilid (No.174 s.d 177)
- 864) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tanjung Jabung tahun 1987 -1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.178 s.d 180)
- 865) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bungo Tebo tahun 1987 -1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.181 s.d 183)
- 866) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Riau tahun 1992, asli, 1 jilid (No.184)
- 867) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Pangkal Pinang tahun 1987, asli, 1 jilid (No.185)
- 868) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kampar tahun 1982 - 1997, asli, 3 jilid (No.186 s.d 188)
- 869) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kepulauan Riau tahun 1982 -1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.189 s.d 191)
- 870) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 1982 -1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.192 s.d 194)
- 871) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bengkalis tahun 1992 -1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.195 s.d 196)
- 872) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 1992 -1997, asli, 3 jilid (No.197 s.d 198)
- 873) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pangkal Pinang 1992, asli, 1 jilid (No.199)
- 874) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Batam tahun 1997, asli, 1 jilid (No.200)
- 875) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pekanbaru tahun 1992 -1997, asli, 3 jilid (No.201 s.d 202)
- 876) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Sumatera Selatan tahun 1977 -1997, asli, fotokopi, 8 jilid (No.203 s.d 208)

- 877) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Musi Rawas tahun 1977, asli, 1 jilid (No.209)
- 878) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Ogan Komering Ulu tahun 1977, asli, 1 jilid (No.210)
- 879) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Pangkal Pinang tahun 1982-1997, asli, 4 jilid (No.211 s.d 213)
- 880) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Palembang tahun 1977-1997, asli, 5 jilid (No.214 s.d 217)
- 881) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 1977-1997, asli, 11 jilid (No.218 s.d 220)
- 882) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 1992-1997, asli, 3 jilid (No.221 s.d 222)
- 883) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 1977-1992, asli, fotokopi, 11 jilid (No.223 s.d 226)
- 884) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Lahat tahun 1977-1997, asli, 4 jilid (No.227 s.d 230)
- 885) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Muara Enim tahun 1987-1997, asli, 4 jilid (No.231 s.d 233)
- 886) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bangka tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.234 s.d 238)
- 887) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Belitung tahun 1992-1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.239 s.d 240)
- 888) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Musi Rawas tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.241 s.d 243)
- 889) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Bengkulu tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 10 jilid (No.244 s.d 250)
- 890) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Bengkulu tahun 1987-1992, fotokopi, 3 jilid (No.251 s.d 252)
- 891) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 1982-1992, fotokopi, 3 jilid (No.253 s.d 255)
- 892) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 1987, fotokopi, 1 jilid (No.256)

- 893) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Rejang Lebong tahun 1987-1997, fotokopi, 12 jilid (No.257 s.d 259)
- 894) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Lampung tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 11 jilid (No.260 s.d 264)
- 895) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Bandar Lampung tahun 1987-1997, fotokopi, 6 jilid (No.265 s.d 267)
- 896) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Lampung Tengah tahun 1982-1997, fotokopi, 7 jilid (No.268 s.d 271)
- 897) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Lampung Utara tahun 1982-1997, fotokopi, 8 jilid (No.272 s.d 275)
- 898) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Lampung Selatan tahun 1982-1997, fotokopi, 6 jilid (No.276 s.d 279)
- 899) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Lampung Barat tahun 1992-1997, fotokopi, 3 jilid (No.280 s.d 281)
- 900) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi DKI Jakarta tahun 1971-1997, asli, fotokopi, 12 jilid (No.282 s.d 288)
- 901) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Jakarta Pusat tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 7 jilid (No.289 s.d 292)
- 902) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Jakarta Timur tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.293 s.d 296)
- 903) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Jakarta Barat tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 2 jilid (No.297 s.d 298)
- 904) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Jakarta Selatan tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.299 s.d 304)
- 905) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Jakarta Utara tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.305 s.d 309)
- 906) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat tahun 1971-1998, asli, fotokopi, 20 jilid (No.310 s.d 327)
- 907) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Tangerang tahun 1997, fotokopi, 2 jilid (No.328)
- 908) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Bogor tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.329 s.d 333)

- 909) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Sukabumi tahun 1982-1997, asli, 5 jilid (No.334 s.d 337)
- 910) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Bandung tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 9 jilid (No.338 s.d 344)
- 911) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Cirebon tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.345 s.d 348)
- 912) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tasikmalaya tahun 1971-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.349 s.d 352)
- 913) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Serang tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.353 s.d 355)
- 914) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pandeglang tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.356 s.d 358)
- 915) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Lebak tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 7 jilid (No.359 s.d 361)
- 916) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tangerang tahun 1982-1992, asli, fotokopi, 3 jilid (No.362 s.d 364)
- 917) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bekasi tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 14 jilid (No.365 s.d 372)
- 918) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Karawang tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 8 jilid (No.373 s.d 375)
- 919) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Purwakarta tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.376 s.d 378)
- 920) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Indramayu tahun 1987-1997, asli, 4 jilid (No.379 s.d 381)
- 921) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Majalengka tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 9 jilid (No.382 s.d 384)
- 922) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kuningan tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.385 s.d 388)
- 923) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bogor tahun 1982-1997, asli, 4 jilid (No.389 s.d 392)
- 924) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sukabumi tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.393 s.d 396)

- 925) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Cianjur tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.397 s.d 400)
- 926) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bandung tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 10 jilid (No.401 s.d 403)
- 927) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Subang tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.404 s.d 407)
- 928) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sumedang tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 9 jilid (No.408 s.d 412)
- 929) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Garut tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.413 s.d 416)
- 930) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Ciamis tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.417 s.d 420)
- 931) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Cirebon tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 21 jilid (No.421 s.d 425)
- 932) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Jawa Tengah 1977-1997, asli, fotokopi, 10 jilid (No.426 s.d 431)
- 933) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Semarang tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.432 s.d 435)
- 934) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Surakarta tahun 1982-1997, fotokopi, 5 jilid (No.436 s.d 439)
- 935) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Salatiga tahun 1977-1997, asli, 6 jilid (No.440 s.d 444)
- 936) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Magelang tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.446 s.d 450)
- 937) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Pekalongan tahun 1977-1997, asli, 6 jilid (No.451 s.d 455)
- 938) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Tegal tahun 1977-1997, fotokopi, 5 jilid (No.456 s.d 459)
- 939) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Boyolali tahun 1977-1997, asli, 4 jilid (No.460 s.d 462)
- 940) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Semarang tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 7 jilid (No.463 s.d 467)

- 941) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Jepara tahun 1977-1997, fotokopi, 5 jilid (No.468 s.d 471)
- 942) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Grobogan tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.472 s.d 476)
- 943) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kendal tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 9 jilid (No.477 s.d 483)
- 944) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Brebes tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.484 s.d 488)
- 945) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pati tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.489 s.d 493)
- 946) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Rembang tahun 1977-1997, asli, 5 jilid (No.494 s.d 496)
- 947) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Banyumas tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 11 jilid (No.497 s.d 501)
- 948) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Banjarnegara tahun 1977-1997, asli, 5 jilid (No.502 s.d 505)
- 949) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Demak tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.506 s.d 510)
- 950) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sragen tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 7 jilid (No.511 s.d 516)
- 951) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Klaten tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 7 jilid (No.517 s.d 521)
- 952) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Wonogiri tahun 1977-1997, fotokopi, 7 jilid (No.522 s.d 526)
- 953) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pekalongan tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.527 s.d 530)
- 954) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tegal tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.531 s.d 534)
- 955) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Magelang tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.535 s.d 537)
- 956) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pemasang tahun 1982-1992, fotokopi, 5 jilid (No.538 s.d 541)

- 957) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Cilacap tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.542 s.d 545)
- 958) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Batang tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.546 s.d 548)
- 959) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Blora tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.549 s.d 552)
- 960) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Temanggung tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.553 s.d 556)
- 961) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kebumen tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.557 s.d 560)
- 962) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sukoharjo tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.561 s.d 564)
- 963) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Purworejo tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.565 s.d 567)
- 964) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Wonosobo tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.568 s.d 570)
- 965) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Purbolingga tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.571 s.d 574)
- 966) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kudus tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.575 s.d 578)
- 967) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Karang Anyar tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.579 s.d 581)
- 968) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi DI Yogyakarta tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.582 s.d 586)
- 969) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Yogyakarta tahun 1992-1997, asli, 4 jilid (No.587 s.d 589)
- 970) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bantul tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.590 s.d 593)
- 971) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sleman tahun 1987-1997, asli, 3 jilid (No.594 s.d 596)
- 972) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kulon Progo tahun 1992-1997, asli, 3 jilid (No.597 s.d 598)

- 973) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Gunung Kidul tahun 1992-1997, asli, 3 jilid (No.599 s.d 600)
- 974) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Jawa Timur tahun 1987-1997, asli, 6 jilid (No.601 s.d 603)
- 975) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Surabaya tahun 1987-1997, asli, 12 jilid (No.604 s.d 606)
- 976) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Kediri tahun 1982-1997, asli, 5 jilid (No.607 s.d 610)
- 977) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Malang tahun 1982-1997, asli, 4 jilid (No.611 s.d 614)
- 978) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Madiun tahun 1982-1997, asli, 4 jilid (No.615 s.d 618)
- 979) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Blitar tahun 1982-1997, asli, 4 jilid (No.619 s.d 622)
- 980) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Mojokerto tahun 1982-1997, asli, 4 jilid (No.623 s.d 626)
- 981) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Probolinggo tahun 1982, asli, 1 jilid (No.627)
- 982) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Pasuruan tahun 1992-1997, asli, 2 jilid (No.628 s.d 629)
- 983) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sidoarjo tahun 1982-1997, fotokopi, 5 jilid (No.630 s.d 633)
- 984) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Blitar tahun 1982-1997, fotokopi, 5 jilid (No.634 s.d 637)
- 985) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Malang tahun 1982-1997, fotokopi, 5 jilid (No.638 s.d 641)
- 986) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Mojokerto tahun 1987-1997, fotokopi, 4 jilid (No.642 s.d 644)
- 987) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Trenggalek tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.645 s.d 648)
- 988) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Probolinggo tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.649 s.d 651)

- 989) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.652 s.d 655)
- 990) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bondowoso tahun 1982-1997, fotokopi, 5 jilid (No.656 s.d 659)
- 991) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Jember tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.660 s.d 663)
- 992) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bojonegoro tahun 1982-1992, asli, fotokopi, 3 jilid (No.664 s.d 666)
- 993) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Situbondo tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 7 jilid (No.667 s.d 670)
- 994) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kediri tahun 1982-1997, fotokopi, 4 jilid (No.671 s.d 674)
- 995) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.675 s.d 678)
- 996) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Lumajang tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.679 s.d 682)
- 997) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Jombang tahun 1982-1992, fotokopi, 3 jilid (No.683 s.d 685)
- 998) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Gresik tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.686 s.d 690)
- 999) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Nganjuk tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.691 s.d 694)
- 1000) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Banyuwangi tahun 1982-1997, fotokopi, 6 jilid (No.695 s.d 698)
- 1001) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tuban tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.699 s.d 702)
- 1002) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Ngawi tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.703 s.d 706)
- 1003) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Lamongan tahun 1987-1997, fotokopi, 3 jilid (No.707 s.d 709)
- 1004) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sampang tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.710 s.d 712)

- 1005) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sumenep tahun 1982-1997, fotokopi, 4 jilid (No.713 s.d 716)
- 1006) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pasuruan tahun 1982-1997, fotokopi, 4 jilid (No.717 s.d 720)
- 1007) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bangkalan tahun 1987-1997, fotokopi, 5 jilid (No.721 s.d 724)
- 1008) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pamekasan tahun 1982-1997, fotokopi, 4 jilid (No.725 s.d 728)
- 1009) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Madiun tahun 1982-1997, fotokopi, 5 jilid (No.729 s.d 732)
- 1010) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Magetan tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.733 s.d 736)
- 1011) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pacitan tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.737 s.d 739)
- 1012) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Bali tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 8 jilid (No.740 s.d 744)
- 1013) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Denpasar tahun 1977-1997, fotokopi, 2 jilid (No.745)
- 1014) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Gianyar tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.746 s.d 750)
- 1015) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bangli tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.751 s.d 755)
- 1016) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tabanan tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.756 s.d 760)
- 1017) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Klungkung tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.761 s.d 764)
- 1018) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Badung tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.765 s.d 768)
- 1019) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Buleleng tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 8 jilid (No.769 s.d 772)
- 1020) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Karang Asem tahun 1982-1997, asli, 7 jilid (No.773 s.d 776)

- 1021) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Jembrana tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.777 s.d 779)
- 1022) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Kalimantan Barat tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 12 jilid (No.780 s.d 786)
- 1023) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Pontianak tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.787 s.d 790)
- 1024) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sambas tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 8 jilid (No.791 s.d 795)
- 1025) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pontianak tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.796 s.d 799)
- 1026) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 7 jilid (No.800 s.d 803)
- 1027) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bangli tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.804 s.d 806)
- 1028) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Ketapang tahun 1987-1997, fotokopi, 4 jilid (No.807 s.d 809)
- 1029) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sintang tahun 1997, fotokopi, 2 jilid (No.810 s.d 811)
- 1030) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.812 s.d 815)
- 1031) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Palangkaraya tahun 1987-1997, asli, 3 jilid (No.816 s.d 818)
- 1032) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kapuas tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 7 jilid (No.819 s.d 821)
- 1033) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Barito Utara tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.822 s.d 823)
- 1034) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Barito Selatan tahun 1987-1997, asli, 3 jilid (No.824 s.d 826)
- 1035) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.827 s.d 828)
- 1036) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.829 s.d 831)

- 1037) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pasir tahun 1987, asli, 1 jilid (No.832)
- 1038) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1971-1997, asli, fotokopi, 9 jilid (No.833 s.d 839)
- 1039) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Banjarmasin tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.840 s.d 843)
- 1040) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Banjar tahun 1977-1997, asli, 4 jilid (No.844 s.d 846)
- 1041) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.847 s.d 851)
- 1042) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.852 s.d 855)
- 1043) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tapin tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.856 s.d 859)
- 1044) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tanah Laut tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.860 s.d 862)
- 1045) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tabalong tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.863 s.d 866)
- 1046) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kotabaru tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.867 s.d 870)
- 1047) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Barito Selatan tahun 1982, asli, 1 jilid (No.871)
- 1048) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 1987-1997, asli, 3 jilid (No.872 s.d 874)
- 1049) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Barito Kuala tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.875 s.d 877)
- 1050) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 7 jilid (No.878 s.d 882)
- 1051) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Balikpapan tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.883 s.d 887)
- 1052) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Samarinda tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.888 s.d 891)

- 1053) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kutai tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.892 s.d 897)
- 1054) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bulungan tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 9 jilid (No.898 s.d 902)
- 1055) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Berau tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.903 s.d 907)
- 1056) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pasir tahun 1987-1992, asli, 2 jilid (No.908 s.d 909)
- 1057) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Utara tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 9 jilid (No.910 s.d 915)
- 1058) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Gorontalo tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.916 s.d 919)
- 1059) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Manado tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.920 s.d 924)
- 1060) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Bitung tahun 1992, fotokopi, 1 jilid (No.925)
- 1061) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Gorontalo tahun 1987-1997, fotokopi, 3 jilid (No.926 s.d 928)
- 1062) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaudi tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 31 jilid (No.929 s.d 933)
- 1063) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 1987-1997, fotokopi, 4 jilid (No.934 s.d 936)
- 1064) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Minahasa tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.937 s.d 939)
- 1065) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 1982-1997, fotokopi, 5 jilid (No.940 s.d 943)
- 1066) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Palu tahun 1997, fotokopi, 2 jilid (No.944)
- 1067) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Banggai tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.945 s.d 947)
- 1068) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Buol Toli-Toli tahun 1977-1997, fotokopi, 6 jilid (No.948 s.d 951)

- 1069) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Poso tahun 1977-1997, fotokopi, 5 jilid (No.952 s.d 955)
- 1070) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Donggala tahun 1977-1997, fotokopi, 9 jilid (No.956 s.d 959)
- 1071) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 1976-1997, asli, fotokopi, 15 jilid (No.960 s.d 964)
- 1072) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kendari tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.965 s.d 969)
- 1073) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kolaka tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.970 s.d 973)
- 1074) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Muna tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.974 s.d 977)
- 1075) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Buton tahun 1982-1997, asli, 5 jilid (No.978 s.d 981)
- 1076) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1971-1997, asli, fotokopi, 9 jilid (No.982 s.d 987)
- 1077) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Ujung Pandang tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.988 s.d 990)
- 1078) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Pare-Pare tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.991 s.d 994)
- 1079) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Gowa tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 7 jilid (No.995 s.d 998)
- 1080) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bantaeng tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.999 s.d 1001)
- 1081) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bulukumba tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.1002 s.d 1004)
- 1082) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Enrekang tahun 1987-1992, fotokopi, 2 jilid (No.1005 s.d 1006)
- 1083) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Jeneponto tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.1007 s.d 1009)
- 1084) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Luwu tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.1010 s.d 1012)

- 1085) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Majene tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.1013 s.d 1015)
- 1086) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Maros tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.1016 s.d 1018)
- 1087) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.1019 s.d 1021)
- 1088) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pinrang tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.1022 s.d 1024)
- 1089) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Polewali tahun 1987-1992, asli, fotokopi, 4 jilid (No.1025 s.d 1027)
- 1090) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Selayar tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.1028 s.d 1029)
- 1091) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sindereng Rappang tahun 1987-1997, asli, 4 jilid (No.1030 s.d 1032)
- 1092) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Soppeng tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.1033 s.d 1035)
- 1093) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Takalar tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.1036 s.d 1038)
- 1094) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Wajo tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.1039 s.d 1041)
- 1095) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Barru tahun 1992-1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.1042 s.d 1043)
- 1096) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Mamuju tahun 1992-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.1044 s.d 1045)
- 1097) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bone tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.1046 s.d 1048)
- 1098) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bulukumba tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.1049 s.d 1050)
- 1099) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sinjai tahun 1987, asli, 1 jilid (No.1051)
- 1100) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 7 jilid (No.1052 s.d 1055)

- 1101) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Mataram tahun 1997, asli, 2 jilid (No.1056)
- 1102) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Lombok Barat tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.1057 s.d 1061)
- 1103) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sumbawa tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.1062 s.d 1065)
- 1104) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Lombok Timur tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.1066 s.d 1070)
- 1105) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bima tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.1071 s.d 1074)
- 1106) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Lombok Tengah tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.1075 s.d 1078)
- 1107) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Dompu tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.1079 s.d 1081)
- 1108) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1977-1987, asli, fotokopi, 5 jilid (No.1082 s.d 1084)
- 1109) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Alor tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.1085 s.d 1087)
- 1110) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Belu tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.1088 s.d 1091)
- 1111) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Ende tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.1092 s.d 1095)
- 1112) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Flores Timur tahun 1977-1992, asli, fotokopi, 3 jilid (No.1096 s.d 1098)
- 1113) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kupang tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 10 jilid (No.1099 s.d 1102)
- 1114) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sikka tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.1103 s.d 1106)
- 1115) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Timor Tengah tahun 1977, asli, 1 jilid (No.1107)
- 1116) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Ngada tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.1108 s.d 1110)

- 1117) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 1987, asli, 1 jilid (No.1111)
- 1118) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sumba Barat tahun 1992-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.1112 s.d 1113)
- 1119) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Manggarai tahun 1987-1992, fotokopi, 2 jilid (No.1114 s.d 1115)
- 1120) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Maluku tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 10 jilid (No.1116 s.d 1119)
- 1121) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Ambon tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.1120 s.d 1124)
- 1122) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Maluku Utara tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 6 jilid (No.1125 s.d 1128)
- 1123) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Maluku Tengah tahun 1987, fotokopi, 1 jilid (No.1129)
- 1124) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.1130 s.d 1131)
- 1125) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Halmahera Tengah tahun 1992, fotokopi, 1 jilid (No.1132)
- 1126) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Irian Jaya tahun 1971-1997, fotokopi, 17 jilid (No.1133 s.d 1142)
- 1127) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kotamadya Jayapura tahun 1997, asli, 1 jilid (No.1143)
- 1128) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Paniai tahun 1977-1997, fotokopi, 5 jilid (No.1144 s.d 1147)
- 1129) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupateng tahun 1977-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.1148 s.d 1151)
- 1130) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Jayapura tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 9 jilid (No.1152 s.d 1155)
- 1131) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Fak-Fak tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.1156 s.d 1160)
- 1132) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Yapen Wropen tahun 1982-1997, fotokopi, 64 jilid (No.1161 s.d 1164)

- 1133) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Manokwari tahun 1987-1997, fotokopi, 3 jilid (No.1165 s.d 1167)
- 1134) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Biak Numfor tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.1168 s.d 1170)
- 1135) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Merauke tahun 1987-1997, fotokopi, 6 jilid (No.1171 s.d 1173)
- 1136) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Jayawijaya tahun 1987-1997, fotokopi, 3 jilid (No.1174 s.d 1175)
- 1137) Penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Timor Timur tahun 1982-199, asli, fotokopi, 6 jilid (No.1176 s.d 1179)
- 1138) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Dili tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.1180 s.d 1183)
- 1139) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Aileu tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.1184 s.d 1186)
- 1140) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Ainaro tahun 1987-1997, fotokopi, 4 jilid (No.1187 s.d 1189)
- 1141) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bobonaro tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.1190 s.d 1193)
- 1142) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Baucau tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.1194 s.d 1196)
- 1143) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Ermera tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 3 jilid (No.1197 s.d 1199)
- 1144) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Ambenu tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.1200 s.d 1203)
- 1145) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Lautem tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 4 jilid (No.1204 s.d 1206)
- 1146) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Liquica tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.1207 s.d 1210)
- 1147) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Manufahi tahun 1982-1997, fotokopi, 5 jilid (No.1211 s.d 1214)
- 1148) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Manatuto tahun 1982-1997, asli, fotokopi, 5 jilid (No.1215 s.d 1218)

- 1149) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kovalima tahun 1987-1997, asli, fotokopi, 2 jilid (No.1219 s.d 1220)
- 1150) Penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Viqueque tahun 1982-1997, asli, 2 jilid (No.1221 s.d 1222)
- 1151) Hasil Pemilihan Umum anggota DPR tahun 1971, fotokopi, 2 jilid (No.1223 s.d 1224)
- 1152) Daftar perhitungan pembagian jumlah wakil anggota DPR dan DPRD II hasil pemilihan umum tahun 1987, fotokopi, 1 jilid (No.1230)
- 1153) Laporan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). 1971, fotokopi, 1 jilid (No. 1313)
- 1154) Berita Acara Penetapan Hasil Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR tahun 1977 beserta lampiran, 1977, fotokopi, 1 jilid (No. 1314)
- 1155) Hasil perhitungan suara provinsi untuk Pemilihan Umum anggota DPR, 1977, fotokopi, 1 jilid (No. 1315)
- 1156) Jumlah Suara dan jumlah kursi yang diperoleh Parpol dan Golkar untuk keanggotaan DPR, DPRD I dan DPRD II dalam Pemilihan Umum 1982, fotokopi, 1 jilid (No. 1316)
- 1157) Penetapan hasil Pemilihan Umum anggota DPR tahun 1982 Daftar perhitungan pembagian jumlah wakil untuk pemilihan umum anggota DPR, 1982, fotokopi, 1 jilid (No. 1317)
- 1158) Data jumlah suara serta kursi yang diperoleh Parpol-Golkar untuk keanggotaan DPRD II dalam Pemilihan Umum tahun 1982 seluruh Indonesia, 1982, fotokopi, 1 jilid (No. 1318)
- 1159) Daftar hasil perhitungan suara bagi organisasi peserta Pemilihan umum dan penempatan wakil yang diperoleh organisasi untuk Daerah tingkat II di tiap daerah pemilihan dalam Pemilu anggota DPR tahun 1987, fotokopi, 1 jilid (No. 1319)
- 1160) Rekapitulasi perbandingan jumlah suara dan wakil yang diperoleh Parpol/Golkar dalam pemilu anggota DPR 1971, 1977, 1982, dan 1987 di Daerah Tk. II seluruh Indonesia, fotokopi, 1 jilid (No. 1921)
- 1161) Data jumlah kursi DPR yang diperoleh peserta Pemilu untuk tiap daerah pemilihan dalam Pemilu 1955, fotokopi, 1 jilid (No. 1321)

- 1162) Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1999, 1999, fotokopi, 1 Jilid. (No.1323. 1)
- 1163) Pemilihan Umum 1999 dalam Angka. 1999, fotokopi, 1 jilid. (No. 1323. 2)
- 1164) Perhitungan perolehan kursi DPR RI hasil Pemilihan Umum 1999 seluruh Indonesia dalam keputusan Rapat Pleno PPI. 1 September 1999, fotokopi, 1 jilid. (No.1323. 3)
- 1165) Lampiran IV (jilid 5) tentang hasil Pemilihan Umum anggota DPR tahun. 1999, fotokopi, 1 jilid (No.1324. 5)

b. Arsip Foto

Kempen Sumatera Utara 1950-1955

- 1166) Anggota Panitia Pemilihan Sumatera Utara (PPSU), Anwar Dharma membacakan pengumuman tentang pembagian kursi-kursi pertama untuk DPR di daerah pemilihan Sumatera Utara di Medan. 30 Desember 1955 (No. 3707, No. Negatif 551230 AA 1)
- 1167) Pemandangan dalam ruangan rapat terbuka pemilu di Medan. 30 Desember 1955 (No. 3708, No. Negatif 551230 AA 2)
- 1168) Daftar pembagian kursi-kursi pertama yang digantungkan di ruangan rapat Pemilu di Medan. 30 Desember 1955 (No. 3709, No. Negatif 551230 AA 3)
- 1169) Penandatanganan penetapan pembagian kursi-kursi pertama untuk DPR di dalam daerah pemilihan Sumatera Utara di Medan. 30 Desember 1955 (No. 3711, No. Negatif 551230 AA 5)
- 1170) Pemandangan di ruangan rapat terbuka Pemilu di Medan. 30 Desember 1955 (No. 3712, No. Negatif 551230 AA 6)

Kempen Sumatera Selatan 1950-1967

- 1171) Pelantikan dan penyempahan anggota baru DPR Nyi Sumadi AS dari Fraksi PSI di Palembang, 9 Oktober 1958. (No. 3037, No. Positif: 581009/9)

1172) Pelantikan pejabat anggota konstituante Akasi-IB, Tanjung Pandan, 1958. (No. 3055-3058, No. Positif: 2, 10, 30, 31)

c. Arsip Film

PPFN Seri Gelora Indonesia (FL 25)

- 1173) Film GI : 241
File : Pendidikan
Type : Released
Produksi : 1956
Nomor Reproduksi : DVD RK 74
Isi : Hasil Pemilihan Umum.
- 1174) Film GI : 244
File : DPR
Type : Released
Produksi : 1956
Nomor Reproduksi : DVD RK 57
Isi : Pelantikan anggota DPR di Istana Negara.
- 1175) Film GI : 689
File : Aneka Peristiwa.
Produksi : 1971
Isi :
- Pelantikan Panitia Pemeriksa Keanggotaan DPR hasil pemilu, dilakukan oleh Ketua Lembaga Pemilu, Amir Machmud di Departemen Dalam Negeri Jakarta, 2 Oktober 1971.
 - Pelantikan 10 (sepuluh) orang anggota DPR DKI Jaya hasil pemilu 1971, dilakukan oleh Gubernur DKI, Ali Sadikin, di Ruang Sidang DPRD Jakarta Raya, 14 Oktober 1971.
 - Pelantikan anggota DPRD Surabaya hasil pemilu tahun 1971, dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Moh. Noer di Gedung DPRD Jawa Timur, 10 November 1971.

Video TVRI Tahun 1982 Format *Umatic* (Pembuatan 2011)

- 1176) Nomor : 20
File : Berita Nusantara.
Nomor Kaset : C.XV.B.57-20.220882-VC56OA
Time Code : 07:38-08:18
Isi :
Gubernur Kalimantan Selatan Mistar Cokrokusumo di Banjarmasin mengambil sumpah dan melantik Ketua DPRD Tk.I Rachmatullah dan Wakil Ketua I DPRD Tk.I H. Mukri Dawid, MA dan Wakil Ketua II DPRD Tk.I M.Yusuf hasil Pemilu 1982 - 1987 Kalimantan Selatan.
- 1177) Nomor : 20
File : Berita Nusantara.
Nomor Kaset : C.XV.B.57-20.220882-VC56OA
Time Code : 08:18-08:56
Isi :
Gubernur Sulawesi Utara, G.H. Mantik a.n. Menteri Dalam Negeri mengambil sumpah dan melantik Ketua DPRD Tk. I Fritz Sumampouw, Wakil Ketua DPRD Tk.I M. Toha dan Wakil Ketua II DPRD Tk.I H. Hasan Sulawesi Utara hasil Pemilu 1982 -1987.
- 1178) Nomor : 20
File : Berita Nusantara.
Nomor Kaset : C.XV.B.57-20.220882-VC56OA
Time Code : 08:56-09:27
Isi :
Walikota Kotamadya Ambon, Albert Porwayla melantik Ketua DPRD Tk. I (Toha Soplanit), Wakil Ketua I DPRD Tk. I Maluku Y. Gantong dan Wakil Ketua II DPRD Tk.I Rahawaling hasil Pemilu 1982 - 1987.
- 1179) Nomor : 24
File : Berita Nusantara.
Nomor Kaset : CX.V.b.61.VC.562.(20.230882)
Time Code : 10:49-11:59
Isi :

Bupati Tangerang H. M. Syukur atas nama Gubernur Jawa Barat melantik Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tk II Kabupaten Tangerang hasil pemilu 1982.

1180) Nomor : 39

File : Berita Nasional

Nomor Kaset : C.XV.b.78, 20.270882 VC 566

Time Code : 07:14 - 08:00

Isi :

Gubernur Bali Ida Bagus Mantra atas nama Menteri Dalam Negeri melantik pimpinan DPRD Provinsi Bali dalam sidang Pleno khusus DPRD Bali di Denpasar, pimpinan yang dilantik I Gusti Putu Ratu, SH sebagai ketua, I Gusti Ngurah Ketut Sidya wakil ketua dan Sudarto Sutirto sebagai wakil ketua.

1181) Nomor : 39

File : Berita Nasional

Nomor Kaset : C.XV.b.78, 20.270882 VC 566

Time Code : 08:02 - 08:49

Isi :

Dalam sidang Paripurna DPRD Tk. I Jawa Tengah, Gubernur Supardjo Rustam melantik pimpinan DPRD Jawa Tengah hasil pemilu 1982.

1182) Nomor : 57

File : Berita Nusantara

Nomor Kaset : C.XV.C.24-VC.651-20.50V201182

Time Code : 05:53 - 06:50

Isi :

Bupati Tangerang H. Muhamad Syukur bersama Gubernur Jawa Barat di Gedung Negara Tangerang melantik dan mengambil sumpah Drs. Tatang Suhendar sebagai Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Tangerang menggantikan H. Syamsul Hadi yang mendapat tugas baru sebagai Ketua DPRD Tk. II Kabupaten Tangerang sebagai hasil Pemilu 1982 yang lalu.

- 1183) Nomor : 57
File : Berita Nusantara
Nomor Kaset : C.XV.C.24-VC.651-20.50V201182
Time Code : 06:50 - 08:08
Isi :
Penitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang termasuk di dalamnya Sekretariat dan Pengawas Pelaksanaan Pemilu 1981/1982 secara resmi dibubarkan oleh Bupati H.M. Syukur yang ditandai dengan penyerahan dokumen hasil pemilu 1982.
- 1184) Nomor : 84
File : Berita Nusantara
Nomor Kaset : C.XV.C.52.VC.538.20.300782
Time Code : 02:15 - 03:40
Isi :
Pelantikan Anggota DPRD Tk. I terpilih pada pemilu tahun 1982, hari senin lalu dilantik di depan Ketua Pengadilan Tinggi a/n Ketua Mahkamah Agung, di ibukota propinsi daerah masing-masing.
- 1185) Nomor : 90
File : Berita Nusantara
Nomor Kaset : C.XV.C.58 20 290782 VC 537
Time Code : 00:00 - 00:25
Isi :
Pelantikan DPRD I hasil pemilihan umum 1982 secara serentak dilantik dalam sidang Pleno DPRD di ibu kota Provinsi masing-masing oleh Ketua Pengadilan Tinggi atas nama Ketua Mahkamah Agung.
- 1186) Nomor : 90
File : Berita Nusantara
Nomor Kaset : C.XV.C.58 20 290782 VC 537
Time Code : 02:24 - 02:37
Isi :

Anggota DPR tingkat I Sulawesi Utara yang diangkat sumpahnya seluruhnya berjumlah 40 orang anggota, 32 orang yang terpilih hasil pemilu 1982, masing-masing PPP 2 orang, Golkar 28 orang, PDI 2 orang dan 8 orang yang diangkat.

1187) Nomor : 90

File : Berita Nusantara

Nomor Kaset : C.XV.C.58 20 290782 VC 537

Time Code : 03:19 - 03:34

Isi :

Gubernur Sumatera Barat Ir. Azwar Anas hari senin lalu menerima surat keputusan DPRD II Kodya Sawahlunto tentang pernyataan kebulatan tekad yang dibacakan oleh wakil ketua sementara termuda Isdar Iskandar untuk diteruskan kepada MPR hasil Pemilu 1982.

1188) Nomor : 90

File : Berita Nusantara

Nomor Kaset : C.XV.C.58 20 290782 VC 537

Time Code : 03:34 - 04:11

Isi :

Pernyataan kebulatan tekad tersebut berisikan tentang mengusulkan kepada MPR hasil pemilu 1982 agar menetapkan Jenderal TNI Purnawirawan Suharto sebagai Bapak Pembangunan Nasional, mengusulkan untuk mencalonkan dan memilih kembali Jenderal Suharto sebagai Presiden RI kembali untuk masa jabatan 1983/1988.

1189) Nomor : 90

File : Berita Nusantara

Nomor Kaset : C.XV.C.58 20 290782 VC 537

Time Code : 14:01 - 14:41

Isi :

Gubernur Nusa Tenggara Timur Ben Mboi di kediamannya mengadakan pertemuan dengan anggota DPRD Tk. I hasil pemilihan umum 1982 yang baru dilantik. Dalam kesempatannya gubernur mengharapkan agar selalu mencari inspirasi untuk rakyat, karena

majunya suatu bangsa atau negara tergantung dari keberhasilan pemerintah dan wakil rakyat dalam memenuhi aspirasi rakyat.

- 1190) Nomor : 93
File : Berita Nasional
Nomor Kaset : C. XV.C.61.20.040682. VC.482
Time Code : 07:20 - 08:02
Isi :
Gubernur DKI Jaya, Tjokro Pranolo mengatakan hasil masing-masing peserta Pemilu merupakan manifestasi dari keberhasilan rakyat Indonesia dalam menegakkan Demokrasi Indonesia.
- 1191) Nomor : 93
File : Siaran Berita
Nomor Kaset : C. XV.C.61.20.040682. VC.482
Time Code : 43:34 - 44:34
Isi :
Ketua DPR/MPR, Daryatmo didampingi Sekjen MPR Suwandi, SH menerima Gubernur Jawa Timur Sunandar Priyosudarmo di Jakarta. Gubernur Jawa Timur mengusulkan pada MPR hasil Pemilu 1982 untuk mencalonkan kembali Jend. Purnawirawan Suharto untuk menjadi Presiden RI tahun 1993 - 1998.
- 1192) Nomor : 93
File : Siaran Berita
Nomor Kaset : C. XV.C.61.20.040682. VC.482
Time Code : 45:37 - 46:52
Isi :
Menteri Sekretaris Negara, Sudharmono menerima Gubernur Jawa Tengah, Supardjo Rustam serta anggota DPRD Tk. I untuk menyerahkan keputusan DPRD Tk. I tentang usulan-usulan hasil Pemilu 1992/1993.
- 1193) Nomor : 95
File : Berita Nasional
Nomor Kaset : C.XV.C.63.20.280782. VC.536

Time Code : 01:29 - 05:44

Isi :

Mulai minggu ini hasil Pemilu 1982 secara serentak dilantik dalam Sidang Pleno DPRD Tk. I di Provinsi masing-masing didepan Pengadilan Tinggi atas nama Mahkamah Agung. 39 anggota DPRD Tk. I Kalimantan Tengah, senin lalu dilantik Mahkamah Agung di Palangkaraya. Timor Timur untuk pertama kalinya menyelenggarakan Pemilu dan Timor Timur melantik 40 DPRD Tk I.

1194) Nomor : 98

File : Berita Nusantara

Nomor Kaset : C.XV.C.66 VC 535 - 20.270782

Time Code : 00:02 - 02:56

Isi :

Sesuai dengan hasil Pemilu DPRD, anggota DPRD di masing-masing Provinsi dilantik sesuai dalam hasil sidang pleno DPRD Tk. I di depan Ketua Pengadilan Tinggi, an. Mahkamah Agung melantik 41 dewan Provinsi Sumatera Selatan oleh R. Sukamto. Di Provinsi Jawa Barat melantik 75 orang sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1982, setelah itu diadakan serah terima jabatan dan memori jabatan. Di Provinsi Sulawesi Selatan melantik 36 orang dan di Provinsi Sulawesi Tenggara melantik 40 orang. Menteri Dalam Negeri mengatakan, dalam tahun 1977 - 1982, DPRD berhasil melaksanakan tugasnya dengan menciptakan keadaan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan baik dalam struktural maupun tingkah laku.

Video TVRI Tahun 1982 Format *Umatic* (Pembuatan 2013)

1195) Nomor : 154

File : Politik

Nomor Kaset : C.XV.c.70 VC.534 20.260782

Time Code : 03.08 - 04.27

Isi :

Anggota DPRD Tk.I Bengkulu hasil Pemilu 1982 dilantik oleh wakil Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Bambang Sumedi, SH .

1196) Nomor : 568

File : Pemerintahan

Nomor Kaset : C.XV.c.70 VC.534 20.260782

Time Code : 38.23 - 39.22

Isi :

Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI melantik anggota DPRD Tk.I hasil Pemilu tahun 1982. Pelantikan anggota DPRD Tk.I DKI Jakarta dilangsungkan dalam Sidang Paripurna DPRD. Sidang Paripurna ini dilakukan 2 kali. Sidang I menyampaikan masa akhir jabatan anggota DPRD lama yang diketuai oleh Ahmad Bandoro, sedangkan Sidang II menyampaikan pidato tertulis Presiden RI yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD yang baru yaitu H.M. Jaelani.

1197) Nomor : 748

File : Politik

Nomor Kaset : C.XV.d.15 VC.602 20.021082

Time Code : 36.16 - 37.58

Isi :

Sidang Paripurna Terbuka III DPR RI hasil Pemilu 1982 yang dipimpin oleh anggota tertua K.H. Moh. Syafei dan termuda Isyana W. Sajarwo secara aklamasi berhasil memilih pimpinan tetap DPR RI 1982 -1987 dengan Ketua, H. Amir Machmud dari Fraksi ABRI.

1198) Nomor : 931

File : Siaran Khusus (Politik)

Nomor Kaset : C.XV.d.24 VC.601.E 20.011082

Time Code : 00.01 - 62.03

Isi :

- Pengambilan Sumpah Anggota MPR/DPR RI, hasil pemilu 1982. Jumlah calon anggota yang dilantik sebanyak 920 orang, terdiri dari Utusan Daerah, Golkar, PPP, PDI, dan ABRI.

- Pidato kenegaraan Presiden Suharto dan Pengambilan Sumpah Anggota DPR/MPR pada (10/1982), Periode 1982 s/d 1987.
- Pembahasan tentang perubahan undang-undang. Tampak anggota DPR/MPR yang baru dilantik, tertua H.M. M. Syafi'i Wirakusuma (82 tahun) dari PPP dan termuda Isyana W. Sajarwo, S.H. (28 tahun).
- Anggota DPR/MPR saat ini terdiri dari anggota ABRI (1/3 dari jumlah anggota DPR/MPR, sesuai dengan pasal 37 UUD 1945).
- Ucapan selamat Presiden Suharto kepada para anggota DPR/MPR yang baru dilantik.
- Doa dan penutup oleh Ketua DPA, KH. Dr. Idham Chalid.

1199) Nomor : 846
 File : Politik
 Nomor Kaset : C.XV.d.33 V660B 20.291182
Time Code : 37.23 - 38.10
 isi :

Wakil Ketua MPR, M. Kharis Suhud melantik anggota MPR-RI Rusli Dahlan, SH. Dari fraksi PDI daerah pemilihan Kalimantan Selatan.

VCD Komisi Pemilihan Umum

1200) Nomor : 13
 Sub Masalah : Monologis dan Kampanye Seluruh Indonesia
 Tahap : III Pemungutan Suara (05 Juni - 24 Juli 1999)
 Masa Putar : 00.53.00
 Warna : Berwarna
 Narasi : Bahasa Indonesia
 Produksi : Komisi Pemilihan Umum
 Tahun Produksi : 1999
 Sinopsis :

Upacara Pengucapan sumpah atau janji Anggota DPR dan MPR RI periode 1999-2004 di Gedung Nusantara (Menit: 00.00.01 s/d 00.53.00).

5. Evaluasi

a. Arsip Tekstual

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959

- 1201) Surat dari Komite Aksi Pemilihan Umum Masyumi Wilayah XIV kepada Perdana Menteri mengenai penyebaran surat-surat selebaran partai dengan menggunakan oto perintah. 27 September 1955, asli, 1 lembar. (No. 1925)
- 1202) Surat dari Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum kepada Dewan Menteri mengenai pembentukan Panitia Pemeriksaan menurut pasal 104 Undang-Undang Pemilihan Umum. 22 Oktober 1955, salinan, 1 lembar. (No. 1928)
- 1203) Berkas mengenai laporan peninjauan PPI tentang Pemilu yang akan datang. 13 Maret - 30 Agustus 1958, asli, 1 sampul. (No. 1931)
- 1204) Surat-surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai buku karangan M. Isa Anshary "Ummat Islam menghadapi Pemilihan Umum" yang dianggap membahayakan ketertiban umum. 18 September - 11 November 1954, asli, 3 lembar. (No. 2485)
- 1205) Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR Anwar Harjono tentang berita persiapan pemilu yang tidak lancar di daerah-daerah. 23 Agustus - 4 Oktober 1958, tembusan, 1 sampul. (No. 3722)

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 Jilid II

- 1206) Kumpulan resolusi dan surat protes mengenai penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah. 1 Agustus - 26 September 1954, asli, 1 sampul. (No. 1122)
- 1207) Surat-surat mengenai laporan penyelenggaraan pemilu. 6-8 September 1954, tembusan, 1 sampul. (No. 1126)
- 1208) Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR mengenai berita tentang jual-beli surat suara dalam pemilu. 19 September 1955 - 23 Juni 1956, asli, 1 sampul. (No. 1129)

- 1209) Surat - surat mengenai pertanyaan anggota DPR Mr. Hamid Algadrie tentang Pemilihan perwakilan DPR dan Kostituante. 28 Agustus - 23 November 1956, asli, tembusan, 5 lembar. (No. 2320)

Kabinet Presiden RI 1950-1959

- 1210) Surat pernyataan Ikatan Bekas Pejuang Islam (IKABEPI) tentang penolakan pembentukan pengawal pemilu. 30 Juli 1954, 23 Maret 1957, stensilan, 2 lembar. (No. 980)
- 1211) Surat pernyataan Persatuan Bekas Pejuang Bersenjata RI Cab. Blitar tentang kecurangan dalam pemilu. 31 Oktober 1955, asli, 1 lembar. (No. 998)
- 1212) Kumpulan surat pernyataan tentang gambar peserta (partai) dalam pemilu yang mirip dengan partai lainnya. 29 April – 2 Juni 1957, asli, 1 sampul. (No. 1028)

Konstituante 1956-1960

- 1213) Berkas mengenai pernyataan agar pemilihan umum dilaksanakan secara adil dan demokratis (Peraturan Menteri Penerangan RI terkait sikap pegawai kementerian penerangan dalam kampanye pemilihan dan menjelang pemunggutan suara anggota konstituante). 1956-1958, 1 sampul. (No. 102)

Nahdlatul Ulama 1948-1979

- 1214) Surat-surat mengenai protes terhadap penggunaan tanda gambar PKI dan orang-orang tak berpartai. 10 Juni 1954 - 15 Maret 1955, pertinggal, tembusan, 3 lembar. (No. 2302)
- 1215) Surat-surat mengenai fitnah politik pada pemilihan umum, salah satunya mengenai pemberitaan korupsi mantan Menteri Agama KH. Masjkur. 13 September 1955 - 26 Agustus 1970, pertinggal, tembusan, 6 lembar. (No. 2304)

- 1216) Surat-surat dari BTI dan GP Anshar mengenai desakan untuk melaksanakan pemilu tepat waktu. 6, 14 September 1955 dan 19 November 1956, tembusan, 3 lembar. (No. 2307)
- 1217) Surat-surat mengenai laporan sekitar jalannya pemilu dan permasalahannya serta usaha merebut posisi penting, antara lain di Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku. 14 Oktober 1955 - 30 Agustus 1977, asli, tembusan, 1 sampul. (No. 2310)
- 1218) Notulen hasil simposium dan diskusi Lapunu Pusat tentang Pemilu, Penggolongan Masyarakat berdasarkan Demokrasi Pancasila, Kepartaian, dan Susunan MPR/DPR. 12 Agustus - 3 September 1966, tembusan, 1 sampul. (No. 2317)
- 1219) Surat-surat mengenai tindakan intimidasi antara lain oleh Sekber Golkar dalam Pemilu. 31 Agustus 1970 - 10 April 1971. asli, pertinggal, 1 sampul. (No. 2324)
- 1220) Pernyataan PBNU mengenai tinjauan pelaksanaan Pemilu 1971, antara lain di Lampung Selatan. 16 Juni 1971, 26 Februari 1972, pertinggal, asli, 1 sampul. (No. 2329)
- 1221) Surat-surat dari PBNU kepada PCNU Kabupaten Nganjuk mengenai para guru yang kena skorsing karena terlibat dalam Pemilu lalu. 26 Juni - 31 Juli 1972, pertinggal, 2 lembar. (No. 2330)
- 1222) Troop Info tentang "Adanya Usaha-Usaha Mencari Data pada Orang-Orang yang Berminat Menjadi Kepala Desa sebagai Dalih untuk Pembiayaan Golkar dalam Pemilu 1977" oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. 1 November 1976, fotokopi, 3 lembar. (No. 2333)
- 1223) Surat dari PWNU Jawa Timur kepada PCNU se-Jawa Timur mengenai himbuan untuk menghindari usaha-usaha non-konstitusional dan mengamankan pemilu 1977 serta senantiasa waspada. 17 Januari 1977, tembusan, 1 lembar (No. 2334)
- 1224) Makalah berjudul "Pemilihan Umum" oleh E Surjana. tt, salinan, 4 lembar (No. 2336)

- 1225) "Pemilihan umum hak asasi rakyat" oleh H Moh Marchum Sekretaris Lapunu Pusat. Tanpa tanggal, asli, 1 sampul. (No. 2337)

Dewan Pertimbangan Agung RI (DPA RI) 1977-1999

- 1226) Catatan rapat Komisi Kesra DPA RI No. 10/RK/Kesra/DPA/1986 tanggal 24 Juni 1986 tentang pembahasan pemilu sebagai bagian integral pembangunan politik bangsa dan makalah komisi politik mengenai Pemilu. (No. 30-7)
- 1227) Catatan rapat Komisi Kesra DPA RI No. 10/RK/Kesra/DPA/1986 tanggal 2 Juli 1986 tentang pembahasan pemilu sebagai bagian integral pembangunan politik bangsa dan makalah komisi politik mengenai Pemilu. (No. 30-8)
- 1228) Catatan rapat Komisi Kesra DPA RI No. 11/RK/Kesra/DPA/1986 tanggal 8 Juli 1986 tentang pembahasan pemilu sebagai bagian integral pembangunan politik bangsa dan makalah komisi politik tentang Pemilu dan penetapan susunan Tim Kunjungan Kerja ke daerah tingkat I Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara (No. 30-9)
- 1229) Catatan rapat Komisi Politik DPA RI ke 95 /KP/DPA/1986 tanggal 2 Juni 1986 tentang laporan Tim Kecil mengenai Pemilu dan peruntukan tanah. (No. 36-6)
- 1230) Catatan Rapat Komisi Politik DPA RI ke 116 No. 0116 /KP/DPA/1987 tanggal 16 Maret 1987 tentang laporan tim komisi politik dari daerah dan rencana pemantauan pemungutan suara tanggal 23 April 1987 di DKI Jakarta. (No. 37-2)
- 1231) Catatan rapat Komisi Politik DPA RI ke 117 No. 0117 /KP/DPA/1987 tanggal 27 April 1987 tentang pembahasan pelaksanaan pemilu 1987 dan *brainstorming* dengan tema disiplin nasional. (No. 37-3)
- 1232) Catatan rapat Komisi Politik DPA RI No./RK/DPA/1996 tanggal 12 September 1996 tentang masukan komisi politik untuk bahan Sidang Umum MPR 1998. (No. 38-11,12, 14, 15)

- 1233) Catatan rapat Komisi Politik DPA RI No.076/RK/DPA/1997 tanggal 3 April 1997 tentang perkembangan situasi politik sebelum dan sesudah pemilu dan kunjungan kerja ke daerah dalam rangkan pemantauan Pemilu. (No. 39-1)
- 1234) Catatan rapat Komisi Politik DPA RI No.079/RK/DPA/1997 tanggal 22 Juli 1997 tentang Kepemimpinan Indonesia Era Abad XXI dan Situasi Politik Sebelum dan Sesudah Pemilu. (No. 39-4)
- 1235) Catatan rapat Komisi Politik DPA RI No.080/RK/DPA/1997 tanggal 12 Agustus 1997 tentang Konsolidasi Politik Pasca Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. (No.39-5)
- 1236) Catatan rapat Komisi Politik DPA RI No.081/RK/DPA/1997 tanggal 25 Agustus 1997 tentang Konsolidasi sebagai agenda Politik Pasca Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998 dan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1988. (No. 39-6)
- 1237) Catatan Rapat Komisi Ekuin DPA RI No.03/KEP/DPA/1997 tanggal 19 Agustus 1997 tentang Agenda Konsolidasi Politik Pasca Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998 yang disusun oleh komisi politik. (No. 39-16)
- 1238) Tanggapan Komisi Ekuin DPA RI terhadap Rancangan Pertimbangan Dewan Mengenai: Konsolidasi sebagai agenda Politik Pasca Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998". disusun oleh Komisi Politik pada rapat badan pekerja 26 Agustus 1997. (No. 39-17)
- 1239) Catatan Rapat Komisi Kesra DPA RI No.82/KEP/Kesra/DPA/1997 tanggal 21 Agustus 1997 tentang Konsolidasi sebagai agenda Politik Pasca Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998 dan wanita sebagai potensi produktif dalam pembangunan nasional. (No. 39-30)
- 1240) Pertimbangan DPA RI No. 21/Sd/V/1969 tanggal 23 Oktober 1969 tentang masalah Pemilu. (No. 47-5)
- 1241) Pertimbangan DPA RI No. 24/Sd/I/1970 tanggal 7 Februari 1970 tentang masalah Pelaksanaan Pemilu. (No. 48-1)
- 1242) Pertimbangan DPA RI No. 27/A/DPA/1971 tanggal 11 Januari 1971 tentang Persiapan Pemilu, disertai lampiran. (No. 49-1)

- 1243) Pertimbangan DPA RI No. 24/DPA/IV/1976 tanggal 28 Juli 1976 tentang masalah Pemilu tahun 1977. (No. 54-5)
- 1244) Pertimbangan DPA RI No. 31/DPA/BP/1977 tanggal 7 April 1977 tentang Pelaksanaan Pemilu 1977. (No. 55-5)
- 1245) Pertimbangan DPA RI No. 28/II/DPA/1981 tanggal 24 September 1981 tentang usaha pematapan pemilu 1982. (No. 60-4)
- 1246) Pertimbangan DPA RI No. 32/BP/DPA/1982 tanggal 15 April 1982 tentang Pelaksanaan Pemilu tahun 1982. (No. 61-2)
- 1247) Pertimbangan DPA RI No. 33/I/DPA/1982 tanggal 1 Juni 1982 tentang menghadapi purna Pemilu tahun 1982. (No. 61-3)
- 1248) Pertimbangan DPA RI No. 35/III/DPA/1982 tanggal 29 November 1982 tentang menjelang sidang umum MPR 1983. (No. 61-5)
- 1249) Pertimbangan DPA RI No. 16/III/DPA/1986 tanggal 9 Agustus 1986 tentang beberapa pokok pikiran mengenai pemilihan umum sebagai bagian integral pembangunan politik bangsa. (No. 65-4)
- 1250) Pertimbangan DPA RI No. 27/DPA/1996 tanggal 19 Agustus 1996 tentang masalah PDI dalam Kaitannya dengan pengamanan pelaksanaan Pemilu 1997 dan sidang umum MPR 1998. (No. 74-4)

Setwapres Umar Wirahadikusumah

- 1251) Surat-surat Kelompok Kerja Petisi 50 kepada MPR RI tentang saran dan himbauan mengenai pemilu tahun 1987. 7 Oktober 1986, 17 Maret 1987, tembusan, 6 lembar. (No.649)
- 1252) Surat dari Freddy Palma tentang sumbangan pemikiran di bidang pemerintahan/Pemilu, dengan lampiran. 2 November 1986, asli, 1 sampul. (No.652)

Kabinet Presiden RI 1950-1959

- 1253) Putusan DPRD peralihan kota besar Cirebon No 25/II/DPR tentang sokongan terhadap resolusi DPRD peralihan kota besar Bandung mengenai desakan kepada Mendagri untuk menarik kembali

penetapan keanggotaan panitia pemilihan dari Kabupaten/kota besar. 7 Desember 1956, salinan, 1 lembar. (No. 1015)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1971-1999

- 1254) Laporan pemilu 7 Juni 1999 dan saran-saran untuk reformasi sistem Pemilihan Umum oleh *International Foundation For Election Systems* (IFES) di Washington, 7 Juni 1999, fotokopi, 1 jilid. (No.1323. 4)
- 1255) Evaluasi pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum tahun 1999. fotokopi, 1 jilid. (No.1323.5)
- 1256) Inventarisasi pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum tahun 1999. fotokopi, 1 jilid (No. 1323. 6)
- 1257) Lampiran V Pemilihan Umum 1999 (jilid 6) tentang pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum, fotokopi, 1 jilid. (No.1324. 6)

b. Arsip Film

Video TVRI Tahun 1982 Format *Umatic* (Pembuatan 2013)

- 1258) Nomor : 253
 - File : Pemerintahan
 - Nomor Kaset : C.XV.d.33 V660B 20.291182
 - Time Code* : 07.35 - 08.09
 - Isi :
- HUT KORPRI ke-11 di DKI Jaya sebagai inspektur upacara Gubernur DKI Jaya, R. R. Soeprato. Selesai upacara diserahkan piagam penghargaan kepada 16 anggota KORPRI yang telah berjasa mensukseskan pemilu.

BAB III

PENUTUP

Pemilu menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia karena merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hingga pasca reformasi 1999, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 8 kali. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia selalu menarik untuk dikaji lebih dalam terutama dari sudut pandang ilmu politik, sosiologi, hukum dan ilmu sejarah. Oleh karena itu, ANRI merasa bangga dapat menerbitkan *Guide* Arsip Pemilihan Umum 1955-1999 yang tentunya dapat membantu para peneliti. *Guide* arsip ini telah disusun secara sistematis, sehingga informasinya dapat diakses dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik secara tepat, cepat dan akurat. Data dan informasi dari *guide* arsip ini bersumber dari daftar arsip dan inventaris arsip yang telah dibuat oleh ANRI dan dapat diakses di ruang layanan arsip.

Tim penyusun berharap semoga *guide* arsip ini dapat membantu pengguna arsip dalam menemukan arsip statis terkait pemilu yang dicari di ANRI. Penyusun menyadari bahwa *guide* arsip ini masih banyak kekurangan. Saran dan kritik kami harapkan untuk perbaikan mutu *guide* arsip lainnya dikemudian hari. Untuk itu semua kami ucapkan terima kasih.

LAMPIRAN

1. Indeks

A

Abdulgani, Ruslan	: 315
Abdullah, SA. Abu Bakar (KH.)	: 456
Abdurrahman, Eddy	: 325
Aceh	: 442, 443, 454, 455, 456, 810, 811
Aceh Barat	: 817
Aceh Besar	: 820
Aceh Selatan	: 813
Aceh Tengah	: 814
Aceh Tenggara	: 818
Aceh Timur	: 816
Aceh Utara	: 104, 105, 819
Adisuria, Rosadi Brata	: 460
Agam	: 856
Aidit, DN	: 426
Aileu	: 1139
Ainaro	: 1140
Al Rasyid, Harun	: 232
Algadrie, Hamid	: 1209
Alimin	: 365
Alor	: 1109
Ambenu	: 1144
Ambon	: 371, 440, 443, 446, 1121, 1178
Anas, Azwar	: 1187
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)	: 56, 80, 162, 198, 202, 290, 300, 349, 425, 442, 1197, 1198
Angkatan Perang	: 5, 8, 9, 544, 716, 793
Anies, H.M. Junus	: 307
Anshary, M. Isa	: 1204
Arif, Andi	: 463
Asahan	: 830

B

Badan Pembantu Presiden Urusan Pelaksanaan Pengawasan Partai- Partai	: 42
Badung	: 1018
Baidlowi, Aisyah Hamid	: 448
Bali	: 141, 387, 450, 454, 456, 792, 1012, 1180
Balikpapan	: 1051

Banda Aceh	: 443, 455, 811
Bandar Lampung	: 444, 895
Bandoro, Ahmad	: 1196
Bandung	: 448, 454, 792, 794, 801, 910, 926, 1253
Banggai	: 1067
Bangka	: 450, 886
Bangkalan	: 1007
Bangli	: 1015
Banjar	: 1040
Banjarmasin	: 296, 454, 792, 1039, 1176
Banjarnegara	: 948
Bantaeng	: 1080
Bantul	: 750 - 757, 970
Banyumas	: 37, 947
Banyuwangi	: 369, 1000
Barisan Tani Indonesia (BTI)	: 1216
Barito Selatan	: 1034, 1047
Barito Utara	: 1033
Barru	: 1095
Batam	: 454, 874
Batang	: 958
Batang Hari	: 862
Batubara, Cosmas	: 231
Baucau	: 1142
Bekasi	: 296, 448, 455, 917
Belitung	: 576 - 579, 583, 384, 887
Belu	: 1110
Bengkalis	: 871
Bengkulu	: 384, 456, 889, 890, 1195
Bengkulu Selatan	: 892
Bengkulu Utara	: 891
Berau	: 1055
Biak Numfor	: 1134
Bima	: 367, 1105
Binjai	: 504 - 507, 509 - 513, 824, 833
Bintang, Rusli	: 439
Bitung	: 1060
Blitar	: 979, 984, 1211
Blora	: 450, 959
Bobonaro	: 1141
Bogor	: 34, 441, 443, 445, 446, 448, 449, 908, 923
Bojonegoro	: 29, 360, 992

Bolaang Mongondow	: 800, 1063
Bondowoso	: 283, 990
Bone	: 391, 1097
Boyolali	: 939
Brebes	: 944
Budiardjo	: 192, 207, 213
Bugis, Masiga	: 455
Bukittinggi	: 533 - 545, 844
Bulan Bintang	: 310
Buleleng	: 1019
Bulukumba	: 391, 1081, 1098
Bulungan	: 1054
Bungo Tebo	: 865
Buol Toli-Toli	: 1068
Burhan, Latief	: 446
Burhanuddin Harahap	: 20
Buruh	: 134, 288
Buton	: 1075
C	
Chalid, Idham	: 1198
Ciamis	: 930
Cianjur	: 925
Cilacap	: 957
Cimahi	: 794
Cirebon	: 448, 456, 911, 931, 1253
Cokrokusumo, Mistar	: 1176
D	
Dairi	: 836
Daryatmo	: 1191
Datuk, Nursyirwan Noer	: 446
Dawid, Mukri	: 1176
Deli Serdang	: 483, 488, 489, 828
Demak	: 949
Demokrasi Pancasila	: 1218
Denpasar	: 454, 1013, 1180
Dewan Pertimbangan Agung	: 312, 313, 1198, 1226 - 1250
Dhanny SN, H.R.	: 462
Dharma, Anwar	: 1166
Dili	: 1138
Djalil, Andi Rasyid	: 462

Djamin, Awaluddin	: 343
Djojoadhiningrat, Abdoel'sis	: 136
Dompu	: 256, 1107
Donggala	: 1070
E	
Ende	: 1111
Enrekang	: 1082
Ermera	: 1143
F	
Fajar, Malik	: 439
Fak-Fak	: 1131
Fatmawati	: 798
Flores Timur	: 1112
Front Nasional	: 42, 289
G	
Gantong, Y	: 1178
Garut	: 454, 929
Gedung Soboharsono	: 186
Gerakan Pembela Pancasila	: 280, 434
Gianyar	: 387, 1014
Golonga Karya (Golkar)	: 38, 56, 154, 195, 197, 206, 208, 211, 212, 217, 219, 228, 232, 285 - 287, 317, 335, 337 - 343, 353 - 355
Goncalves, I Guilherme Maria	: 799
Gorontalo	: 1058, 1061
Gowa	: 391, 1079
GP Anshar	: 291, 1216
Gresik	: 998
Grobogan	: 942
Gunung Kidul	: 735 - 749, 758 - 767, 973
H	
Habibie, B.J.	: 232, 443
Halmahera Tengah	: 1125
Hamengkubuwono IX, Sri Sultan	: 650 - 652, 654, 773, 780
Hamid, Dedi	: 441
Hamid, Syarwan	: 439, 800
Harahap, Syarifudin	: 440
Hardjosumpeno	: 354

Hariato, Gregorius Seto	: 444
Harjono, Anwar	: 1205
Harjono, Budi	: 441, 442, 456
Harmoko	: 800
Hartono, Dimiyati	: 449
Hasan, Fuad	: 343, 394
Hasan, H	: 1177
Hasan, Sahar L.	: 440
Hasibuan, Germanikus	: 461
Hasyim, HM Yusuf	: 447
Hehamahua, Abdullah	: 443
Hulu Sungai Selatan	: 1041
Hulu Sungai Tengah	: 1042
Hulu Sungai Utara	: 1048
Humardani, Sujono	: 228
Hutapea, Buttu R	: 445

I

I Gusti Ngurah Ketut Sidya	: 1180
I Gusti Putu Ratu	: 1180
Ikatan Bekas Pejuang Islam	: 1210
Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI)	: 325, 326
Indragiri Hilir	: 872
Indragiri Hulu	: 870
Indramayu	: 454, 920
<i>International Foundation For Election Systems</i>	: 1254
Irian Barat	: 219, 220, 799
Irian Jaya	: 446, 1126
Iskandar, Isdar	: 1187
Ismail, Danu	: 460
Ismail, Nur Mahmudi	: 450
Isman, Hayono	: 444

J

Jakarta Barat	: 455, 903
Jakarta Pusat	: 445, 446, 788, 800, 901
Jakarta Selatan	: 191, 443, 446, 449, 789, 904
Jakarta Timur	: 336, 449, 800, 902
Jakarta Utara	: 455, 905
Jalil, Andi Rasyid	: 462

Jambi	: 859, 860
Jawa Barat	: 24, 28, 370, 400, 443, 446, 454, 455, 906, 1179, 1182, 1194, 1228
Jawa Tengah	: 28, 172, 228, 379, 420, 440, 446, 449, 450, 546, 547, 731, 732, 932, 1181, 1192, 1222, 1228
Jawa Timur	: 24, 27, 244, 305, 974, 1175, 1191, 1217, 1223, 1228
Jaya, Andi Achmad. S.	: 454
Jayapura	: 1127, 1130
Jember	: 991
Jeneponto	: 1083
Jepara	: 941
Joedo, Gunadi Malang	: 461
Jombang	: 997
Jual-beli surat suara	: 1208
Jusuf, M.	: 230

K

Kabinet Dwikora	: 288
Kalimantan	: 1, 141, 407, 465
Kalimantan Barat	: 1022, 1217
Kalimantan Selatan	: 408, 449, 1038, 1176, 1199
Kalimantan Tengah	: 441, 1030, 1193
Kalimantan Timur	: 263, 291, 376, 397, 796, 1050, 1217
Kampar	: 868
Kapuas Hulu	: 1026
Karang Anyar	: 967
Karang Asem	: 1020
Karawang	: 400, 918
Karo	: 503, 832
Kasiepo, Frans	: 219
Kebumen	: 961
Kecurangan Pemilu	: 97, 1211, 1255, 1256
Kediri	: 446, 456, 976, 994
Kendal	: 446, 943
Kendari	: 1072
Kerinci	: 863
Ketapang	: 1028
Ki Hajar Dewantoro	: 710
Klungkung	: 1017
Kolaka	: 1073

Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban	: 1222
Kompas, Harian	: 36
Korupsi	: 1215
Kotabaru	: 1046
Kotawaringin Barat	: 1036
Kotawaringin Timur	: 1035
Kovalima	: 1149
Kudus	: 966
Kuningan	: 922
Kupang	: 181 - 183, 1113
Kusumaatmadja, Sarwono	: 337, 342, 390, 425
Kutai	: 446, 1053
Kwik Kian Gie	: 447, 464

L

Labuhan Batu	: 831
Lamongan	: 1003
Lampung Barat	: 899
Lampung Selatan	: 898, 1220
Lampung Tengah	: 296, 896
Lampung Utara	: 897
Langkat	: 443, 504 - 513, 837
Lapunu	: 37, 292, 297 - 299, 305, 376, 469, 1218, 1225
Lautem	: 1145
Lebak	: 915
Limapuluh Kota	: 855
Liquica	: 1146
Lombok Barat	: 1102
Lombok Tengah	: 1106
Lombok Timur	: 1104
Lumajang	: 456, 472, 996
Luwu	: 1084

M

Ma'mun, Syukron /Sukron	: 439, 444
Machmud, Amir	: 189, 190, 192, 196, 197, 206, 208, 211, 217, 218, 1175, 1197
Madiun	: 123, 305, 360, 978, 1009
Madjid, Abdul	: 353
Madura	: 33, 409, 450, 794

Magelang	: 936, 955
Magetan	: 1010
Mahendra, Yusril Ihza	: 442
Majalengka	: 921
Majene	: 1085
Makmum, KH Abdul Suafon	: 446
Malang	: 977, 985
Mali, Marcus	: 441
Maluku	: 371, 443, 1120, 1178, 1217
Maluku Tengah	: 239, 1123
Maluku Tenggara	: 1124
Maluku Utara	: 1122
Mamuju	: 1096
Manado	: 382, 383, 1059
Manatuto	: 1148
Manggarai	: 1119
Mangunagoro, RMT. Pandji	: 547
Manihuruk, AE	: 335, 337, 390
Manokwari	: 1133
Mantik, G.H.	: 1177
Mantra, Ida Bagus	: 1180
Manufahi	: 1147
Marchum, Moh	: 1225
Mardjono, Hartono	: 457
Maros	: 296, 391, 1086
Maruto	: 445
Marwoto	: 219
Masjkur, KH.	: 1215
Maskad, Jamhari	: 459
Masyumi	: 29, 254, 255, 256, 268, 282, 315, 356, 364, 375, 382, 431 - 433, 436, 443, 452, 532, 635, 1201
Mataram	: 1101
Mboi, Ben	: 1189
Medan	: 173, 174, 229, 350, 440, 483, 487 - 489, 826, 1166 - 1170
Mediala, Adil	: 443
Merauke	: 1135
Meulaboh	: 456, 558
Miftah, Agus	: 458
Moerdani, L.B.	: 425
Moerdiono	: 388, 397

Mojokerto	: 980, 986
Muara Enim	: 885
Mufti, Muhammad	: 443
Muhammadiyah	: 309, 311
Muladi	: 439
Mulyani, Syarfi	: 452
Mulyaningsih, Sri	: 454
Muna	: 1074
Musi Banyuasin	: 883
Musi Rawas	: 877, 888
Muslim, KH. Mulyana. S.	: 439
Muso	: 365

N

Nahdlatul Ulama (NU)	: 27, 36, 38, 139, 291, 294, 296, 299, 300, 303, 305, 344 - 348, 369, 372 - 377, 1220, 1221, 1223
Naro, Jailani	: 444
Nasution, Adnan Buyung	: 232, 448
Natsir, M.	: 255
Ngada	: 1116
Nganjuk	: 999
Ngawi	: 1002
Nias	: 835, 841
Noeh, K.H Zaini Ahmad	: 440
Noer, Deliar	: 457
Noer, Moh.	: 1175
Noor, Zarkasie M	: 451
Nusa Tenggara Barat	: 141, 236, 1100
Nusa Tenggara Timur	: 141, 1108, 1189

O

Ogan Komering Ilir	: 385, 386, 573 - 575, 580, 585, 881
Ogan Komering Ulu	: 878
Oposisi	: 255, 282
Organisasi Pemuda Rakyat	: 254

P

Pacitan	: 1011
Padang	: 419, 443, 845, 846
Padang Panjang	: 845
Padang Pariaman	: 853

Pak Pahan, Mochtar	: 439
Palangkaraya	: 1031, 1193
Palembang	: 30, 296, 386, 441, 443, 454, 574, 577 - 580, 582 - 584, 586, 792, 880, 1171
Palinggi, John N.	: 459, 460, 461, 462, 464
Palu	: 1066
Pamekasan	: 1008
Pamungkas, Sri Bintang	: 447
Pandeglang	: 914
Panggabean, M.	: 189, 217, 341
Pangkajene	: 1087
Pangkal Pinang	: 867, 879
Paniai	: 1128
Panitia Pemilihan Luar Negeri	: 90, 1153
Panjaitan, Merphin	: 463
Pare-Pare	: 1078
Partai Abul Yatama (PAY)	: 439, 458
Partai Aliansi Demokrasi Indonesia (PADI)	: 441, 449
Partai Amanat Nasional (PAN)	: 442, 447, 459
Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI)	: 442, 445
Partai Bulan Bintang (PBB)	: 440, 442, 446, 457
Partai Buruh	: 279
Partai Buruh Nasional (PBN)	: 439, 455
Partai Cinta Damai (PCD)	: 440, 444, 445, 454
Partai Daulat Rakyat (PDR)	: 440, 446, 448, 454, 458, 464
Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	: 152, 313, 336, 413, 441, 442, 445, 446, 448, 449, 454 - 456, 799, 1186, 1199, 1250
Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)	: 444, 463
Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	: 439, 443, 453, 454
Partai Indonesia Baru (PIB)	: 456, 440, 441, 449, 456
Partai Indonesia Raya (Parindra)	: 254, 277
Partai Islam Demokrat (PID)	: 455
Partai Katholik Demokrat (PKD)	: 441, 454
Partai Keadilan (PK)	: 443, 444, 450, 455
Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP)	: 442, 444, 448, 450, 453, 454, 456
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	: 442, 450, 454, 456, 463

Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (Partai KAMI)	: 441, 449, 459
Partai Kebangkitan Ummat (PKU)	: 441, 447, 454
Partai Kebangsaan Merdeka (PKM)	: 440, 454
Partai Komunis Indonesia (PKI)	: 254, 261, 267, 278, 290, 298, 318, 319, 321, 322, 323, 325, 357 - 359, 361, 362, 365, 366, 383, 385, 426 - 430, 434, 435, 1214
Partai Kristen Nasional Indonesia (Krisna)	: 327 - 333, 440, 452
Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)	: 441, 446, 449, 450, 454, 456,
Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)	: 274, 288, 289, 455, 459
Partai Nahdlatul Ummat (PNU)	: 375, 376, 439, 441, 444, 446, 450, 453, 454, 455
Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI)	: 440, 442, 454, 461
Partai Nasional Demokrat	: 442, 454
Partai Nasional Indonesia (PNI)	: 315, 350, 353, 354, 434, 448
Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis	: 446, 456, 462
Partai Nasional Indonesia Masa Marhaen	: 440, 454, 455, 461
Partai Pancasila	: 280
Partai Pekerja Indonesia	: 441, 442, 456
Partai Persatuan (PP)	: 444, 454, 460
Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR)	: 259, 272
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	: 36, 40, 153, 232, 294, 304, 353, 354, 373, 440 - 444, 446, 447, 449, 454, 456, 472, 799, 800, 1186, 1198
Partai Pilihan Rakyat	: 444, 454, 455
Partai Politik Rakyat Marhaen Indonesia	: 275
Partai Politik Tharikat Islam (PPTI)	: 133
Partai Rakyat Demokrat (PRD)	: 454, 463
Partai Rakyat Indonesia (PARI)	: 449, 458
Partai Rakyat Indonesia (PRI)	: 271, 276
Partai Rakyat Nasional (PRN)	: 251, 254, 258, 261

Partai Republik (PR)	: 264, 440, 441, 460
Partai Republik Indonesia (Parindo)	: 257
Partai Solidaritas Pekerja (PSP)	: 440, 441
Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)	: 440, 448, 455
Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI)	: 446, 454
Partai Sosialis Indonesia (PSI)	: 254, 1171
Partai Syarikat Islam Indonesia - 1905	: 334, 460
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	: 260, 265, 270, 350, 375, 439, 440, 443, 456
Partai Ummat Islam (PUI)	: 452, 457
Partai Ummat Muslimin Indonesia (PUMI)	: 442, 447, 457, 462
Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI)	: 447, 454, 455, 457
Pasaman	: 854
Pasir	: 1037, 1056
Pasuruan	: 447, 982, 1006
Pati	: 945
Payakumbuh	: 849
Pekalongan	: 456, 937, 953
Pelajar Islam Indonesia (PII)	: 315
Pemalang	: 340, 956
Pematang Siantar	: 822
Pemuda Rakyat	: 254, 360
Penjara Kalisosok	: 792
Persatuan Bekas Pejuang Bersenjata RI	: 1211
Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI)	: 301
Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	: 261, 275
Pesisir Selatan	: 858
Petisi 50	: 1251
Pidie	: 104, 105, 815
Pinrang	: 1088
Poerwokoesoemo, Soedarisman	: 185, 186
Polewali	: 1089
Ponorogo	: 299, 989

Pontianak	:	454, 1023, 1025
Porwayla, Albert	:	1178
Poso	:	1069
Pranolo, Tjokro	:	1190
Priyosudarmo, Sunandar	:	1191
Probolinggo	:	981, 988
Probosutejo	:	462
Purwakarta	:	455, 919
Purworejo	:	963

R

Rachman, Aulia	:	458
Rachmatullah	:	1176
Rahawaling	:	1178
Rais, Amin	:	439, 442
Rejang Lebong	:	893
Rembang	:	946
Riau	:	866, 869
Royanudin AS, KH. M.	:	452
Rudini	:	232
Rumah Sakit Cipto	:	799
Mangunkusumo		
Rustam, Supardjo	:	335, 1181, 1192
Rustamadji	:	546
Rustamadji, Sutopo	:	191

S

Sabang	:	812
Sadikin, Ali	:	192, 1175
Sahid, Soleh	:	441
Said, Salim	:	463
Sajarwo, Isyana W.	:	1197
Salatiga	:	935
Saleh, Ibnu	:	799
Samarinda	:	440, 1052
Sambas	:	1024
Sampang	:	409, 1004
Sangihe, Kep.	:	1062
Santoso, Imam	:	458
Sape	:	175 - 179
Sarbupri	:	266, 368
Sarolangun Bangko	:	861

Sastradikara	: 173
Sastroamidjojo, Ali	: 260
Sawah Lunto	: 850, 852, 1187
Seda, Frans	: 189
Selayar	: 1090
Senoadji, Oemar	: 199
Serang	: 443, 450, 456, 800, 913
Serikat Buruh	: 318, 360, 368
Sibolga	: 852
Sidoarjo	: 362, 983
Sikka	: 1114
Simalungun	: 842
Sindereng Rappang	: 1091
Sinjai	: 1099
Sintang	: 1029
Siraj, Said Agil	: 465
Sitompul, Guara Mariam	: 452
Situbondo	: 993
Sleman	: 444, 454, 689, 690, 698, 971,
SOBSI	: 261, 318 - 324
Soebonon, R.	: 205
Soedarman, Soesilo	: 229
Soedomo	: 202
Soekowati, Soenawar	: 353
Soenandar Prijosudarmo	: 196, 206, 208, 211, 214, 218
Soepardjo	: 380
Soeprapto	: 439
Soeprapto, R. R.	: 1258
Soeryohadi (Ny.)	: 434
Solok	: 532
Soplanit, Toha	: 1178
Soppeng	: 1092
Sragen	: 950
Subagyo	: 216
Subang	: 400, 454, 927
Sudharmono	: 337 - 340, 342, 387 - 393, 395 - 404, 406 - 410, 420 - 423, 425, 789, 1192
Sugama, Yoga	: 208
Sugandhi, Mien	: 441, 446, 456, 449, 450
Suharto	: 38, 189, 212, 217, 336, 350 - 354, 442, 788, 790, 795, 799, 800, 1188, 1191, 1198
Suhud, M. Kharis	: 1199

Sukabumi	: 356, 909, 924
Sukamto, R.	: 1194
Sukarno	: 798
Sukarnoputra, Guruh	: 456
Sukarnoputri, Megawati	: 439, 442, 445, 446, 448, 800
Sukarnoputri, Sukmawati	: 448
Sukoharjo	: 228, 282, 962
Sulawesi Selatan	: 391, 442, 453, 454, 455, 1076, 1194
Sulawesi Tengah	: 1065
Sulawesi Tenggara	: 1071, 1194
Sulawesi Utara	: 245, 364, 382, 383, 455, 1057, 1177, 1186
Sulistomo, Moh. Bambang	: 441
Sumadi AS, Nyi	: 1171
Sumampouw, Fritz	: 1177
Sumatera Selatan	: 6, 876, 1194, 1195, 1217
Sumatera Utara	: 6, 300, 406, 470, 821, 1166, 1169, 1217, 1228
Sumba Barat	: 1118
Sumbawa	: 443, 446, 1103
Sumedi, Bambang	: 1195
Sumenep	: 1005
Sunarti, Etty	: 454
Sunda Kecil	: 6, 180
Sunoto, Kapto	: 215
Suparjan, J. Ari	: 796
Surabaya	: 27, 362, 792, 975, 1175
Surakarta	: 119, 379, 447, 934
Surjana, E	: 1224
Susanto, SD (Ny.)	: 434
Sutedjo	: 174
Sutirto, Sudarto	: 1180
Sutojo	: 191
Suwandi	: 1191
Suwandi, Wang	: 208
Suwohadi	: 228
Syafuan, Eddy	: 442
Syamsahril	: 449
Syukur, H. Muhamad	: 1179, 1182, 1183
T	
Tabalong	: 1045

Tabanan	: 1016
Takalar	: 1093
Tambunan, Humala	: 455
Tan, Zulfikar	: 455
Tanah Datar	: 847, 851
Tanah Laut	: 1044
Tangerang	: 296, 441, 448, 450, 907, 916, 1179, 1182, 1183
Tanjung Balai	: 518, 519, 823, 840
Tanjung Jabung	: 864
Tanjung Pandan	: 569, 570, 571, 572, 578, 1172
Tanjung, Akbar	: 335, 439, 446, 449, 450, 454, 456, 800
Tapanuli Selatan	: 839
Tapanuli Tengah	: 529, 530, 531, 838
Tapanuli Utara	: 829
Tapin	: 1043
Tasikmalaya	: 912
Tebing Tinggi	: 827, 834
Tegal	: 938, 954
Temanggung	: 960
Thoyib, Ali	: 446
Tien Soeharto	: 210, 799
Timor Tengah	: 1115
Timor Tengah Utara	: 1117
Timor Timur	: 799, 800, 1137, 1193
Tionghoa	: 269, 533, 699, 719
Toha, M.	: 1177
Trenggalek	: 987
Tuban	: 283, 1001
Tulungagung	: 995
U	
Ujung Pandang	: 454, 1077
V	
Viqueque	: 1150
W	
Wahid, Abdurrahman / Gus Dur	: 439
Wajo	: 1094
Wardojo, Subeno Sastro	: 353
Washington	: 1254

Wauran, Markus	: 461
Winarno	: 792
Wirakusuma, H.M. M. Syafi'i	: 1198
Wiranto	: 439
Wonogiri	: 952
Wonosobo	: 964

Y

Yapen Wropen	: 1132
Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila	: 395
Yusuf, H. Anwar	: 447

Z

Zuhri, Saifuddin	: 36
------------------	------

2. Daftar Singkatan

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BTI	: Barisan Tani Indonesia
CC (PKI)	: <i>Committee Central</i>
CHTH	: Chung Hwa Tsung Hui
Dati	: Daerah Tingkat
DCS	: Daftar Calon Sementara
Dirjen	: Direktorat Jenderal
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRDS	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
DVD	: <i>Digital Versatile Disc</i>
GI	: Gelora Indonesia
GP Anshar	: Gerakan Pemuda Anshar
GPII	: Gerakan Pemuda Islam Indonesia
Hankam	: Pertahanan Keamanan
Hansip Wanra	: Pertahanan Sipil Perlawanan Rakyat
Harlah	: Hari lahir
HIPMI	: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
HUT	: Hari Ulang Tahun
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
IPPI	: Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia
Japen	: Jawatan Penerangan
Jurkam	: Juru Kampanye
Kapolri	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
KDH	: Kepala Daerah
Kempen	: Kementerian Penerangan
Korpri	: Korps Pegawai Republik Indonesia
Kowilhan	: Komando Wilayah Pertahanan
KPM	: Kabinet Perdana Menteri
KPP	: Kantor Pemilihan Pusat
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Lapunu	: Lajnah Pemenangan Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama
Letjend	: Letnan Jenderal
LPKB	: Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa

LPU	: Lembaga Pemilihan Umum
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
Menhankam	: Menteri Pertahanan dan Keamanan
Menko Hubra	: Menteri Kompartemen Hubungan dengan Rakyat
Mensesneg	: Menteri Sekretaris Negara
MKGR	: Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Murba	: Partai Musyawarah Rakyat Banyak
Muspida	: Musyawarah Pimpinan Daerah
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NU	: Nahdlatul Ulama
PADI	: Partai Aliansi Demokrasi Indonesia
PAN	: Partai Amanat Nasional
PARI	: Partai Rakyat Indonesia
Parindo	: Partai Republik Indonesia
Parindra	: Partai Indonesia Raya
Partai KAMI	: Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
Partai Krisna	: Partai Kristen Nasional Indonesia
Partai SUNI	: Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
PBB	: Partai Bulan Bintang
PBI	: Partai Bhinneka Tunggal Ika
PBN	: Partai Buruh Nasional
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PCD	: Partai Cinta Damai
PCNU	: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDKB	: Partai Demokrasi Kasih Bangsa
PDR	: Partai Daulat Rakyat
Pelita	: Pembangunan Lima Tahun
Pemilu	: Pemilihan Umum
Permai	: Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia
PFN	: Perusahaan Film Negara
PIB	: Partai Indonesia Baru
PID	: Partai Islam Demokrat
PII	: Pemuda Islam Indonesia
PIR	: Partai Persatuan Indonesia Raya
PK	: Partai Keadilan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKD	: Partai Katholik Demokrat
PKI	: Partai Komunis Indonesia

PKM	: Partai Kebangsaan Merdeka
PKP	: Partai Keadilan dan Pembangunan
PKU	: Partai Kebangkitan Ummat
PNBI	: Partai Nasional Bangsa Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PNU	: Partai Nahdlatul Ummat
PP	: Partai Persatuan
PPD	: Panitia Pemilihan Daerah
PPFN	: Perum Produksi Film Negara
PPI	: Panitia Pemilihan Indonesia
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PPTI	: Partai Politik Tharikat Islam
PR	: Partai Republik
PRD	: Partai Rakyat Demokrat
PRI	: Partai Rakyat Indonesia
PRN	: Partai Rakyat Nasional
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PSII	: Partai Syarikat Islam Indonesia
PSP	: Partai Solidaritas Pekerja
PTIK	: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
PUDI	: Partai Uni Demokrasi Indonesia
PUI	: Partai Ummat Islam
PUMI	: Partai Ummat Muslimin Indonesia
RRI	: Radio Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
Sarbupri	: Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
Setwapres	: Sekretariat Wakil Presiden
SOBSI	Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SPSI	: Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
Tk.	: Tingkat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
tt	: Tanpa Tanggal
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UUD	Undang-Undang Dasar
UUDES	: Undang-Undang Dasar Sementara
VCD	: <i>Video Compact Disc</i>
WNI	: Warga Negara Indonesia
WNRI	: Warga Negara Republik Indonesia

INDEKS

A

Abdulgani, Ruslan	: 315
Abdullah, SA. Abu Bakar (KH.)	: 456
Abdurrahman, Eddy	: 325
Aceh	: 442, 443, 454, 455, 456, 810, 811
Aceh Barat	: 817
Aceh Besar	: 820
Aceh Selatan	: 813
Aceh Tengah	: 814
Aceh Tenggara	: 818
Aceh Timur	: 816
Aceh Utara	: 104, 105, 819
Adisuria, Rosadi Brata	: 460
Agama	: 856
Audit, DN	: 426
Aileu	: 1139
Ainaro	: 1140
Al Rasyid, Harun	: 232
Algadrie, Hamid	: 1209
Alimin	: 365
Alor	: 1109
Ambenu	: 1144
Ambon	: 371, 440, 443, 446, 1121, 1178
Anas, Azwar	: 1187
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)	: 56, 80, 162, 198, 202, 290, 300, 349, 425, 442, 1197, 1198
Angkatan Perang	: 5, 8, 9, 544, 716, 793
Anies, H.M. Junus	: 307
Anshary, M. Isa	: 1204
Arif, Andi	: 463
Asahan	: 830

B

Badan Pembantu Presiden Urusan Pelaksanaan Pengawasan Partai- Partai	: 42
Badung	: 1018
Baidlowi, Aisyah Hamid	: 448
Bali	: 141, 387, 450, 454, 456, 792, 1012, 1180
Balikpapan	: 1051
Banda Aceh	: 443, 455, 811,
Bandar Lampung	: 444, 895
Bandoro, Ahmad	: 1196
Bandung	: 448, 454, 792, 794, 801, 910, 926, 1253
Banggai	: 1067
Bangka	: 450, 886
Bangkalan	: 1007

Bangli	: 1015
Banjar	: 1040
Banjarmasin	: 296, 454, 792, 1039, 1176
Banjarnegara	: 948
Bantaeng	: 1080
Bantul	: 750 - 757, 970
Banyumas	: 37, 947
Banyuwangi	: 369, 1000
Barisan Tani Indonesia (BTI)	: 1216
Barito Selatan	: 1034, 1047
Barito Utara	: 1033
Barru	: 1095
Batam	: 454, 874
Batang	: 958
Batang Hari	: 862
Batubara, Cosmas	: 231
Baucau	: 1142
Bekasi	: 296, 448, 455, 917
Belitung	: 576 - 579, 583, 384, 887
Belu	: 1110
Bengkalis	: 871
Bengkulu	: 384, 456, 889, 890, 1195
Bengkulu Selatan	: 892
Bengkulu Utara	: 891
Berau	: 1055
Biak Numfor	: 1134
Bima	: 367, 1105
Binjai	: 504 - 507, 509 - 513, 824, 833
Bintang, Rusli	: 439
Bitung	: 1060
Blitar	: 979, 984, 1211
Blora	: 450, 959
Bobonaro	: 1141
Bogor	: 34, 441, 443, 445, 446, 448, 449, 908, 923
Bojonegoro	: 29, 360, 992
Bolaang Mongondow	: 800, 1063
Bondowoso	: 283, 990
Bone	: 391, 1097
Boyolali	: 939
Brebes	: 944
Budiardjo	: 192, 207, 213
Bugis, Masiga	: 455
Bukittinggi	: 533 - 545, 844,
Bulan Bintang	: 310
Buleleng	: 1019
Bulukumba	: 391, 1081, 1098
Bulungan	: 1054

Bungo Tebo	: 865
Buol Toli-Toli	: 1068
Burhan, Latief	: 446
Burhanuddin Harahap	: 20
Buruh	: 134, 288,
Buton	: 1075

C

Chalid, Idham	: 1198
Ciamis	: 930
Cianjur	: 925
Cilacap	: 957
Cimahi	: 794
Cirebon	: 448, 456, 911, 931, 1253
Cokrokusumo, Mistar	: 1176

D

Dairi	: 836
Daryatmo	: 1191
Datuk, Nursyirwan Noer	: 446
Dawid, Mukri	: 1176
Deli Serdang	: 483, 488, 489, 828
Demak	: 949
Demokrasi Pancasila	: 1218
Denpasar	: 454, 1013, 1180
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)	: 312, 313, 1198, 1226 - 1250
Dhanny SN, H.R.	: 462
Dharma, Anwar	: 1166
Dili	: 1138
Djalil, Andi Rasyid	: 462
Djamin, Awaluddin	: 343
Djojoadhiningrat, Abdoel' sis	: 136
Dompu	: 256, 1107
Donggala	: 1070

E

Ende	: 1111
Enrekang	: 1082
Ermera	: 1143

F

Fajar, Malik	: 439
Fak-Fak	: 1131
Fatmawati	: 798
Flores Timur	: 1112
Front Nasional	: 42, 289

G

Gantong, Y	: 1178
Garut	: 454, 929
Gedung Soboharsono	: 186
Gerakan Pembela Pancasila	: 280, 434
Gianyar	: 387, 1014
Golonga Karya (Golkar)	: 38, 56, 154, 195, 197, 206, 208, 211, 212, 217, 219, 228, 232, 285 - 287, 317, 335, 337 - 343, 353 - 355
Goncalves, I Guilherme Maria	: 799
Gorontalo	: 1058, 1061
Gowa	: 391, 1079
GP Anshar	: 291, 1216
Gresik	: 998
Grobogan	: 942
Gunung Kidul	: 735 - 749, 758 - 767, 973

H

Habibie, B.J.	: 232, 443,
Halmahera Tengah	: 1125
Hamengkubuwono IX, Sri Sultan	: 650 - 652, 654, 773, 780
Hamid, Dedi	: 441
Hamid, Syarwan	: 439, 800
Harahap, Syarifudin	: 440
Hardjosumpeno	: 354
Harianto, Gregorius Seto	: 444
Harjono, Anwar	: 1205
Harjono, Budi	: 441, 442, 456
Harmoko	: 800
Hartono, Dimiyati	: 449
Hasan, Fuad	: 343, 394
Hasan, H	: 1177
Hasan, Sahar L.	: 440
Hasibuan, Germanikus	: 461
Hasyim, HM Yusuf	: 447
Hehamahua, Abdullah	: 443
Hulu Sungai Selatan	: 1041
Hulu Sungai Tengah	: 1042
Hulu Sungai Utara	: 1048
Humardani, Sujono	: 228
Hutapea, Buttu R	: 445

I

I Gusti Ngurah Ketut Sidya	: 1180
I Gusti Putu Ratu	: 1180
Ikatan Bekas Pejuang Islam	: 1210
Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI)	: 325, 326
Indragiri Hilir	: 872

Indragiri Hulu	: 870
Indramayu	: 454, 920
<i>International Foundation For Election Systems</i>	: 1254
Irian Barat	: 219, 220, 799
Irian Jaya	: 446, 1126
Iskandar, Isdar	: 1187
Ismail, Danu	: 460
Ismail, Nur Mahmudi	: 450
Isman, Hayono	: 444

J

Jakarta Barat	: 455, 903
Jakarta Pusat	: 445, 446, 788, 800, 901
Jakarta Selatan	: 191, 443, 446, 449, 789, 904
Jakarta Timur	: 336, 449, 800, 902
Jakarta Utara	: 455, 905
Jalil, Andi Rasyid	: 462
Jambi	: 859, 860
Jawa Barat	: 24, 28, 370, 400, 443, 446, 454, 455, 906, 1179, 1182, 1194, 1228
Jawa Tengah	: 28, 172, 228, 379, 420, 440, 446, 449, 450, 546, 547, 731, 732, 932, 1181, 1192, 1222,
Jawa Timur	: 24, 27, 244, 305, 974, 1175, 1191, 1217, 1223, 1228
Jaya, Andi Achmad. S.	: 454
Jayapura	: 1127, 1130
Jember	: 991
Jeneponto	: 1083
Jepara	: 941
Joedo, Gunadi Malang	: 461
Jombang	: 997
Jual-beli surat suara	: 1208
Jusuf, M.	: 230

K

Kabinet Dwikora	: 288
Kalimantan	: 1, 141, 407, 465
Kalimantan Barat	: 1022, 1217
Kalimantan Selatan	: 408, 449, 1038, 1176, 1199
Kalimantan Tengah	: 441, 1030, 1193
Kalimantan Timur	: 263, 291, 376, 397, 796, 1050, 1217
Kampar	: 868
Kapuas Hulu	: 1026
Karang Anyar	: 967
Karang Asem	: 1020
Karawang	: 400, 918
Karo	: 503, 832
Kasiepo, Frans	: 219

Kebumen	: 961
Kecurangan Pemilu	: 97, 1211, 1255, 1256
Kediri	: 446, 456, 976, 994
Kendal	: 446, 943
Kendari	: 1072
Kerinci	: 863
Ketapang	: 1028
Ki Hajar Dewantoro	: 710
Klungkung	: 1017
Kolaka	: 1073
Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban	: 1222
Kompas, Harian	: 36
Korupsi	: 1215
Kotabaru	: 1046
Kotawaringin Barat	: 1036
Kotawaringin Timur	: 1035
Kovalima	: 1149
Kudus	: 966
Kuningan	: 922
Kupang	: 181 - 183, 1113
Kusumaatmadja, Sarwono	: 337, 342, 390, 425
Kutai	: 446, 1053
Kwik Kian Gie	: 447, 464

L

Labuhan Batu	: 831
Lamongan	: 1003
Lampung Barat	: 899
Lampung Selatan	: 898, 1220
Lampung Tengah	: 296, 896
Lampung Utara	: 897
Langkat	: 443, 504 - 513, 837
Lapunu	: 37, 292, 297 - 299, 305, 376, 469, 1218, 1225

Lautem	: 1145
Lebak	: 915
Limapuluh Kota	: 855
Liquica	: 1146
Lombok Barat	: 1102
Lombok Tengah	: 1106
Lombok Timur	: 1104
Lumajang	: 456, 472, 996,
Luwu	: 1084

M

Ma'mun, Syukron /Sukron	: 439, 444
-------------------------	------------

Machmud, Amir	: 189, 190, 192, 196, 197, 206, 208, 211, 217, 218, 1175, 1197
Madiun	: 123, 305, 360, 978, 1009
Madjid, Abdul	: 353
Madura	: 33, 409, 450, 794
Magelang	: 936, 955
Magetan	: 1010
Mahendra, Yusril Ihza	: 442
Majalengka	: 921
Majene	: 1085
Makmum, KH Abdul Suafon	: 446
Malang	: 977, 985
Mali, Marcus	: 441
Maluku	: 371, 443, 1120, 1178, 1217
Maluku Tengah	: 239, 1123
Maluku Tenggara	: 1124
Maluku Utara	: 1122
Mamuju	: 1096
Manado	: 382, 383, 1059
Manatuto	: 1148
Manggarai	: 1119
Mangunagoro, RMT. Pandji	: 547
Manihuruk, AE	: 335, 337, 390
Manokwari	: 1133
Mantik, G.H.	: 1177
Mantra, Ida Bagus	: 1180
Manufahi	: 1147
Marchum, Moh	: 1225
Mardjono, Hartono	: 457
Maros	: 296, 391, 1086
Maruto	: 445
Marwoto	: 219
Masjkur, KH.	: 1215
Maskad, Jamhari	: 459
Masyumi	: 29, 254, 255, 256, 268, 282, 315, 356, 364, 375, 382, 431 - 433, 436, 443, 452, 532, 635.
Mataram	: 1101
Mboi, Ben	: 1189
Medan	: 173, 174, 229, 350, 440, 483, 487 - 489, 826, 1166 - 1170
Mediala, Adil	: 443
Merauke	: 1135
Meulaboh	: 456, 558
Miftah, Agus	: 458
Moerdani, L.B.	: 425
Moerdiono	: 388, 397
Mojokerto	: 980, 986
Muara Enim	: 885
Mufti, Muhammad	: 443

Muhammadiyah	: 309, 311
Muladi	: 439
Mulyani, Syarfi	: 452
Mulyaningsih, Sri	: 454
Muna	: 1074
Musi Banyuasin	: 883
Musi Rawas	: 877, 888
Muslim, KH. Mulyana. S.	: 439
Muso	: 365

N

Nahdlatul Ulama (NU)	: 27, 36, 38, 139, 291, 294, 296, 299, 300, 303, 305, 344 - 348, 369, 372 - 377, 1220, 1221,
Naro, Jailani	: 444
Nasution, Adnan Buyung	: 232, 448
Natsir, M.	: 255
Ngada	: 1116
Nganjuk	: 999
Ngawi	: 1002
Nias	: 835, 841
Noeh, K.H Zaini Ahmad	: 440
Noer, Deliar	: 457
Noer, Moh.	: 1175
Noor, Zarkasie M	: 451
Nusa Tenggara Barat	: 141, 236, 1100
Nusa Tenggara Timur	: 141, 1108, 1189

O

Ogan Komering Ilir	: 385, 386, 573 - 575, 580, 585, 881
Ogan Komering Ulu	: 878
Oposisi	: 255, 282
Organisasi Pemuda Rakyat	: 254

P

Pacitan	: 1011
Padang	: 419, 443, 845, 846
Padang Panjang	: 845
Padang Pariaman	: 853
Pak Pahan, Mochtar	: 439
Palangkaraya	: 1031, 1193
Palembang	: 30, 296, 386, 441, 443, 454, 574, 577 - 580, 582 - 584, 586, 792, 880, 1171
Palinggi, John N.	: 459, 460, 461, 462, 464
Palu	: 1066
Pamekasan	: 1008
Pamungkas, Sri Bintang	: 447
Pandeglang	: 914
Panggabean, M.	: 189, 217, 341

Pangkajene	: 1087
Pangkal Pinang	: 867, 879
Paniai	: 1128
Panitia Pemilihan Luar Negeri	: 90, 1153
Panjaitan, Merphin	: 463
Pare-Pare	: 1078
Partai Abul Yatama (PAY)	: 439, 458
Partai Aliansi Demokrasi Indonesia (PADI)	: 441, 449
Partai Amanat Nasional (PAN)	: 442, 447, 459
Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI)	: 442, 445
Partai Bulan Bintang (PBB)	: 440, 442, 446, 457
Partai Buruh	: 279
Partai Buruh Nasional (PBN)	: 439, 455
Partai Cinta Damai (PCD)	: 440, 444, 445, 454
Partai Daulat Rakyat (PDR)	: 440, 446, 448, 454, 458, 464
Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	: 152, 313, 336, 413, 441, 442, 445, 446, 448, 449, 454 - 456, 799, 1186, 1199, 1250
Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)	: 444, 463
Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	: 439, 443, 453, 454
Partai Indonesia Baru (PIB)	: 456, 440, 441, 449, 456
Partai Indonesia Raya (Parindra)	: 254, 277
Partai Islam Demokrat (PID)	: 455
Partai Katholik Demokrat (PKD)	: 441, 454
Partai Keadilan (PK)	: 443, 444, 450, 455
Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP)	: 442, 444, 448, 450, 453, 454, 456
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	: 442, 450, 454, 456, 463
Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (Partai KAMI)	: 441, 449, 459
Partai Kebangkitan Ummat (PKU)	: 441, 447, 454
Partai Kebangsaan Merdeka (PKM)	: 440, 454
Partai Komunis Indonesia (PKI)	: 254, 261, 267, 278, 290, 298, 318, 319, 321, 322, 323, 325, 357 - 359, 361, 362, 365, 366, 383, 385, 426 - 430, 434, 435, 1214
Partai Kristen Nasional Indonesia (Krisna)	: 327 - 333, 440, 452
Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)	: 441, 446, 449, 450, 454, 456,
Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)	: 274, 288, 289, 455, 459
Partai Nahdlatul Ummat (PNU)	: 375, 376, 439, 441, 444, 446, 450, 453, 454, 455

Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI)	: 440, 442, 454, 461
Partai Nasional Demokrat	: 442, 454
Partai Nasional Indonesia (PNI)	: 315, 350, 353, 354, 434, 448
Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis	: 446, 456, 462
Partai Nasional Indonesia Masa Marhaen	: 440, 454, 455, 461
Partai Pancasila	: 280
Partai Pekerja Indonesia	: 441, 442, 456
Partai Persatuan (PP)	: 444, 454, 460
Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR)	: 259, 272
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	: 36, 40, 153, 232, 294, 304, 353, 354, 373, 440 - 444, 446, 447, 449, 454, 456, 472, 799, 800, 1186, 1198
Partai Pilihan Rakyat	: 444, 454, 455
Partai Politik Rakyat Marhaen Indonesia	: 275
Partai Politik Tharikat Islam (PPTI)	: 133
Partai Rakyat Demokrat (PRD)	: 454, 463
Partai Rakyat Indonesia (PARI)	: 449, 458
Partai Rakyat Indonesia (PRI)	: 271, 276
Partai Rakyat Nasional (PRN)	: 251, 254, 258, 261
Partai Republik (PR)	: 264, 440, 441, 460
Partai Republik Indonesia (Parindo)	: 257
Partai Solidaritas Pekerja (PSP)	: 440, 441
Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)	: 440, 448, 455
Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI)	: 446, 454,
Partai Sosialis Indonesia (PSI)	: 254, 1171
Partai Syarikat Islam Indonesia - 1905	: 334, 460
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	: 260, 265, 270, 350, 375, 439, 440, 443, 456
Partai Ummat Islam (PUI)	: 452, 457
Partai Ummat Muslimin Indonesia (PUMI)	: 442, 447, 457, 462
Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI)	: 447, 454, 455, 457
Pasaman	: 854
Pasir	: 1037, 1056
Pasuruan	: 447, 982, 1006
Pati	: 945
Payakumbuh	: 849
Pekalongan	: 456, 937, 953
Pelajar Islam Indonesia (PII)	315

Pemalang	: 340, 956
Pematang Siantar	: 822
Pemuda Rakyat	: 254, 360
Penjara Kalisosok	: 792
Persatuan Bekas Pejuang Bersenjata RI	: 1211
Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI)	: 301
Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	: 261, 275
Pesisir Selatan	: 858
Petisi 50	: 1251
Pidie	: 104, 105, 815
Pinrang	: 1088
Poerwokoesoemo, Soedarisman	: 185, 186
Polewali	: 1089
Ponorogo	: 299, 989
Pontianak	: 454, 1023, 1025
Porwayla, Albert	: 1178
Poso	: 1069
Pranolo, Tjokro	: 1190
Priyosudarmo, Sunandar	: 1191
Probolinggo	: 981, 988
Probosutejo	: 462
Purwakarta	: 455, 919
Purworejo	: 963

R

Rachman, Aulia	: 458
Rachmatullah	: 1176
Rahawaling	: 1178
Rais, Amin	: 439, 442
Rejang Lebong	: 893
Rembang	: 946
Riau	: 866. 869
Royanudin AS, KH. M.	: 452
Rudini	: 232
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo	: 799
Rustam, Supardjo	: 335, 1181, 1192
Rustamadji	: 546
Rustamadji, Sutopo	: 191

S

Sabang	: 812
Sadikin, Ali	: 192, 1175
Sahid, Soleh	: 441
Said, Salim	: 463
Sajarwo, Isyana W.	: 1197

Salatiga	: 935
Saleh, Ibnu	: 799
Samarinda	: 440, 1052
Sambas	: 1024
Sampang	: 409, 1004
Sangihe, Kep.	: 1062
Santoso, Imam	: 458
Sape	: 175 - 179
Sarbupri	: 266, 368
Sarolangun Bangko	: 861
Sastradikara	: 173
Sastroamidjojo, Ali	: 260
Sawah Lunto	: 850, 852, 1187
Seda, Frans	: 189
Selayar	: 1090
Senoadji, Oemar	: 199
Serang	: 443, 450, 456, 800, 913
Serikat Buruh	: 318, 360, 368
Sibolga	: 852
Sidoarjo	: 362, 983
Sikka	: 1114
Simalungun	: 842
Sindereng Rappang	: 1091
Sinjai	: 1099
Sintang	: 1029
Siraj, Said Agil	: 465
Sitompul, Guara Mariam	: 452
Situbondo	: 993
Sleman	: 444, 454, 689, 690, 698, 971,
SOBSI	: 261, 318 - 324
Soebonon, R.	: 205
Soedarman, Soesilo	: 229
Soedomo	: 202
Soekowati, Soenawar	: 353
Soenandar Prijosudarmo	: 196, 206, 208, 211, 214, 218
Soepardjo	: 380
Soeprapto	: 439
Soeprapto, R. R.	: 1258
Soeryohadi (Ny.)	: 434
Solok	: 532
Soplanit, Toha	: 1178
Soppeng	: 1092
Sragen	: 950
Subagyo	: 216
Subang	: 400, 454, 927
Sudharmono	: 337 - 340, 342, 387 - 393, 395 - 404, 406 - 410, 420 - 423, 425, 789, 1192

Sugama, Yoga	: 208
Sugandhi, Mien	: 441, 446, 456, 449, 450
Suharto	: 38, 189, 212, 217, 336, 350 - 354, 442, 788, 790, 795, 799, 800, 1188, 1191, 1198
Suhud, M. Kharis	: 1199
Sukabumi	: 356, 909, 924
Sukamto, R.	: 1194
Sukarno	: 798
Sukarnoputra, Guruh	: 456
Sukarnoputri, Megawati	: 439, 442, 445, 446, 448, 800
Sukarnoputri, Sukmawati	: 448
Sukoharjo	: 228, 282, 962
Sulawesi Selatan	: 391, 442, 453, 454, 455, 1076, 1194
Sulawesi Tengah	: 1065
Sulawesi Tenggara	: 1071, 1194
Sulawesi Utara	: 245, 364, 382, 383, 455, 1057, 1177, 1186
Sulistomo, Moh. Bambang	: 441
Sumadi AS, Nyi	: 1171
Sumampouw, Fritz	: 1177
Sumatera Selatan	: 6, 876, 1194, 1195, 1217
Sumatera Utara	: 6, 300, 406, 470, 821, 1166, 1169, 1217, 1228
Sumba Barat	: 1118
Sumbawa	: 443, 446, 1103
Sumedi, Bambang	: 1195
Sumenep	: 1005
Sunarti, Etyy	: 454
Sunda Kecil	: 6, 180
Sunoto, Kapto	: 215
Suparjan, J. Ari	: 796
Surabaya	: 27, 362, 792, 975, 1175
Surakarta	: 119, 379, 447, 934
Surjana, E	: 1224
Susanto, SD (Ny.)	: 434
Sutedjo	: 174
Sutirto, Sudarto	: 1180
Sutojo	: 191
Suwandi	: 1191
Suwandi, Wang	: 208
Suwohadi	: 228
Syafuan, Eddy	: 442
Syamsahril	: 449
Syukur, H. Muhamad	: 1179, 1182, 1183

T

Tabalong	: 1045
Tabanan	: 1016
Takalar	: 1093
Tambunan, Humala	: 455
Tan, Zulfikar	: 455
Tanah Datar	: 847, 851
Tanah Laut	: 1044
Tangerang	: 296, 441, 448, 450, 907, 916, 1179, 1182, 1183
Tanjung Balai	: 518, 519, 823, 840
Tanjung Jabung	: 864
Tanjung Pandan	: 569, 570, 571, 572, 578, 1172
Tanjung, Akbar	: 335, 439, 446, 449, 450, 454, 456, 800,
Tapanuli Selatan	: 839
Tapanuli Tengah	: 529, 530, 531, 838
Tapanuli Utara	: 829
Tapin	: 1043
Tasikmalaya	: 912
Tebing Tinggi	: 827, 834
Tegal	: 938, 954
Temanggung	: 960
Thoyib, Ali	: 446
Tien Soeharto	: 210, 799
Timor Tengah	: 1115
Timor Tengah Utara	: 1117
Timor Timur	: 799, 800, 1137, 1193,
Tionghoa	: 269, 533, 699, 719
Toha, M.	: 1177
Trenggalek	: 987
Tuban	: 283, 1001
Tulungagung	: 995

U

Ujung Pandang	: 454, 1077
---------------	-------------

V

Viqueque	: 1150
----------	--------

W

Wahid, Abdurrahman / Gus Dur	: 439
Wajo	: 1094
Wardojo, Subeno Sastro	: 353
Washington	: 1254
Wauran, Markus	: 461
Winarno	: 792
Wirakusuma, H.M. M. Syafi'i	: 1198
Wiranto	: 439
Wonogiri	: 952

Wonosobo : 964

Y

Yapen Wropen : 1132

Yayasan Amal Bhakti Muslim : 395

Pancasila

Yusuf, H. Anwar : 447

Z

Zuhri, Saifuddin : 36

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BTI	: Barisan Tani Indonesia
CC (PKI)	: <i>Committee Central</i>
CHTH	: Chung Hwa Tsung Hui
Dati	: Daerah Tingkat
DCS	: Daftar Calon Sementara
Dirjen	: Direktorat Jenderal
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRDS	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
DVD	: <i>Digital Versatile Disc</i>
GI	: Gelora Indonesia
GP Anshar	: Gerakan Pemuda Anshar
GPII	: Gerakan Pemuda Islam Indonesia
Hankam	: Pertahanan Keamanan
Hansip Wanra	: Pertahanan Sipil Perlawanan Rakyat
Harlah	: Hari lahir
HIPMI	: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
HUT	: Hari Ulang Tahun
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
IPPI	: Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia
Japen	: Jawatan Penerangan
Jurkam	: Juru Kampanye
Kapolri	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
KDH	: Kepala Daerah
Kempen	: Kementerian Penerangan
Korpri	: Korps Pegawai Republik Indonesia
Kowilhan	: Komando Wilayah Pertahanan
KPM	: Kabinet Perdana Menteri
KPP	: Kantor Pemilihan Pusat
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Lapunu	: Lajnah Pemenangan Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama
Letjend	: Letnan Jenderal
LPKB	: Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa
LPU	: Lembaga Pemilihan Umum
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
Menhankam	: Menteri Pertahanan dan Keamanan
Menko Hubra	: Menteri Kompartemen Hubungan dengan Rakyat
Mensesneg	: Menteri Sekretaris Negara
MKGR	: Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong

MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Murba	: Partai Musyawarah Rakyat Banyak
Muspida	: Musyawarah Pimpinan Daerah
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NU	: Nahdlatul Ulama
PADI	: Partai Aliansi Demokrasi Indonesia
PAN	: Partai Amanat Nasional
PARI	: Partai Rakyat Indonesia
Parindo	: Partai Republik Indonesia
Parindra	: Partai Indonesia Raya
Partai KAMI	: Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
Partai Krisna	: Partai Kristen Nasional Indonesia
Partai SUNI	: Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
PBB	: Partai Bulan Bintang
PBI	: Partai Bhinneka Tunggal Ika
PBN	: Partai Buruh Nasional
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PCD	: Partai Cinta Damai
PCNU	: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDKB	: Partai Demokrasi Kasih Bangsa
PDR	: Partai Daulat Rakyat
Pelita	: Pembangunan Lima Tahun
Pemilu	: Pemilihan Umum
Permai	: Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia
PFN	: Perusahaan Film Negara
PIB	: Partai Indonesia Baru
PID	: Partai Islam Demokrat
PII	: Pemuda Islam Indonesia
PIR	: Partai Persatuan Indonesia Raya
PK	: Partai Keadilan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKD	: Partai Katholik Demokrat
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKM	: Partai Kebangsaan Merdeka
PKP	: Partai Keadilan dan Pembangunan
PKU	: Partai Kebangkitan Ummat
PNBI	: Partai Nasional Bangsa Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PNU	: Partai Nahdlatul Ummat
PP	: Partai Persatuan
PPD	: Panitia Pemilihan Daerah
PPFN	: Perum Produksi Film Negara
PPI	: Panitia Pemilihan Indonesia
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara

PPTI	: Partai Politik Tharikat Islam
PR	: Partai Republik
PRD	: Partai Rakyat Demokrat
PRI	: Partai Rakyat Indonesia
PRN	: Partai Rakyat Nasional
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PSII	: Partai Syarikat Islam Indonesia
PSP	: Partai Solidaritas Pekerja
PTIK	: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
PUDI	: Partai Uni Demokrasi Indonesia
PUI	: Partai Ummat Islam
PUMI	: Partai Ummat Muslimin Indonesia
RRI	: Radio Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
Sarbupri	: Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
Setwapres	: Sekretariat Wakil Presiden
SOBSI	Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SPSI	: Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
Tk.	: Tingkat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
tt	: Tanpa Tanggal
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UUD	Undang-Undang Dasar
UUDS	: Undang-Undang Dasar Sementara
VCD	: <i>Video Compact Disc</i>
WNI	: Warga Negara Indonesia
WNRI	: Warga Negara Republik Indonesia